



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TAHUN 2017 - 2018



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Kesuma Bangsa No 2
Telephone. (0541) 741044
Faximille. (0541) 742283
SAMARINDA



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(TPB/*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*)
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 - 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* merupakan komitmen global dan nasional, bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan; perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar; kesenjangan antar daerah; kelompok pendapatan, dan gender; akses terhadap keadilan; perbaikan kualitas lingkungan hidup; serta pembangunan yang inklusif dan cara pelaksanaan, melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif sesuai pasal 1 ayat 4 dan pasal 2 ayat 2 perpres 59 tahun 2017;
- b. bahwa untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia diperlukan peran aktif dan dukungan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk Rencana Aksi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Kalimantan Timur 2017-2018;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) /SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017-2018.**

BAB. I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kalimantan Timur.
3. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen rencana aksi yang menjadilandasakan bagi pelaksana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh Aktor Pembangunan dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Aktor Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* berisi 17 (Tujuh Belas) Tujuan yang meliputi :
 1. Tanpa Kemiskinan;
 2. Tanpa Kelaparan;
 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
 4. Pendidikan Berkualitas;
 5. Kesetaraan Gender;
 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 7. Energi Bersih dan Terjangkau;
 8. Pekerjaan Layak dan PERTumbuhan Ekonomi;
 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
 10. Berkurangnya Kesenjangan;
 11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;
 12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
 13. Penanganan Perubahan Iklim;
 14. Ekosistem Lautan;
 15. Ekosistem Daratan;
 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh;
 17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

BAB. II
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs
BAB III	: TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs
BAB IV	: PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
BAB V	: PENUTUP

- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

BAB. III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs.
- (2) Tata Cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB. IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILINA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43

KATA PENGANTAR

Indonesia berkomitmen melaksanakan agenda SDGs melalui Peraturan Presiden Nomor: 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sejalan dengan semangat nasional, Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* tersebut.

Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan menyusun Rencana Aksi Daerah SDGs yang disusun dalam bentuk narasi dan matrik yang menggambarkan rencana program dan kegiatan dalam rangka mencapai seluruh target SDGs pada tahun 2030 mendatang. Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs ini merupakan pijakan dan panduan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka merubah misi menjadi aksi nyata. Dengan adanya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs ini, diharapkan dapat membuat lebih fokus seluruh upaya bersama semua pihak dan mempercepat pencapaian target SDGs di Provinsi Kalimantan Timur.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Terima kasih kepada Tim Sekretariat SDGs Provinsi Kalimantan Timur yang telah membantu mempersiapkan draft awal hingga terselesaikannya draft RAD SDGs Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, September 2018

BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kepala,

DR. Ir H. ZAIRIN ZAIN, M.Si
NIP. 19590714 198611 1 001

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Misi RPJMD

Pembangunan global yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan pembangunan global periode 2016-2030 sebagai transformasi Tujuan Pembangunan Milenium/*Millenium Development Goals* (MDGs) untuk menjangkau masyarakat yang sangat rentan. SDGs meneruskan prioritas-prioritas pembangunan MDGs yang meliputi : penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*). Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. 17 tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesenjaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan PERTumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;

12. Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh;
17. Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan ditingkat global, Pemerintah Indonesia terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan nasional yang selaras dengan pembangunan global ini merupakan kontribusi yang positif dari Indonesia sebagai bagian penting dalam proses penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Visi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 adalah **“Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan yang Berkelanjutan”**. Visi jangka panjang tersebut diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 yaitu **Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan**.

Untuk mencapai visi di atas, misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan;
3. Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan

5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim.

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur terkait dan selaras dengan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Misi mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi dan mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata terkait dan selaras dengan pilar sosial di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Misi mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di pilar ekonomi. Pilar lingkungan di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan didukung oleh misi mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di pilar hukum dan tata kelola.

1.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya.

TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No One Left Behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs,

Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Kalimantan Timur mengikuti semangat nasional yang menjadikan SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada proses penyusunan dan dokumen Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah

1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Komitmen pelaksanaan SDGs di Indonesia diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai wujud implementasi di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 43 tanggal 17 September 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2018. Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut telah disusun tim koordinasi pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja. Tim Pengarah diketuai oleh Gubernur, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Pokja dibagi berdasarkan pilar pembangunan SDGs yang diketuai oleh Kepala Bidang dan Sekretaris lingkup Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip inklusif SDGs, Tim Koordinasi SDGs Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan media. Sedangkan untuk membantu tugas dan fungsi Tim Koordinasi SDGs Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk Sekretariat SDGs melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Pembiayaan SDGs

Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari :

1.4.1. Optimalisasi Penerimaan Daerah.

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, pendapatan bukan pajak, transfer pemerintah pusat (DBH pajak dan bukan pajak), dan lainnya akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan

itu, bahkan menjadi salah satu indikator SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan di Provinsi Kalimantan Timur.

1.4.2. Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah

Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan survei Gallup (2016) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang kurang dari 2 persen, belum bila ditambahkan yang lainnya.

Kedermawanan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) kini juga terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp. 12 triliun per tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs.

1.4.3. Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah

Pembiayaan inovatif kini *juga* dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap to SDGs*, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan Energi Baru Terbarukan serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan 7.

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Sesuai dengan amanat Perpres No. 59 Tahun 2017 Tanggal 04 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa selambat-lambatnya dalam waktu dua belas bulan sejak disahkannya Perpres tersebut, Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi harus ditetapkan.

Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur yang melibatkan seluruh aktor pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1.5.1. Pembentukan kelembagaan

Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk kelembagaan pelaksana SDGs dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan di tingkat provinsi melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024.

Pembentukan kelembagaan pelaksanaan SDGs dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang diawali melalui upaya membangun pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan pembangunan terhadap pentingnya keterlibatan dan kontribusi seluruh aktor untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam kerangka hasil SDGs. Adapun detail proses pembentukan kelembagaan pelaksana SDGs Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan konsep kelembagaan pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Format kelembagaan SDGs di Provinsi Kalimantan Timur dibangun dalam bentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan SDGs yang dipimpin oleh Kepala Daerah, yang di dalamnya terdiri beberapa Kelompok Kerja berbasis isu pembangunan yang beranggotakan semua unsur termasuk unsur non-pemerintah. Adapun struktur organisasi tim koordinasi pelaksanaan SDGs tersebut terdiri dari:

- 1) Tim Pengarah yang diketuai oleh Gubernur Riau;
- 2) Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Riau; dan
- 3) Kelompok Kerja yang dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan pilar pembangunan SDGs yang terdiri dari:
 - a) kelompok kerja pilar pembangunan social,
 - b) kelompok kerja pilar pembangunan ekonomi,
 - c) kelompok kerja pilar pembangunan lingkungan, dan
 - d) kelompok kerja pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

Tim Koordinasi SDGs Provinsi Kalimantan Timur bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara program non-pemerintah dengan program-program pembangunan pemerintah, menyusun rencana aksi SDGs secara bersama-sama, melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala dan memberikan supervisi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs. Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, Tim Koordinasi ini dibantu oleh Sekretariat SDGs di Tingkat Provinsi yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan dibentuk melalui keputusan Kepala Bappeda.

b. Penyusunan Draft Keputusan Gubernur dan Pengesahannya.

Berdasarkan dokumen konsep kelembagaan, maka Bappeda Kalimantan Timur menyusun draft Keputusan Gubernur tentang tim koordinasi pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Timur. maka pertimbangan hukum yang dijadikan landasan penyusunan keputusan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Peraturan tersebut ini dianggap paling relevan dengan pertimbangan bahwa esensi dari pelaksanaan SDGs adalah pengintegrasian kerangka hasil dan prinsip SDGs kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan implemetasinya.

1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan TPB/SDGs dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs. Bab ini menjabarkan pula platform partisipatif dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan SDGs serta potensi pembiayaan lainnya. Proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas bab pertama.

Bab kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2016 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2018.

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdapat pada RPJMD 2013-2018 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab

ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAN ini.

Bab keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2017-2018. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur.

Bab kelima merupakan penutup dari Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.

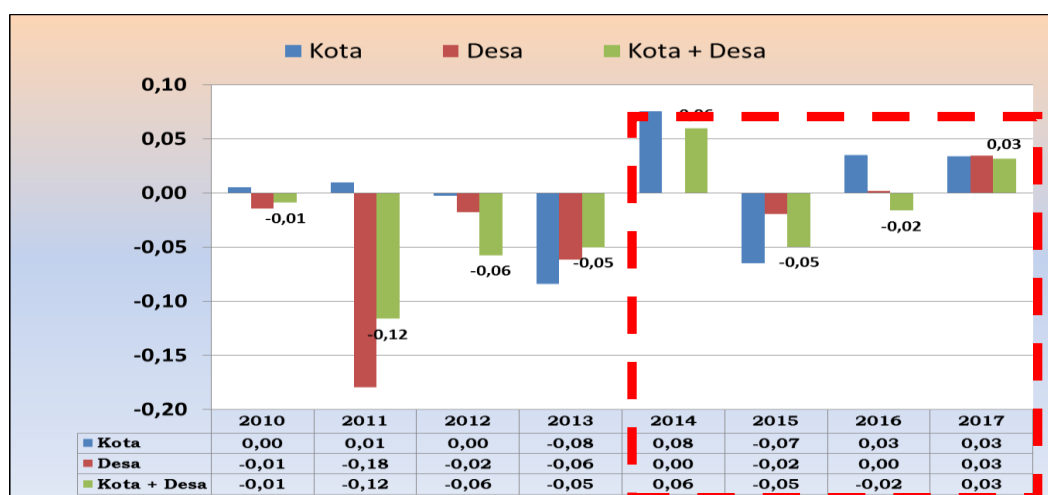
BAB II.
KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

2.1. KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

2.1.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi. Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur fluktuatif walaupun tidak secara signifikan. Dengan menggunakan ukuran garis kemiskinan Kalimantan Timur, persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan juga mengalami penurunan dari 7,66% pada tahun 2010 menjadi 6,08% pada tahun 2017 (BPS, angka Januari 2018). Angka tersebut setara dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 243.000 penduduk pada tahun 2010 menjadi 218.670 penduduk yang berarti secara rata-rata, jumlah penduduk miskin menurun 3.475 jiwa/tahun.

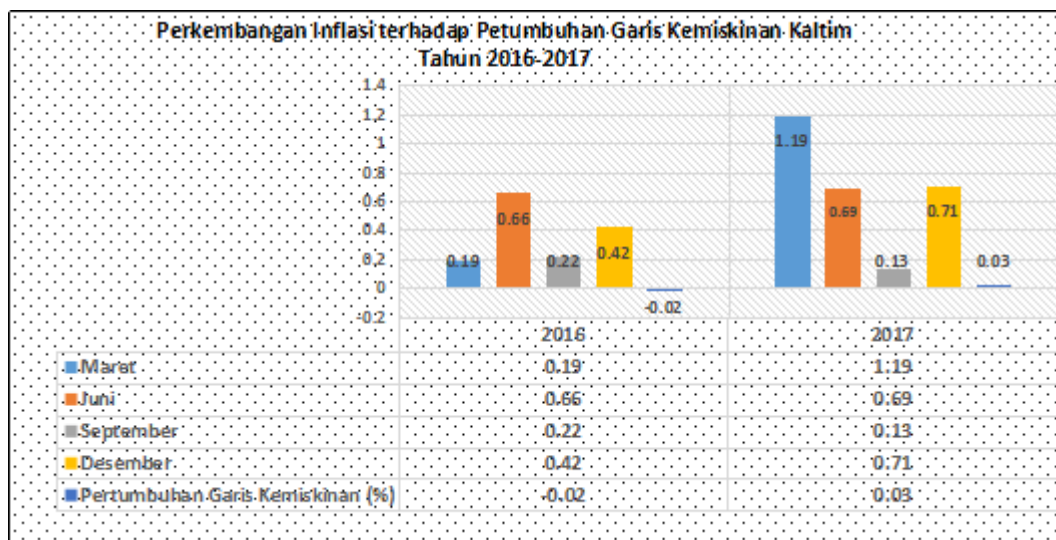
Penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur dihadapkan pada laju penurunan angka kemiskinan yang semakin melambat. Selama kurun waktu 2010-2017, rata-rata laju penurunan angka kemiskinan hanya sebesar 0,02%. Laju penurunan angka kemiskinan tertinggi dicapai pada tahun 2011 dengan penurunan sebesar 0,12%, sementara laju penurunan terendah sebesar 0,02% terjadi pada tahun 2016. Laju penurunan angka kemiskinan di wilayah perdesaan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan wilayah perkotaan pada periode 2014-2015.



Gambar 2.1. Laju Penurunan Angka Kemiskinan 2010-2017

Sumber : BPS Kaltim, diolah Bappeda

Upaya pengendalian harga kebutuhan pokok menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menurunkan angka kemiskinan. Peningkatan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, terutama pada komponen pembentuk garis kemiskinan memperlambat upaya penanggulangan kemiskinan daerah. Selama dua tahun terakhir angka kemiskinan provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tingkat pertumbuhan yang cenderung tinggi dibandingkan dera rata-rata inflasi secara umum. Perkembangan inflasi di Kalimantan Timur terhadap laju pertumbuhan penurunan garis kemiskinan tahun 2016-2017, sebagai berikut:



Gambar 2.2. Perkembangan Inflasi terhadap Pertumbuhan Garis Kemiskinan Kaltim Tahun 2016-2017.

Sumber Data : BPS Kaltim diolah Bappeda Kaltim

Upaya menurunkan angka kemiskinan dihadapkan pada tantangan dimensi lainnya, yaitu rendahnya intensitas program penanggulangan kemiskinan yang berbasis penciptaan **pendapatan**. Upaya terkait dengan meringankan beban pengeluaran telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS). Namun, upaya penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada upaya untuk meningkatkan pendapatan masih relatif rendah. Upaya yang telah dilakukan pemerintah sejauh ini antara lain Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Upaya tersebut sejauh ini masih belum optimal yang

tercermin dari masih rendahnya pertumbuhan pendapatan kelompok 40% terbawah dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sistem Perlindungan Sosial Nasional. Sampai dengan tahun 2018, jumlah peserta JKN di Kalimantan Timur sekitar 2,9 juta jiwa dari 3,5 juta jiwa dan masih tersisa $\pm 17\%$ atau sebesar 600.000 jiwa masyarakat yang harus menjadi peserta JKN-KIS agar dapat memenuhi target *Universal Health Coverage* (UHC).

Sedangkan sampai bulan Desember 2017 jumlah JKN nasional sebesar 187,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92,4 juta jiwa (49,14%) peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN. Sementara, peserta PBI JKN dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 20,3 juta jiwa (10,8%). Secara kumulatif, peserta JKN yang dibiayai oleh pemerintah sebagai penerima bantuan iuran (APBN dan APBD) mencapai 112,7 juta jiwa peserta atau hampir 60% dari total peserta. Sementara Pekerja Penerima Upah (PPU) JKN hanya mencapai 44,9 juta atau 23,8%. Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan adalah rendahnya peserta yang termasuk dalam kategori mandiri, hanya sekitar 16% dari seluruh peserta aktif. Sementara itu masih terdapat 30% penduduk di Indonesia yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.

Jumlah peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan pada Desember 2017 sekitar 26,2 juta pekerja. Kepesertaan tersebut mengalami peningkatan sekitar 15,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, tingkat kepesertaan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan relatif rendah yaitu sekitar 21,68% dari seluruh pekerja aktif di Indonesia. Tantangan bagi penyediaan jaminan sosial bidang ketenagakerjaan adalah memperluas cakupan kepesertaan pada sektor informal yaitu dalam kelompok pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri.

Sedangkan peserta Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan di Kalimantan Timur pada Juli 2017 tercatat 9.378 perusahaan yang terdaftar sebagai peserta dengan jumlah tenaga kerja mencapai 409.744 orang, sementara peserta informal sekitar 38.755 orang.

Masalah yang masih dihadapi Kalimantan Timur terkait dengan aksesibilitas pendidikan adalah disparitas antar wilayah, terutama untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.

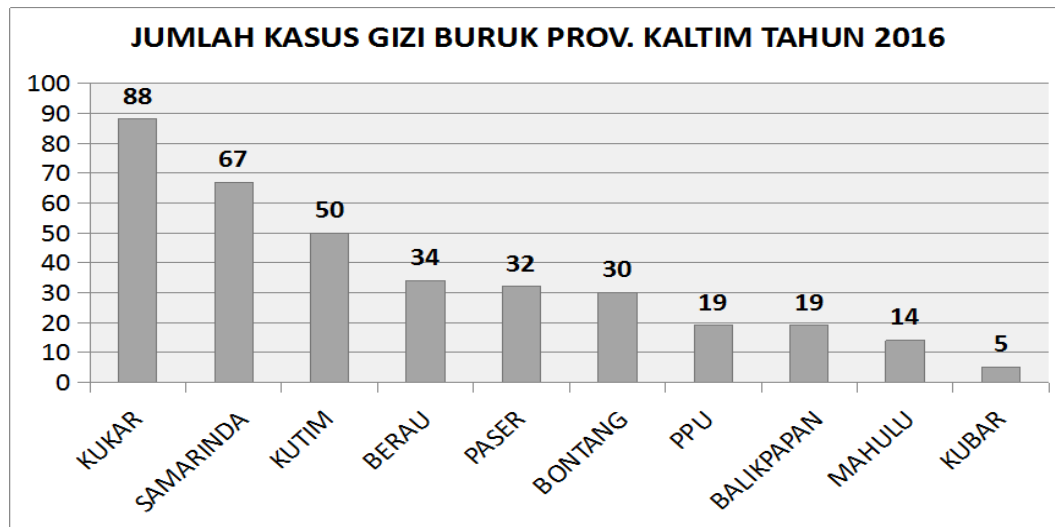
2.1.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

2.1.2.1. Menghilangkan Kelaparan

Dari aspek penanganan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Salah satu indikator terkait langsung dengan tujuan SDGs tersebut yaitu status gizi yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Dalam laporan ini hanya mengemukakan status gizi balita yang dapat diukur berdasarkan berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB).

2.1.2.2. Menghilangkan Segala Bentuk Kekurangan Gizi

Berat badan yang rendah dapat disebabkan karena tubuh yang pendek (kronis) atau karena diare atau penyakit infeksi lain (akut). Oleh karena keseimbangan antara berat badan dengan tinggi badan sangat dipengaruhi oleh konsumsi gizi yang seimbang. Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2016 disetiap Kab/Kota mengalami fluktuasi, dimana kabupaten Kutai Kartanegara menduduki tertinggi kasus gizi buruk sebesar 88 kasus, seperti pada gambar berikut :



Gambar 2.3. Perkembangan Kasus Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kaltim

Oleh karena itu program dan kegiatan bidang pangan dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Faktor makanan dan penyakit infeksi, sebagai penyebab langsung masalah gizi, keduanya saling berkaitan. Anak balita yang tidak mendapat cukup makanan bergizi seimbang memiliki daya tahan yang rendah terhadap penyakit sehingga mudah terserang infeksi. Sebaliknya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dapat mengakibatkan asupan gizi tidak dapat diserap tubuh dengan baik sehingga berakibat gizi buruk. Oleh karena itu, mencegah terjadinya infeksi juga dapat mengurangi kejadian gizi kurang dan gizi buruk. BBLR akibat kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil, dapat meningkatkan angka kematian bayi dan anak balita. Anemia kurang zat besi pada ibu hamil dapat meningkatkan resiko kematian waktu melahirkan dan melahirkan bayi yang juga menderita anemia. Kurang vitamin A (KVA) pada bayi dan anak balita dapat menurunkan daya tahan tubuh, meningkatkan resiko kebutaan, dan meningkatkan resiko kesakitan dan kematian akibat infeksi (Tarwotjo, et al 1989).

2.1.2.3. Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan Berkelanjutan

Untuk mencapai ketahanan pangan maka terdapat empat dimensi yang harus di perhatikan antara lain:

- Dimensi pertama yaitu ketersediaan pangan secara fisik dari sisi penyediaan dengan meningkatkan jumlah produksi, tingkat ketersediaan stok dan perdagangan bersih (*net trade*).
- Dimensi kedua akses pangan secara fisik dan ekonomi diperlukan kebijakan yang fokus peningkatan pendapatan, pengurangan belanja keluarga miskin, ketersediaan fasilitas pasar yang memadai dan harga yang terjangkau.
- Dimensi ketiga dengan memperhatikan penggunaan pangan artinya pangan yang dikonsumsi harus memberikan energi yang mencukupi (kkal/kapita/hari) dan protein (gram/kapita/hari) yang lengkap serta adanya variasi konsumsi pangan.
- Dimensi keempat perlunya stabilitas yang mempengaruhi ketiga dimensi tersebut di atas. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan rasio antara produksi pangan dan konsumsi pangan baik beras, jagung, sayur, buah-buahan, ruminansia, unggas dan ikan.

Upaya peningkatan produksi pangan harus didukung oleh adanya kebijakan peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan melalui peningkatan produktifitas secara maksimal dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekologi & biosfer dan keberlanjutan masyarakat. Keberlanjutan ekologi & biosfer meliputi keberlanjutan sumberdaya dan lingkungan sementara keberlanjutan masyarakat meliputi keberlanjutan cultural, keberlanjutan social, dan keberlanjutan politis serta keberlanjutan institusi. Oleh karena itu program dan kegiatan pembangunan bidang penanganan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan harus tepat tujuan, sasaran dan strategi.

Perkembangan jumlah dan jenis bahan pangan yang dikonsumsi mencerminkan tingkat kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan, yang

dipengaruhi berbagai faktor seperti pendapatan rumah tangga, ketersediaan bahan pangan yang terdistribusi secara merata dengan harga yang terjangkau, serta pemahaman dan tingkat kesadaran gizi masyarakat. Secara umum, potensi pangan Kalimantan Timur masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya kecuali komoditi ubi kayu.

Khusus untuk kebutuhan konsumsi beras, terlihat dari produksi padi Kalimantan Timur tahun 2015 yang mencapai 408.782 ton masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan beras penduduk Kalimantan Timur yang berjumlah 3.426.838 jiwa. Bila dilakukan konversi gabah kering giling ke beras, maka pada tahun 2015 Provinsi Kalimantan Timur hanya menghasilkan beras sebesar $0,6285 \times 408.782 \text{ ton} = 256.919 \text{ ton}$ beras. Sementara kebutuhan beras penduduk sebesar $(114 \text{ kg/kapita} \times 3.426.838 \text{ jiwa})/1000 = 390.660 \text{ ton}$ beras. Dengan demikian pada tahun 2015 Kalimantan Timur masih kekurangan beras sebesar 133.740 ton beras. Bila kekurangan beras tersebut dikonversi ke Gabah Kering Giling, maka kekurangannya sebesar 212.792 ton.

Penyebab belum terpenuhinya kebutuhan konsumsi beras di Kalimantan Timur adalah produksi padi yang belum bisa maksimal dikarenakan lokasi lahan terpencar-pencar dengan luasan kecil-kecil, sarana dan prasarana (benih, pupuk, pestisida, alsintan) serta infrastruktur sangat terbatas, belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian, meningkatnya kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim, lemahnya permodalan dan kelembagaan petani, terjadinya perubahan SDM petugas dan struktur organisasi di tingkat kabupaten/kota, adanya serangan organisme pengganggu tanaman, dan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat.

Tabel 2.1 Ketersediaan dan Konsumsi Pangan Di Kalimantan Timur Tahun 2011 - 2016 (Ton)

TAHUN	TARGET	BERAS	JAGUNG	KEDELAI	KC. TANAH	KC. HIJAU	UBI KAYU	UBI JALAR
2011	Produksi	267,430	5,332	1,493	1,402	552	56,558	13,691
	Konsumsi	356,064	14,930	21,551	12,244	4,248	38,792	15,898
	Surplus	- 88,634	- 9,598	- 20,058	- 10,841	- 3,696	17,766	- 2,207
2012	Produksi	266,905	6,093	952	1,399	407	47,036	11,477
	Konsumsi	364,765	15,295	22,078	12,543	4,352	39,740	16,286
	Surplus	- 97,860	- 9,201	- 21,126	- 11,143	- 3,945	7,296	- 4,809
2013	Produksi	276,187	4,182	1,269	1,322	339	47,194	11,434
	Konsumsi	373,446	15,659	22,603	12,841	4,455	40,686	16,674
	Surplus	- 97,259	- 11,476	- 21,335	- 11,519	- 4,116	6,508	- 5,240
2014	Produksi	268,098	6,508	1,020	1,385	333	51,800	11,443
	Konsumsi	382,060	16,020	23,125	13,138	4,558	41,624	17,059
	Surplus	- 113,962	- 9,512	- 22,104	- 11,753	- 4,225	10,176	- 5,615
2015	Produksi	256,919	7,206	1,375	1,027	160	45,871	9,621
	Konsumsi	390,660	16,380	23,645	13,433	4,660	42,561	17,443
	Surplus	- 133,740	- 9,174	- 22,270	- 12,407	- 4,501	3,310	- 7,822
2016	Produksi	239.184	7.382	1.423	887	193	57.243	7.033
	Konsumsi	385.208	16.295	23.521	13.363	4.636	42.339	17.3521
	Surplus	- 146.024	- 8.912	- 22.099	- 12.486	- 4.443	14.904	- 10.319

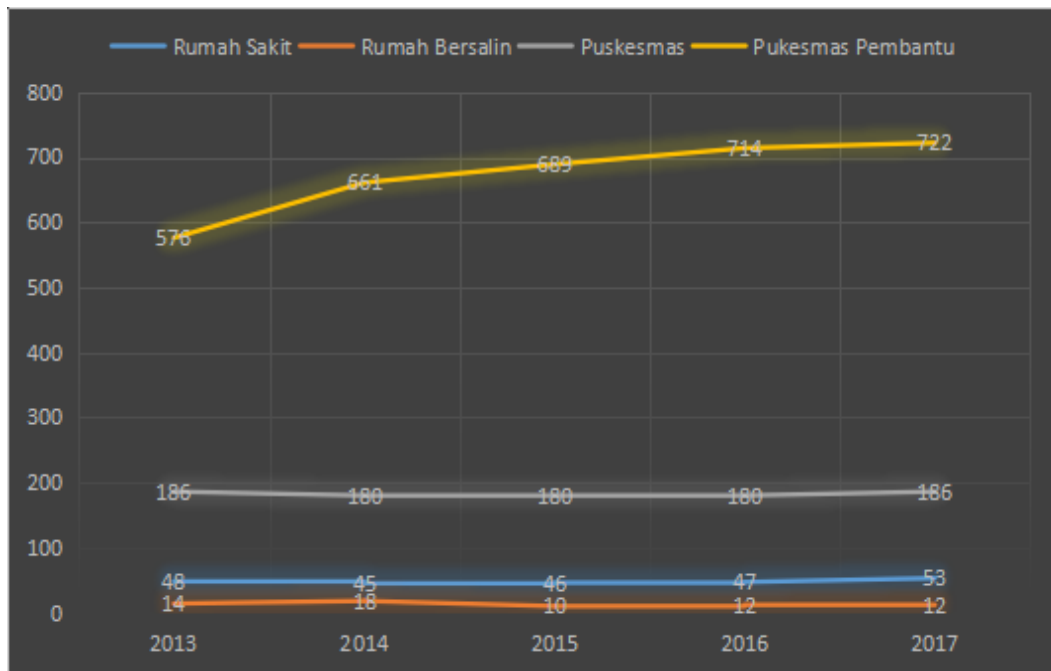
Sumber : Dinas Pangan TPH Prov. Kaltim, diolah BKPP Prov. Kaltim 2016

2.1.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Terkait dengan kesehatan, maka pelayanan kesehatan sangat diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Sejalan dengan upaya pemerintah melakukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan program peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia, teknologi, perbaikan pengelolaan kelembagaan kesehatan dan kebijakan, sehingga terjadinya perbaikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Secara umum program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di provinsi Kalimantan Timur mengalami perbaikan, walaupun beberapa diantaranya masih

harus mendapatkan prioritas terutama terkait dengan rasio pertumbuhan yang semakin meningkat.

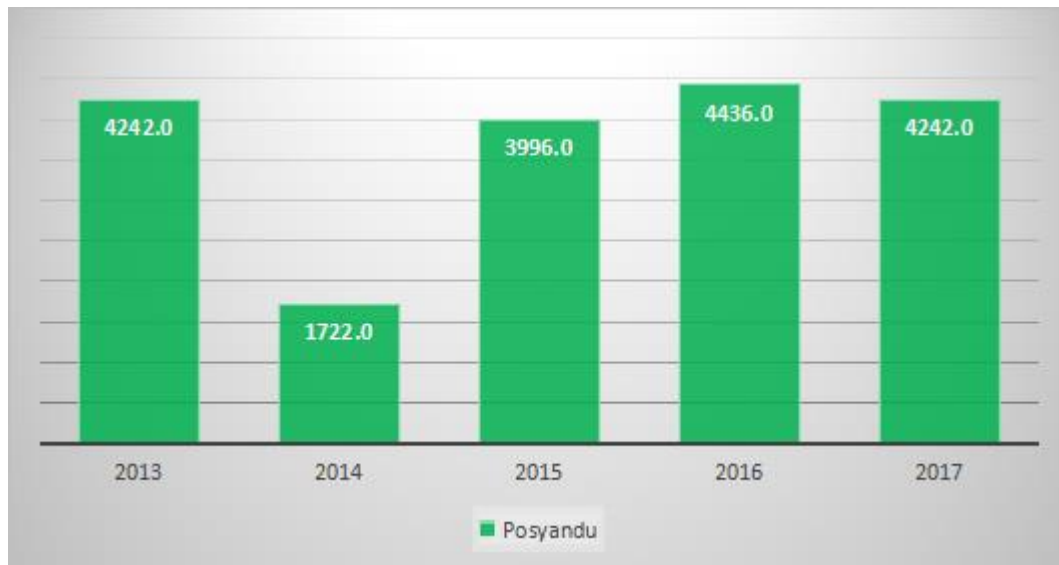
Rasio pelayanan kesehatan di Kalimantan Timur menunjukkan kearah perbaikan dari tahun 2013-2017, Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang terus mengalami peningkatan termasuk tenaga medis dan tenaga dokter. Berikut disajikan pada Gambar 2.4 tentang fasilitas pelayanan kesehatan dari aspek rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas pembantu dan puskesmas pembantu di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013-2017.



Gambar 2.4. Perkembangan Fasilitas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

Sementara perkembangan posyandu sejak tahun 2013 - 2017 sangat berfluktuasi seperti terlihat pada gambar 2.5 berikut ini :

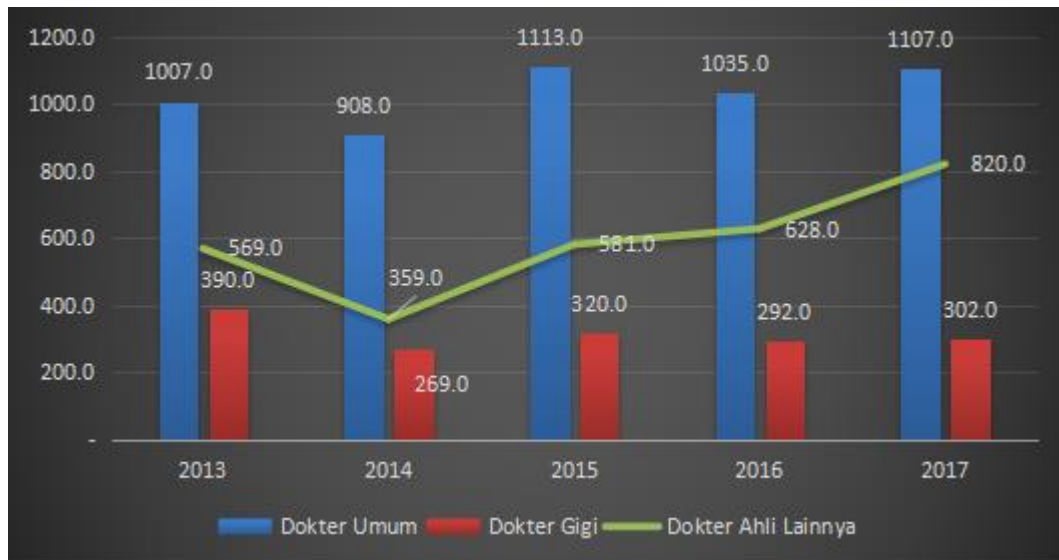


Gambar 2.5 Perkembangan Posyandu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

Beberapa pelayanan kesehatan dasar yang sudah diselenggarakan adalah penyediaan sarana dan prasarana posyandu, dokter, tenaga medis. Analisis terhadap perkembangan capaian suatu indikator adalah penting untuk melihat pola pencapaian target pembangunan menurut indikator tersebut. Perkembangan itu dapat diketahui dengan mengamati perubahan antar-waktu dari capaian indikator bidang kesehatan. Capaian indikator bidang kesehatan sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan. Upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga medis kesehatan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan pelayanan sehingga resiko kesehatan dapat dikurangi seperti angka kematian ibu melahirkan. Penurunan kematian ibu yang dihubungkan dengan peningkatan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Selain itu, diperlukan penjaminan kompetensi tenaga kesehatan melalui berbagai upaya yang meliputi pendidikan *pre-service*, *in-service training*, penerapan kewenangan tenaga kerja yang sesuai, sertifikasi tenaga dan fasilitas kesehatan, pemberian izin praktek tenaga kesehatan dan upaya audit pelayanan terhadap tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Berikut disajikan perkembangan rasio tenaga medis di provinsi Kalimantan Timur 2013-

2017. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan beban kerja tenaga medis dalam pelayanan kesehatan semakin bertambah dari tahun 2013-2017. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio yang semakin meningkat.



Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Dokter Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

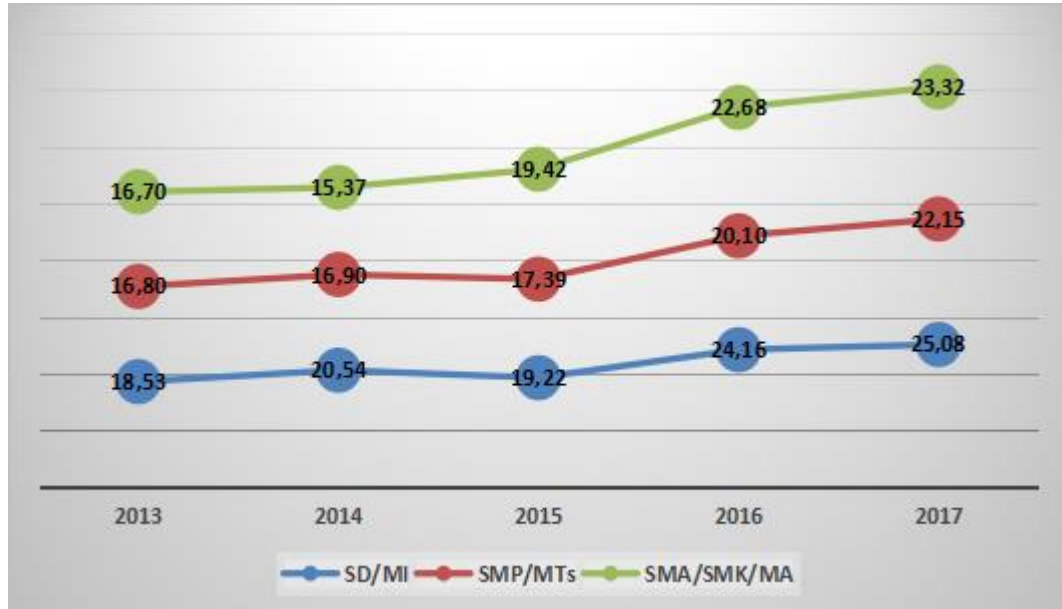
Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

2.1.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

Pembangunan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur telah menunjukkan keberhasilan yang cukup baik dengan rata-rata lama sekolah 9,36 tahun pada tahun 2017. Kemajuan tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur sekolah (sarana dan prasarana) dan bantuan soft skill lainnya serta program Wajib Belajar 9 tahun dan 12 tahun yang diakui cukup sukses.

Menurut UU 23 tahun 2014, kewenangan provinsi dalam menangani bidang pendidikan yaitu hanya pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK dan MA) serta pendidikan khusus dan layanan khusus. Dengan kewenangan ini diharapkan percepatan peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah akan lebih baik.

Berikut disajikan rasio murid/siswa terhadap ketersediaan ruang kelas dari tahun 2013-2017 :



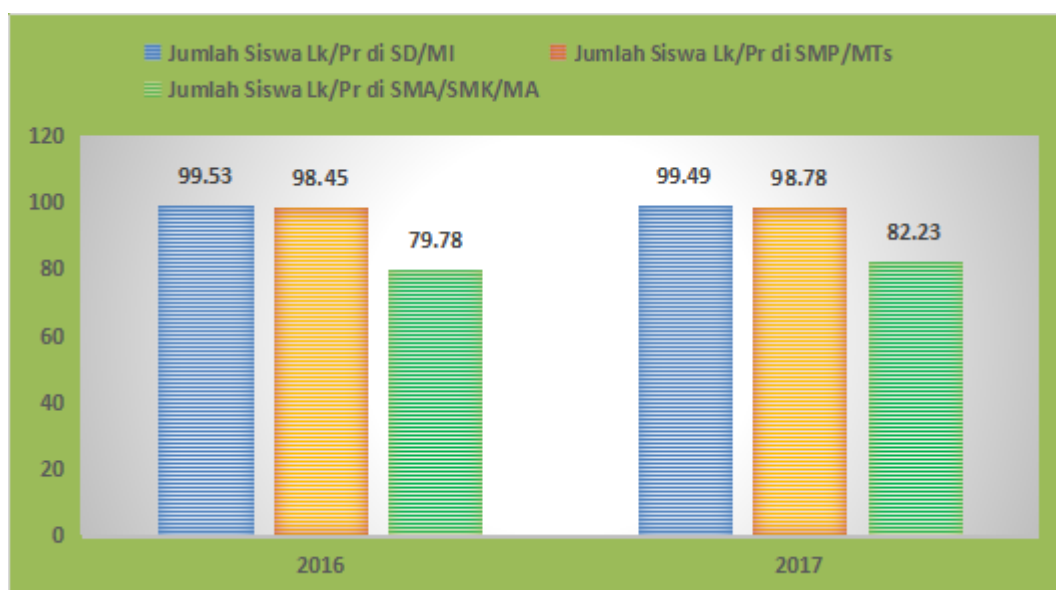
Gambar 2.7. Rasio Murid/Siswa Terhadap Guru Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

Jumlah siswa dan guru yang terdata di Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan trend peningkatan jumlah, namun peningkatan jumlah guru belum seimbang dengan trend peningkatan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari rasio jumlah guru terhadap murid/siswa yang semakin bertambah dan terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Oleh karena itu diperlukan program dan kegiatan yang dapat meningkatkan rasio murid terhadap ruang kelas dan guru dalam rangka menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

2.1.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Kesetaraan gender ditekankan dalam Rencana Pembangunan di Indonesia untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan yang berkelanjutan. Walaupun banyak kemajuan yang dicapai, namun kesenjangan gender masih ada. Secara keseluruhan, tingkat kesetaraan gender di Provinsi Kalimantan Timur sudah berkategori baik. Hal ini dapat dilihat dari rasio APM perempuan terhadap laki-laki disemua tingkatan pada tahun 2017 sudah diatas 80. Hali ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat kesetaraan gender pada lembaga pendidikan semakin baik. Hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran kaum perempuan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia terkait pendidikan semakin tinggi semakin baik



Gambar 2.8 Rasio Murid/Siswa Perempuan Terhadap Laki-Laki Menurut Jenjang Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2017

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

Namun demikian upaya peningkatan rasio kesetaraan gender pada pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama harus terus dilakukan dengan program pendidikan wajib belajar sembilan tahun terutama di wilayah kabupaten kota yang kondisi rasio kesetaraan gendernya yang masih rendah dengan melihat

kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta sosialisasi pada masyarakat untuk menyekolahkan putrinya pada jenjang pendidikan tersebut.

Sementara itu kesetaraan gender pada pegawai menunjukkan bahwa jumlah pegawai menurut jenis kelamin di Kalimantan Timur, dimana jumlah pegawai laki-lakinya yang lebih banyak dibandingkan dengan pegawai perempuan. Dengan jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 6.525 orang, sementara jumlah pegawai perempuan hanya sebesar 2.659 orang dan sisanya sebanyak 3.956 adalah pegawai laki-laki. Oleh karena tingkat kesetaraan gender bidang pemerintahan menunjukkan bahwa peran kaum perempuan masih lebih sedikit dibandingkan dengan kaum laki-laki di Kalimantan Timur. Namun demikian perlu perbaikan dari aspek managerial kepegawaian agar kinerja pemerintah dapat ditingkatkan.

2.1.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Pada tahun 2017; 40% masyarakat sudah mempunyai akses masyarakat terhadap air minum yang berkualitas, telah melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas prasarana Lingkungan Permukiman Perkotaan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya dalam rangka Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, telah dilakukan penguatan kelompok kerja Monev Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Provinsi Kalimantan Timur di 10 kabupaten/kota, koordinasi dengan kabupaten/kota untuk pengendalian pencemaran limbah padat dan domestik, dan koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih.

Air bersih mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 2014-2016 jumlah Perusahaan Air Minum terdapat sebanyak 9 perusahaan dengan kapasitas potensial air minum setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 mencapai 6.339 liter per detik kemudian naik kapasitas potensial air minum menjadi 7.185 liter pwr detik. Produksi air bersih yang di salurkan pada tahun 2016 sebesar 152,47 juta m³, sejumlah 134,23 juta m³ (88,04 persen) di distribusikan ke kelompok Non Niaga yaitu rumah tangga dan instansi pemerintah, sejumlah 7,61 juta m³ (4,99 persen) ke kelompok Niaga, 2,27 juta m³ (1,74 persen) ke kelompok sosial, 7,69 juta m³ (0,05 persen) ke kelompok

industri dan 0,98 juta m³ (0,64 persen) kekelompok khusus (BPS, 2018). Perkembangan jumlah perusahaan dan kapasitas produksi perusahaan air bersih; produksi perusahaan air bersih menurut sumber air; dan jumlah pelanggan, volume dan nilai air bersih yang disalurkan menurut jenis pelanggan di Provinsi Kalimantan Timur disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Kapasitas Produksi Perusahaan Air Bersih Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2016

No.	Uraian	Satuan	Tahun		
			2014	2015	2016
1.	Jumlah Perusahaan	Unit	9	9	9
2.	Kapasitas Produksi				
a.	Kapasitas Potensial	Liter/Detik	6.339	6.985	7.185
b.	Kapasitas Efektif	Liter/Detik	5.995	6.420	6.445
c.	Efektivitas	%	94,57	91,91	89,70

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.3. Jumlah Sumber Air yang Digunakan di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 – 2016 (m³)

No.	Sumber Air	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Sungai	7	7	7
2.	Danau	2	2	2
3.	Waduk	3	3	3
4.	Artesis	2	2	2

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

Tabel 2.4. Volume dan Nilai Air Bersih yang Disalurkan menurut Jenis Pelanggan di Provinsi Kalimantan Timur, 2016

No.	Pelanggan	Air Bersih Yang Disalurkan	
		Volume (ribu m ³)	Nilai (juta Rp.)
1.	Kelompok Sosial	2.654	9.757,87
2.	Non Niaga	134.233	573.455,85
3.	Niaga	7.610	57.866,88
4.	Industri	7.690	8.153,26
6.	Kelompok Khusus	984	10.568,41
8.	Susut/Hilang		
	Jumlah Tahun 2016	152.473	659.192,26
		2015	174.585
		2014	126.705
		2013	122.335

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018

2.1.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Selama periode 2013 – 2015, penyediaan listrik oleh PT. PLN di Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat berdasarkan daya terpasang dan produksi listrik yang tersebar di kab/kota.

Tabel 2.5. Daya Terpasang dan Distribusi Listrik di Provinsi Kalimantan Timur 2015

No.	Kab/Kota	Daya Terpasang (MW)	Produksi Listrik (MWh)
1	Sektor Mahakam	157	1.894.608
2	Sektor Balikpapan	158	882.307
3	Samarnda	31	89.833
4	Balikpapan	4	9.359
5	Berau	93	335.718
6	Bontang	29	114.370
	Kalimantan Timur 2015	912	3.326.195
	2014	734,76	3.077.657
	2013	618	2.714.707

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018 (BPS Kaltim)

Secara keseluruhan, selama periode 2013 – 2015 jumlah energi listrik yang tersedia di Provinsi Kalimantan Timur terus meningkat namun masih jauh dari kebutuhan. Pada tahun 2013, jumlah rumah tangga yang mendapat pelayanan listrik PLN menurut kab/kota sebesar 431,52 ribu jiwa, meningkat menjadi 682,07 ribu jiwa pada tahun 2015.

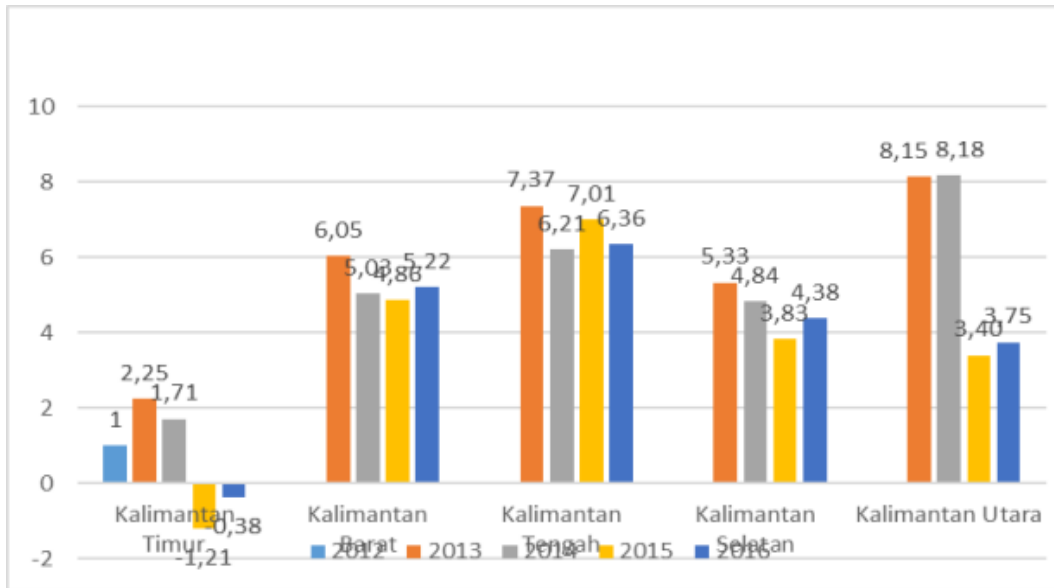
Upaya mencukupi suplai dan menjamin tegangan yang dapat diandalkan di era global yang akan datang, maka perlu diupayakan peningkatan daya listrik melalui penambahan dan diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru. Diversifikasi sumber-sumber pembangkit baru, untuk wilayah Kalimantan Timur dimungkinkan melalui pembangunan PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) dan lain sebagainya.

Kebijakan pemerintah di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kegiatan ekonomi khususnya sektor industri. Untuk mencapai sasaran tersebut diupayakan peningkatan daya terpasang pembangkit tenaga listrik serta perluasan jaringan distribusi agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dengan pelayanan yang baik.

2.1.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi merupakan upaya kunci yang harus dilaksanakan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja perekonomian daerah dapat dinilai dengan melihat beberapa indikator utama antara lain adalah laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan arus modal. Dilihat dari ketiga indikator tersebut, kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih belum optimal.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Kalimantan Timur berada pada urutan terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Kalimantan. Selain itu, meskipun mengalami fluktuasi yang hampir serupa dengan daerah lainnya pada periode tahun 2012-2016, namun pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur menurun drastis sejak tahun 2014. Bahkan, daerah tersebut merupakan satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mengalami LPE di bawah nol (minus) pada tahun 2015 dan 2016. Meskipun LPE meningkat 1,25 poin pada tahun 2013, namun tren tersebut kemudian menurun signifikan hingga berada pada angka -1,21 pada tahun 2015. Akan tetapi, capaian pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan sebesar 83 poin dibandingkan tahun sebelumnya meskipun masih berada pada capaian minus yaitu -0,38.



Gambar 2.9. Laju Pertumbuhan Ekonomi Semua Provinsi di Pulau Kalimantan Tahun 2013-2016

Sumber : BPS Kaltim diolah Bappeda Prov. Kaltim

2.1.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.

Kondisi objektif infrastruktur sektor perhubungan di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih terbatas dan belum memenuhi standar keselamatan, baik pada moda angkutan jalan, angkutan laut dan angkutan udara. Keterbatasan berbagai sarana dan prasarana transportasi tersebut berdampak intensitas tingkat pelayanan yang rendah.

Terkait dengan angkutan udara, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 17 pelabuhan udara yang berada di beberapa kab/kota dengan satu bandara bertaraf internasional berada di Kota Balikpapan, sementara lainnya bersifat perintis dan terus akan dikembangkan.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 16 pelabuhan umum, terdiri dari 1 pelabuhan utama 11 pelabuhan pengumpul, 1 pelabuhan pengumpan regional, 1 pelabuhan pengumpan lokal dan 1 pelabuhan pengumpan.

Tabel 2.6. Jumlah dan Lokasi Bandar Udara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No.	Nama Bandar Udara	Lokasi (Kab/Kota)	Hirarki Peran & Fungsi Existing (Tatanan Kebandar Udara Nasional)	Arah Pengembangan RTWRP 2016-2036	
				Hirarki Peran & Fungsi	Lokasi Bandar Udara
1	Sultan Aji M.Sulaiman	Balikpapan	Pengumpul skala primer	Tetap	Sepinggan
2	APT Pranoto	Samarinda	Pengumpul skala skunder	Pengumpul skala skunder	Sei Siring
3	Temindung	Samarinda	Pengumpul skala skunder	Relokasi ke APT Pranoto	Sei Siring
4	Kalimarau	Berau	Pengumpul skala tersier	Pengumpul skala skunder	Kalimarau
5	Bontang	Bontang	Pengumpul skala tersier	Tetap	Bontang
6	Kota Bangun	Kutai Kertanegara	Pengumpan	Tetap	Kota Bangun
7	Datah Dawai	Mahakam Hulu	Pengumpan	Tetap	Long Pahangai
8	Paser	Paser	Pengumpan	Tetap	Tana Paser
9	Melak	Kutai Barat	Pengumpan	Tetap	Barong Tongkok
10	Maratua	Berau	-	Pengumpan	Maratua
11	Miau Baru	Kutai Timur	-	Pengumpan	Muara Wahau
12	Long Apari	Mahakam Hulu	-	Pengumpan	Long Apari
13	Kembang Janggut	Kutai Kertanegara	-	Pengumpan	Kembang Janggut
14	Sangkimah	Kutai Timur	-	Pengumpul	Sangkimah
15	Maloy	Kutai Timur	-	Pengumpan	Maloy
16	Loa Kulu	Kutai Kertanegara	-	Pengumpan	Loa Kulu
17	Long Bagun	Mahakam Hulu	-	Pengumpan	Long Bagun

Sumber : Dinas Perhubungan Kaltim

Tabel 2.7. Jumlah dan Lokasi Pelabuhan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

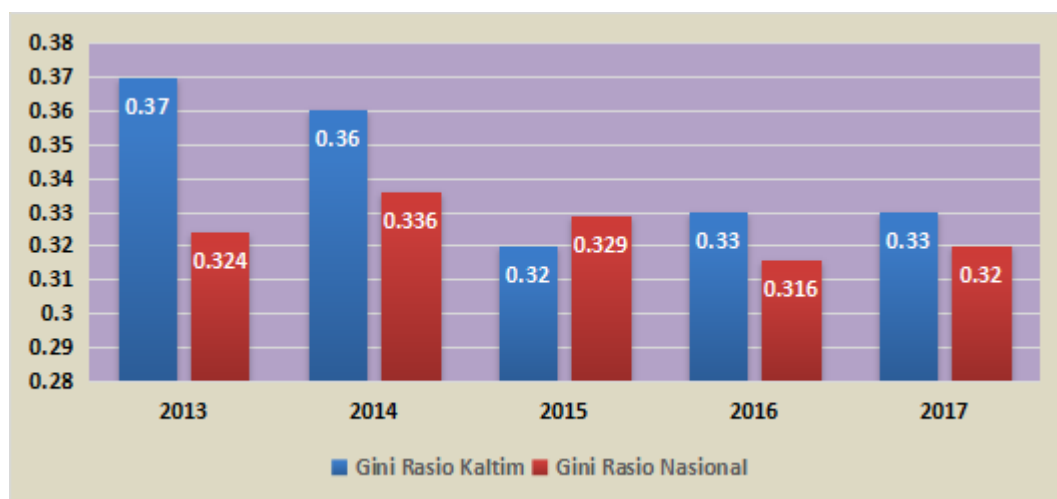
No.	Nama Pelabuhan	Lokasi	Hirarki Peran & Fungsi (Tatanan Kepelabuhan Nasional)	Arah Pengembangan RTWRP 2016-2036	
				Hirarki Peran & Fungsi	Lokasi Dermaga
1	Semayang	Balikpapan	Utama	Tetap	Semayang
2	Samarinda	Samarinda	Pengumpul	Tetap	Relokasi ke Palaran
3	Kampung Baru	Balikpapan	Pengumpul	Tetap	Kampung Baru
4	Tanjung Laut	Bontang	Pengumpul	Tetap	Tanjung Laut
5	Tanjung Santan	Kutai Kertanegara	Pengumpul	Tetap	Marangkayu
6	Kuala Samboja	Kutai	Pengumpul	Tetap	Kuala

		Kertanegara			Samboja
7	Sanggatta	Kutai Timur	Pengumpul	Tetap	Kenyamukan
8	Pondong	Paser	Pengumpul	Tetap	Pondong
9	Penajam Paser	Penajam Paser Utara	Pengumpul	Tetap	Paser
10	Teluk Adang	Paser	Pengumpul	Tetap	Teluk Adang
11	Lhok Tuan	Bontang	Pengumpul	Tetap	Lhok Tuan
12	Tanjung Redeb	Berau	Pengumpul	Tetap	Relokasi ke Mantaritip
13	Sangkulirang	Kutai Timur	Pengumpan Regional	Tetap	Sangkulirang
14	Talisayan	Berau	Pengumpan Lokal	Tetap	Talisayan
15	Maloy	Kutai Timur	-	Pengumpul	Teluk Golok
16	Tanjung Batu	Berau	Pengumpan	-	

Sumber : Dinas Perhubungan Kaltim

2.1.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara

Selama periode 2013-2017, angka indeks gini berkisar antara 0,37 – 0,33 dengan trend berfluktuasi menurun sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 6. Angka indeks gini ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Kalimantan Timur bergerak dari kategori relatif merata tahun 2016-2017 dan sedang dari tahun 2013-2015.



Gambar 2.10. Indeks Gini Pemerataan Pendapatan di Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Sumber : BPS Kaltim diolah Bappeda Prov. Kaltim

Pencapaian indeks gini Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebesar 0,33 lebih tinggi dibandingkan indeks gini Indonesia (0,32) meski berada dalam kelompok yang sama yaitu ketidakmerataan sedang.

2.1.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Berbagai upaya telah dilakukan untuk membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman tangguh dan berkelanjutan diantara melaksanakan program pengembangan perumahan dengan cara membangun Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1.547 unit.

Kelancaran perhubungan darat sangat tergantung dengan kondisi prasarana perhubungan darat, seperti jalan dan jembatan. Pada tahun 2017, panjang jalan 14.599,39 km, dengan rincian panjang jalan negara 1.710,91 km, panjang jalan provinsi 883,68 km dan panjang jalan kabupaten/kota 12.004,80 km. Jalan dalam kondisi baik sepanjang 426,16 km (48,23%), jalan dalam kondisi sedang sepanjang 29,85 km (3,38), dan 51,61 persen lainnya dalam kondisi rusak atau rusak berat. Panjang jalan yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Gambar 2.11. Panjang Jalan Menurut Pemerintahan Yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi Kalimantan Timur, 2013-2017

Sumber : Kaltim Dalam Angka Tahun 2018 (BPS Kaltim)

Tabel 2.8. Pembangunan Rumah Layak Huni di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

No.	Kab/Kota	Tahun					Total Kab/Kota
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Samarinda	76	40	40	15	62	223
2	Balikpapan	76	40	40	15	-	171
3	Bontang	63	40	40	15	-	158
4	Kubar	86	40	40	15	-	181
5	Kukar	73	40	40	15	-	168
6	Kutim	66	40	40	15	-	161
7	Berau	60	30	30	15	-	135
8	PPU	60	40	40	15	-	155
9	Mahakan Ulu	-	-	15	15	-	30
10	Paser	60	40	40	15	-	155
Total/Tahun		534	310	310	120	62	1.547

Sumber : Dinas PUPRPERA Prov. Kaltim Bidang Perumahan & Permukiman, 2017

2.1.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Propinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pada tahun 2017 melalui peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER) pada 223 perusahaan dan pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3. Jumlah tersebut terdiri dari 12 perusahaan yang menerima bendera hitam, 25 perusahaan dan industri jasa menerima bendera merah, 107 perusahaan menerima bendera biru, 27 perusahaan menerima bendera hijau dan 13 perusahaan menerima bendera emas. Selain itu, program peningkatan disiplin aparaturnya juga terus dilakukan melalui sosialisasi Program 3R di 10 kab/kota. Program penyehatan lingkungan permukiman dilaksanakan dengan membangun TPA Regional serta program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan melalui pengawasan dan pembinaan pelaku usaha tambang mineral logam, bukan logam dan batuan di Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya untuk mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pengelolaan sampah. Total timbunan sampah yang terangkut dan dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) per hari tahun 2015 berjumlah

sekitar 5.468,45 M³ atau (66,43%), pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagai berikut: diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur 10%, dikompos dan didaur ulang 7%, dibakar 5%, dan sisanya tidak terkelola 7%.

Tabel 2.9. Produksi dan Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

No.	Kab/Kota	Perkiraan Produksi Sampah per Hari	Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari	Persentase Sampah Terangkut Per Hari (%)
1	Paser	426,98	116,77	27,35
2	Kutai Barat	70,00	52,50	75,00
3	Kutai Kartanegara	174,50	157,01	89,98
4	Kutai Timur	844,20	650,00	77,00
5	Berau	112,00	106,00	94,64
6	Penajam Paser Utara	450,00	108,50	24,11
7	Balikpapan	2.187,23	1.749,78	80,00
8	Samarinda	3.565,35	2.205,52	61,86
9	Bontang	401,10	322,37	80,37
10	Mahakam Hulu	-	-	-
JUMLAH 2015		8.231,36	5.468,45	66,43
2014		3.676,52	1.325,01	36,04
2013		3.676,41	3.667,78	64,61

Sumber : (BPS Kaltim) 2016

2.1.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Indek Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan setiap tahun dan katagori/level tergantung dari kualitas 3 (tiga) komponen dalam IKLH. Kecendrungan dan pola perubahan IKLH Provinsi Kalimantan Timur dalam periode 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.10. Perubahan IKLH Provinsi Kalimantan Timur dalam Periode 2013-2016

Indeks	2013	2014	2015	2016
Indeks Kualitas Udara	84,79	83,96	96,20	80,20
Indeks Kualitas Air	48,67	54,80	77,90	79,77
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	82,92	80,93	81,15	72,14
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,21	74,00	72,30	76,85

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2013-2017)

2.1.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Potensi perikanan tangkap Provinsi Kalimantan Timur yang dimanfaatkan setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah rumah tangga menjadi nelayan, pada tahun 2017 sebesar 90.076 terbagi menjadi perikanan laut sebanyak 44.547 dan perikanan darat 45.529.

Selanjutnya dari produksi perikanan menurut sektor masih didominasi oleh perikanan laut pada tahun 2017 sebesar 113.975,51 Ton dan terkecil sektor perikanan darat berasal dari perikanan sawah hanya sebesar 3,70 Ton.

Perairan pesisir dan laut Provinsi Kalimantan Timur yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di Provinsi Kalimantan Timur menyimpan potensi untuk tumpuan masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, industri mineral dan bioteknologi.

Produksi Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya secara keseluruhan pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel

Tabel 2.11. Perkembangan Produksi Tahun 2013-2017 (ton)

No	Kab/Kota	Perikanan Laut	Perikanan Darat					
			Perairan Umum	Tambak	Kolam	Keramba	Sawah	Budidaya
1	Paser	10.825,40	112,30	12.476,50	157,20	6,70	-	400,00
2	Kutai Barat	-	1.209,70	-	172,30	835,10	-	-
3	Kutai Kartanegara	38.535,90	33.851,30	41.908,80	1.487,00	42.229,00	3,70	628,70
4	Kutai Timur	4.928,44	954,67	529,36	843,55	36,48	-	1.431,71
5	Berau	16.954,20	1.262,30	1.647,50	337,90	22,04	-	192,78

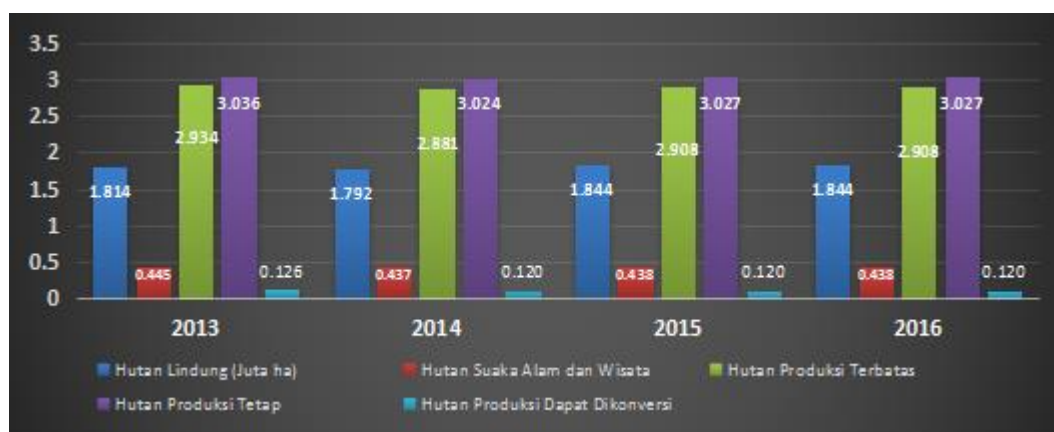
6	Penajam Paser Utara	5.981,20	-	3.683,57	214,32	6,23	-	37,00
7	Balikpapan	3.831,08	-	107,95	299,91	-	-	15,84
8	Samarinda	12,15	6.601,00	-	784,00	142,00	-	-
9	Bontang	20.773,59	-	14,50	33,30	17,20	-	6.325,60
10	Mahakam Hulu	-	132,00	-	34,40	-	-	-
Total	2017	113.975,51	44.123,17	60.368,18	55.490,10	43.294,75	3,70	9.031,63
	2016	101.718,20	41.462,30	55.578,90	2.859,90	35.503,10	1,50	5.521,60
	2015	104.622,30	40.557,90	38.165,50	2.694,20	32.784,10	429,40	20.492,40
	2014	96.850,50	96.850,50	96.850,50	96.850,50	96.850,50	11,70	168,80
	2013	94.679,00	94.679,00	94.679,00	94.679,00	94.679,00	11,00	230,10

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS)

2.1.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Menurut SK Nomor 178/Menhut-II/2014 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan, luas hutan di Provinsi Kaltim terdiri dari hutan lindung sekitar 1.792.031 hektar, hutan suaka alam dan wisata 437.879 hektar, hutan produksi terbatas 2.881.569 hektare, dan hutan produksi tetap 3.024.567 hektar, sehingga total luas kawasan hutan di Kalimantan Timur mencapai 8.562.287 hektar.

Sedangkan kondisi deforestasi dan degradasi lahan hutan di Kaltim diindikasikan oleh sebaran luasan lahan kritis yang relatif luas. Berdasarkan ilustrasi data dan informasi yang diolah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, luasan lahan kritis di Kaltim mencapai sekitar 7.759.369 hektar.



Gambar 2.12. Luas Hutan Menurut Tata Guna Kesepakatan Provinsi Kalimantan Timur (juta ha) Tahun 2013-2016

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS)

Untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai hutan yang dapat berguna bagi kehidupan masyarakat, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan program reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan dengan menanam pohon untuk yang terbagi dalam beberapa kegiatan, sebagai berikut:

Tabel 2.12. Jumlah Pohon Direboisasi dan Direhabilitasi Diwilayah Hutan Kalimantan Timur 2013-2016

Kegiatan	TAHUN			
	2013	2014	2015	2016
Penanaman dan Perkayaan	2.149.951	30.711.171	101.884	2.837.170
Hutan Tanaman Industri	27.826.060	36.068.559	43.121.995	40.430.811
Reboisasi	10.543.937	24.265.715	11.307.444	17.595.114
Penghijauan	61.250	608.800	1.210.760	4.400
Jumlah	40.581.198	91.654.245	55.742.083	60.869.495

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kaltim dan Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS)

2.1.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 perkara pidana tercatat 9.210 perkara biasa dan 5.548 merupakan kasus kriminal. Jumlah Perkara yang masuk ke Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 tercatat 2.172 yang terdiri dari 111 sisa perkara tahun 2016 dan 2.052 perkara baru yang masuk pada tahun 2017.

Kasus kejahatan yang dilaporkan kepada jajaran Polisi Daerah Kalimantan Timur dari seluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2016 tercatat sebanyak 5.546 kasus yang dilaporkan, 348 diantaranya dapat diselesaikan. Jenis kriminalitas berupa tindak pidana perkosaan sebanyak 56 kasus, kejahatan terhadap jiwa/pembunuhan sebanyak 33 kasus, penganiayaan berat sebanyak 821 kasus, narkoba sebanyak 2.438 kasus, pencurian sebanyak 1.821 kasus, dan penipuan sebanyak 370 kasus.



Gambar 2.13. Jumlah Kriminalitas dan Penyelesaian Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2016

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS)

Setiap pelaku tindak pidana diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya dengan memperhatikan hak-hak tahanan yang tidak boleh melebihi masa penahanan. Dalam prakteknya di Provinsi Kalimantan Timur, belum ada laporan yang berarti mengenai pelanggaran hal tersebut di berbagai instansi penegak hukum. Adapun jumlah rumah tahanan maupun penjara di Provinsi Kalimantan Timur berdasar data BPS Tahun 2016, sebagaimana terlihat dalam gambar dibawah ini.

Tabel 2.13 Jumlah Tahanan Menurut Jenis Kelamin Pada Kepolisian Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Katagori	Laki-laki	Perempuan
Dewasa	15.117	1.140
Anak-anak	42	0

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS)

Tabel 2.14 Kapasitas Lembaga Pemsarakatan/Rutan, Jumlah Tahan Menurut Lapas dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

No.	Lapas/Rutan	Kapasitas (orang)	Narapidana (orang)		Tahanan (orang)		
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	Lapas Samarinda	217	824	66	7	-	
2	Lapas Narkotika	352	1.193	156	-	-	
3	Lapas Balikpapan	235	853	-	8	-	
4	Lapas Tenggarong	350	1.041	74	228	13	
5	Lapas Bontang	376	796	52	46	6	
6	Rutan Samarinda	442	428	35	926	65	
7	Rutan Balikpapan	186	230	54	590	55	
8	Rutan Tanah Grogot	160	222	5	259	10	
9	Rutan Tj. Redeb	195	531	56	161	11	
Total		2017	2.513	6.118	498	2.225	160
		2016	2.513	4.408	364	2.467	160
		2015	2.683	3.584	254	1.788	128
		2014	2.420	3.181	244	1.332	75
		2013	3.168	3.427	252	1.370	112

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS)

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 sebanyak 11.556 orang dan tenaga honor sebanyak 4.777 orang.

Tabel 2.15. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan Tetinggi yang Ditamatkan Jenis Kelamin di Pemerintahan Kalimantan Timur Tahun 2017

Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Sampai dg SD	139	31
SMP/ sederajat	204	53
SMA/ sederajat	1.697	783
Diploma I	23	20
Diploma II	20	16
Diploma III	423	663
Diploma IV	191	161
S1	2.970	3.038
S2	699	421
S3	12	2
Jumlah	6.378	5.188

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 (BPS)

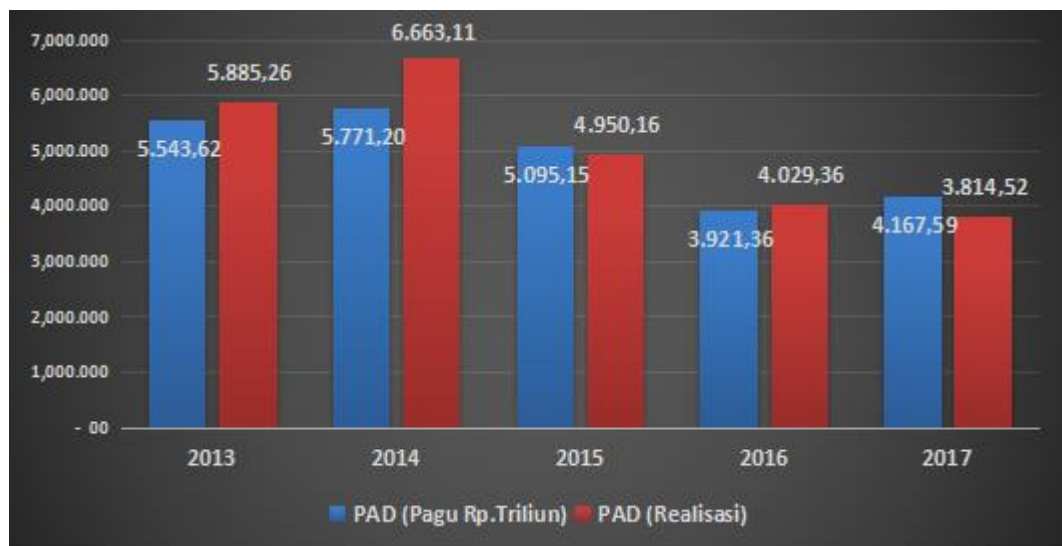
Dari sekian banyak pegawai negeri di Kalimantan Timur terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 136 orang, pegawai II sebanyak 2.005 orang,

pegawai golongan III sebanyak 6.691 orang dan pegawai golongan IV sebanyak 2.634 orang.

Sementara jumlah pegawai menurut eselon yaitu eselon I sebanyak 1 orang, eselon II sebanyak 54 orang, eselon III sebanyak 239 orang, eselon IV sebanyak 712 orang dan non eselon sebanyak 10.560 orang.

2.1.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013-2017 sangat berfluktuasi, terutama peningkatan PAD terbesar pada tahun 13% atau terjadi peningkatan sebesar Rp.77.785 juta, sedangkan pada tahun selanjutnya mengalami pertumbuhan yang negatif. Selanjutnya perimbangan sejak tahun 2013-2016 mengalami palambatan pertumbuhan sementara yang mengalami pertumbuhan positif hanya pada tahun 2017 sebesar 5,55%. untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah pada tahun 2015 mengali pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 31,72% seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 2.14. Perkembangan PAD dan Realisasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 diolah Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018

Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. Perkembangan jumlah investor di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan hasil dari adanya kerjasama pemerintah swasta dan masyarakat, di mana selama periode 2013–2017 cenderung berfluktuatif baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.16 Pada tahun 2013 jumlah proyek berasal dari investor PMDN sebanyak 103 proyek meningkat menjadi 357 proyek pada tahun 2017 atau tumbuh rata-rata per tahun sebesar 49,32% per tahun. Nilai investasi PMDN Rp. 18.441,38 Milyar, pada tahun 2013 menjadi Rp.10.980,22 milyar tahun 2017. bila dilihat dari perkembangan jumlah proyek investor yang masuk di Provinsi Kalimantan Timur selalu meningkat setiap tahun berbanding terbalik terhadap nilai investasinya yang cenderung menurun, akan tetapi mengalami kenaikan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah investasi PMDN di Kalimantan Timur sangat berfluktuasi. Perkembangan investasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.16. Jumlah Investor PMDN dan PMA
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2017**

Uraian	Perlembangan				
	2013	2014	2015	2016	2017
PMDN - proyek (unit)	103	60	143	243	357
Nilai (Rp. Milyar)	18.411,38	12.983,05	9.611,31	6.885,12	10.980,22
Penyerapan TK	53.482	4.828	5.936	33.249	9.236
PMA - proyek (unit)	351	297	420	471	566
Nilai (US\$. juta)	1.385,41	2.145,67	2.381,44	1.181,86	1.285,22
Penyerapan TK	561	110	442	350	153

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2018 diolah Bappeda Prov. Kaltim Tahun 2018

Demikian pula dengan jumlah investasi PMA di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2013 sebanyak 351 proyek dan meningkat menjadi 566 proyek pada tahun 2017 atau naik 12,25%/tahun. Sedangkan nilai investasi PMA pada tahun 2013 sebanyak 1.385,41 juta dolar AS dan menurun menjadi 1.285,22 juta dolar AS pada tahun 2017 atau rata-rata tumbuh per tahun -1,45%/tahun atau mengalami pertumbuhan yang negatif. Berdasarkan data tersebut dapat diartikan bahwa skala investasi PMA

mengalami sedikit penurunan, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan nilai proyek lebih rendah dari pertumbuhan jumlah proyek.

2.2. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

2.2.1. Permasalahan dan Tantangan Pilar Sosial

Permasalahan kemiskinan adalah: (1) Kecenderungan peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) saat terdapat 26 jenis di Kalimantan Timur; (2) Belum fokus dan lokus serta terintegrasinya penanggulangan kemiskinan sehingga terjadi ketimpangan angka kemiskinan; (3) Belum optimalnya penanggulangan bencana alam dan bencana sosial; dan (4) Belum optimalnya pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), seperti optimalisasi penerimaan dan pemanfaatan dana umat dalam peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan RT miskin.

Permasalahan dalam penanganan kelaparan, ketahanan pangan dan produksi pertanian berkelanjutan adalah: (1) Tingginya penurunan rasio produksi pangan terhadap kebutuhan selama periode tahun 2013-2017, seperti beras turun sebesar 4,47% per tahun. Penurunan rasio produksi ini terutama disebabkan oleh laju peningkatan luas panen pada komoditas tidak sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk; (2) Sumber produksi dan distribusi pangan belum diatur secara baik sehingga akses produksi dan konsumsi belum terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) Tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah; (4) Penganekaragaman/diversifikasi pangan masih terbatas; dan (5) Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan.

Permasalahan pangan untuk subsektor tanaman pangan dan hortikultura adalah: (1) Tingginya laju penurunan luas panen; (2) Lambatnya perkembangan teknologi pada komoditas padi dan palawija tercermin dari rendahnya produktivitas komoditas tersebut; Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan; (4) Tingginya ketergantungan komoditas pangan dan palawija pada daerah lain; (5) Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian; (6) Rusaknya infrastruktur jalan, kesuburan lahan dan irigasi di daerah sentra produksi; (7) Tingginya konversi lahan pertanian ke sektor lainnya; (8) Rendahnya

perlindungan terhadap petani produsen; (9) Terbatasnya rumah potong hewan (RPH) modern yang berstandar SNI.

Permasalahan pangan pada subsektor perikanan adalah: (1) Rendahnya produktivitas perikanan dari wilayah Kabupaten/Kota yang memiliki perikanan laut dan umum; (2) Kurangnya sarana dan prasarana bagi usaha perikanan laut dan perairan umum; (3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan; (3) Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi terutama pada perikanan jenis tambak; (4) tingginya biaya logistik penangkapan perikanan laut dan perairan umum akibat rendah pemanfaatan teknologi penangkapan; (5) Distribusi dan kapasitas kelembagaan pemasaran yang rendah; dan (6) Belum berkembangnya industri pengolahan ikan berskala sedang dan besar akibat keterbatasan infrastruktur.

Permasalahan pangan sektor industri pengolahan pangan adalah: (1) Rendahnya kapasitas industri pengolahan akibat terbatasnya industri pendukung produksi dan operasional (2) Masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan; (3) Rendahnya nilai tambah produk industri; (4). Kurangnya jenis industri pengolahan yang berkembang di Kalimantan Timur; (5) Jumlah dan kualitas SDM industri pengolahan yang masih rendah; (6) Inovasi produk masih rendah terutama pada produk akhir; (7) Penguasaan teknologi dalam industri pendukung produksi dan operasional yang masih rendah; dan (8) Ketergantungan bahan pendukung produksi dalam industri pengolahan; (9) infrastruktur dasar pendukung industri pengolahan yang belum memadai dalam percepatan pembangunan industri pengolahan dan industri pendukungnya baik produksi dan operasional; (10) belum beroperasinya kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri; (10) Rendah kontribusi industri kecil dan menengah akibat pembinaan dan pengembangan usaha yang terbatas; (11) Rendahnya kualitas SDM IKM dalam perencanaan dan pengembangan usaha; (12) belum adanya target pengembangan yang jelas untuk peningkatan skala usaha IKM.

Permasalahan bidang kesehatan adalah: (1) Masih timpangnya angka harapan hidup (AHH) antara wilayah, dimana pada tahun 2016 terdapat 7 kabupaten yang AHH yang lebih rendah dari rata-rata AHH provinsi Kalimantan Timur sebesar 73,68 tahun, dan AHH terendah terdapat di Kabupaten Penajam Paser Utara yaitu 70,80

tahun. Rendahnya AHH tersebut akibat aksesibilitas pelayanan kesehatan yang masih rendah terutama bagi kelompok penduduk miskin, dimana Kabupaten PPU memiliki tingkat kemiskinan kategori di Kalimantan Timur sebesar 7,63%, hal ini menunjukkan adanya korelasi antara tingkat kemiskinan dengan pelayanan akses kesehatan yang masih rendah sehingga berakibat pada rendah AHH tersebut;(2) Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan belum sesuai dengan kebutuhan penduduk; (3) Sistem kesehatan belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat; (4) Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan yang berorientasi promotif dan preventif masih rendah; (6) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat belum optimal.

Permasalahan bidang pendidikan di provinsi Kalimantan Timur adalah masih terdapat 0,51% penduduk yang berumur 7-12 tahun (SD) yang belum dan atau tidak bersekolah, penduduk umur 13-15 tahun (SMP) 0,68% yang belum dan atau tidak bersekolah, penduduk umur 16-18 tahun (SMA) 0,28% belum dan atau tidak bersekolah. Sehingga kondisi ini menyebabkan APM SD/MI yang masih kurang dari 100% dan hanya 97,13%. Sementara APM-SMP/MTs baru mencapai 79,20% dan APM-SMA/MA sebesar 67,92%. Rata-rata lama sekolah, dimana pada tahun 2017 sudah mencapai 9,36 tahun. Beberapa kabupaten dengan rata-rata lama sekolah belum mencapai rata-rata 9 tahun adalah di Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau, Penajam Paser Utara dan Mahakam Hulu. Sementara Kabupaten Kutai Timur, Kota Samarinda, Balikpapan dan Bontang sudah melampaui target rata-rata lama sekolah.

Permasalahan kesetaraan gender adalah: Rendahnya partisipasi dan akses perempuan dalam pembangunan, serta masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi dan profesional.

2.2.2. Permasalahan dan Tantangan Pilar Ekonomi

Di dalam menjamin akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua permasalahan utama adalah: (1) Belum optimalnya cakupan pelayanan energi listrik; (2) Belum optimalnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan; (3) Belum optimalnya konservasi energi dan sumber daya mineral serta pendaungannya.

Di dalam mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh,

serta pekerjaan yang layak bagi semua, permasalahan utamanya adalah (1) rendahnya nilai tambah produksi sektor pertanian; (2) belum berkembangnya industri pengolahan; (3) rendahnya serapan tenaga kerja dari sektor perekonomian *non-tradable*; (4) terjadinya peningkatan angka kemiskinan; (5) kualitas tenaga kerja masih rendah. (6) belum sinkronnya penyediaan tenaga kerja oleh lembaga pendidikan dengan dunia usaha; (7) daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; dan (8) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk; (9) meningkatnya angka pengangguran terbuka, (10) terbatasnya sarana dan prasarana untuk memfasilitasi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

Di dalam membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) belum optimalnya pelabuhan yang ada dalam melayani pergerakan orang dan barang antar pulau, meskipun Kalimantan Timur; (4) rendahnya kapasitas industri pengolahan akibat terbatasnya industri pendukung produksi dan operasional; (5) masih rendahnya pertumbuhan industri pengolahan; (6) rendahnya nilai tambah produk industri; (7). kurang jenis industri pengolahan yang berkembang; (8) Inovasi produk masih rendah terutama pada produk akhir; (9) Ketergantungan bahan pendukung produksi dalam industri pengolahan; (10) infrastruktur dasar pendukung industri pengolahan yang belum memadai dalam percepatan pembangunan industri pengolahan dan industri pendukungnya baik produksi dan operasional; (11) belum beroperasinya kawasan industri yang dibangun oleh pemerintah sebagai wilayah pusat pertumbuhan industri; (12) rendah kontribusi industri kecil dan menengah akibat pembinaan dan pengembangan usaha yang terbatas; (13) belum adanya target pengembangan yang jelas untuk peningkatan skala usaha IKM; (14) bencana kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman (15) tingginya emisi gas rumah kaca dan rendahnya pemahaman tentang perubahan iklim; (16) rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (17) Belum dimanfaatkan sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya.

Di dalam mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara, permasalahan utamanya adalah: (1) tingginya ketimpangan kesejahteraan antara petani sawit dengan sektor pertanian lainnya, (2) tingginya ketimpangan produktivitas antar wilayah; sehingga berakibat kontribusi antara wilayah terhadap PDRB tanpa migas yang tidak merata; (3) tingginya tingkat ketimpangan kesejahteraan antara penduduk perkotaan dan pedesaan.

Dalam kerjasama publikasi ini masih terdapat beberapa masalah terkait dengan data yang disajikan antara data provinsi Kalimantan Timur dengan data Kabupaten Kota. Apabila dijumlahkan atau dikompilasi antara data Kabupaten Kota tidak sama jumlahnya dengan data provinsi. Hal ini dapat disebabkan karena data provinsi lebih dahulu dipublikasikan sehingga data kabupaten kota yang termasuk dalam data provinsi belum sepenuhnya merupakan akumulasi data akhir tahun. Sementara data kabupaten kota sudah merupakan data akhir tahun. Maka ketika dijumlahkan antara data kabupaten kota se Kalimantan Timur lebih besar nilainya dibandingkan data Kalimantan Timur dalam Angka yang dipublikasikan. Sisi lain format penyusunan data antara kabupaten Kota tidak seragam.

2.2.3. Permasalahan dan Tantangan Pilar Lingkungan

Secara umum permasalahan lingkungan di Propinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Daerah Aliran Sungai Mahakam merupakan salah satu kawasan di Kalimantan Timur yang memiliki luas 8,2 juta hektar atau sekitar 41% dari luas wilayah Provinsi Kaltim terdapat 27 Sub DAS di DAS Mahakam.
2. Permasalahan pengelolaan ekosistem DAS dimaksud telah menjadi perhatian serius semua pihak. Pada satu dekade terakhir ini, terjadi penurunan kondisi hidrologi beberapa DAS di Kaltim akibat adanya degradasi lingkungan seperti tingginya tingkat kerusakan hutan dan lahan. Namun demikian pemecahannya sering bersifat sektoral dan lokal tanpa memandang DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem dari hulu hingga hilir.
3. Semakin seriusnya degradasi hutan dan lahan di Provinsi Kaltim, maka konservasi dan rehabilitasi kawasan tersebut harus segera dilakukan secara

integral dengan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian sumberdaya air baik yang ada di danau maupun air di DAS secara keseluruhan.

4. Upaya pengelolaan DAS yang berkelanjutan perlu dilakukan secara terpadu berdasarkan prinsip kelestarian sumberdaya yang menyiratkan keterpaduan antara prinsip produktifitas dan konservasi sumberdaya. Untuk memperoleh pengelolaan DAS yang optimal diperlukan persepsi dan komitmen dari berbagai pihak baik kalangan birokrat, teknokrat, pengusaha dan masyarakat. Keterpaduan dan harmonisasi program-program pada daerah hulu dan hilir DAS merupakan keharusan untuk dilakukan.
5. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah kabupaten/kota, SKPD, lembaga terkait maupun LSM pemerhati lingkungan untuk menjaga ekosistem yang ada serta menghindari terjadinya pencemaran di DAS Mahakam. Menyadari semakin parah kondisi sumberdaya hutan di daerah, tidak ada hal lain yang dapat diperbuat, kecuali dengan meningkatkan komitmen untuk melakukan usaha-usaha nyata di lapangan.
6. Pelestarian hutan Kaltim turut mempengaruhi pembangunan yang dilakukan pemerintah di daerah. Saat ini, kerusakan hutan banyak diakibatkan oleh kebakaran hutan, illegal logging, perambahan, pengelolaan hutan yang tidak lestari dan pengelolaan hutan yang tidak mengindahkan azas konservasi, sehingga tentunya sangat berdampak pada daerah aliran sungai.

Tantangannya adalah potensi wilayah pesisir dan laut cukup besar tetapi belum dimanfaatkan dan dikembangkan secara optimal dalam mengembangkan perekonomian wilayah terutama potensi perikanan, wisata, pertambangan, perhubungan dan jasa lingkungan.

2.2.4. Permasalahan dan Tantangan Hukum dan Tata Kelola

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan pada pilar 16 terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu dicermati sebagai berikut:

Masih tingginya gangguan ketertiban dan keamanan, dimana pada tahun 2016 terdapat 5.548 kasus dengan tujuh jenis kasus yang mengganggu ketentraman

dan ketertiban umum misalnya terkait dengan narkoba terdapat 2.438 kasus atau 43,94% dari tujuh kasus yang ada dan merupakan kasus terbanyak, yang diikuti oleh kasus lainnya. Permasalahan utamanya adalah: (1) Kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba masih rendah; (2) Terdapat potensi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Terkait penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, permasalahan utamanya adalah: (1) Masih rendahnya partisipasi perempuan pada pembangunan kualitas manusia (2) Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, ekonomi dan profesional.

Terkait penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, permasalahan utamanya adalah: (1) Tingginya laju rata-rata pertumbuhan penduduk akibat adanya migrasi dan kelahiran penduduk. (2) Administrasi penduduk yang belum optimal melalui e-KTP dan susahny akses data kependudukan, sehingga sulit melakukan estimasi yang akurat terhadap kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan rumah tangga lainnya; dan (3) Belum terigrasinya data kependudukan dengan data kemiskinan; (4) Pengendalian pertumbuhan penduduk belum optimal terutama terkait dengan migrasi.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan kelembagaan yang akuntabel, permasalahan utamanya adalah: (1) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga berakibat pada belum optimalnya tata kelola pemerintahan; dan (2) Penyebarluasan informasi terkait kebijakan pemerintah belum berjalan dengan optimal; (3). Sebagian besar sistem informasi (website) yang terdapat pada PD belum memuat data perkembangan kinerja sesuai dengan tupoksi PD tersebut, sehingga data terkait perkembangan kinerja pembangunan daerah sulit didapatkan dan berakibat pada lambatnya dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah; (4) Belum dimanfaatkannya sistem IT secara online dalam pembayaran pajak dan lainnya; (5). Belum ada data terkait dengan PD yang sudah melakukan pelayanan administrasi secara online yang dapat mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi bagi masyarakat.

Dalam penyelenggaraan urusan keuangan, permasalahan utamanya adalah: (1) Sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah belum dioptimalkan karena data potensi usaha yang menjadi objek pajak dan retribusi belum terdata dengan baik; (2) Tingginya ketergantungan daerah terhadap pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (3) belum adanya insentif daerah terkait dengan pemberian dana bagi daerah yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional; (4) belum optimalnya Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal) oleh daerah atau lembaga yang mendapatkan dana tersebut; (5) Rendahnya kemampuan daerah dalam mensinkronkan rencana pembangunan yang dapat menjadi potensi penerimaan daerah.

Dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian serta diklat, permasalahan utamanya adalah; (1) Masih terdapat 38,25% pegawai berpendidikan S1 kebawah; (2). Dari 36 indikator pendidikan dan pelatihan hanya terdapat satu indikator terkait dengan pelatihan dalam bidang perencanaan dasar tetapi belum terdapat pelatihan dalam perencanaan pembangunan yang *advance*. (3) Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan keahlian dan komptensinya sehingga pekerjaan belum dapat dilaksanakan secara maksimal; (4) Pelayanan yang prima dan handal kepada masyarakat pemerintah belum berjalan secara baik dan optimal.

Dalam penyelenggaraan urusan lainnya yang terkait dengan tata kelola pemerintahan, kemananan, HAM dan pelayanan publik, permasalahan utamanya adalah: (1) Penanganan wilayah perbatasan sebagai pusat pertumbuhan dan stabilitas pertahanan serta keamanan masih belum optimal; (2) Belum sinkronnya implementasi peraturan antara tingkat pusat dan daerah; (3) Penegakkan hukum masih lemah dan belum optimalnya perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM); (4) Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*; (5) Masih rendahnya kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur; (6) Distribusi dan penataan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi dan hasil analisis kebutuhan jabatan; (7) Pendataan aset yang belum terselesaikan dan adanya aset-aset yang belum

tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat; (8) Sumber pendapatan daerah dari BUMD masih terbatas; (9) Belum tuntasnya batas administrasi daerah; (10) Pelayanan publik masih belum sesuai harapan masyarakat; (11) Belum adanya Norma, Standar, Pedoman, Manual (NSPM) yang jelas terkait prosedur mengenai mekanisme penyusunan anggaran.

Terkait dengan penyelenggaraan urusan keamanan masyarakat, perlu dipertimbangkan keberadaan kota-kota dan wilayah strategis Provinsi Kalimantan Timur yang berada pada simpul persinggahan mobilitas antar bangsa dan suku mempunyai konsekuensi tumbuh dan berkembang menjadi kota multikultur. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur dan harus disikapi secara bijak dan hati-hati dengan mewujudkan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang harmonis dalam keragaman budaya, suku dan ras serta agama sehingga menjadikan kehidupan masyarakat Kalimantan Timur yang berkembang dan semakin modern. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan tatanan dengan penerapan budaya yang agamis ke dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Kalimantan Timur baik sosial dan ketertiban umum termasuk dalam pengembangan nilai budaya dari aspek

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun

a. Target dan Indikator Tujuan 1 TPB/SDGs

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 16 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana, memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan, dalam rangka menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Tabel 3.1. Target dan Indikator Tujuan 1 TPB/SDGs Prov. Kaltim

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	6% (2013)	6	5	Dinas Sosial

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi penduduk penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	100	100	100	Dinas Kesehatan
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	1.3.1.(d)	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat	21.082 (2015)	pm	pm	Dinas Kesehatan
1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pemah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	90,1	91	95	Dinas Kesehatan
	1.4.1.(b)	Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	88,55	90	95	Dinas Kesehatan
	1.4.1.(c)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	66,64 (2016)	71,05	pm	BKKBN
	1.4.1.(d)	1.4.1 (d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	35% (2013)	47	60	Dinas PU
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	76,76% (2016)	72,83	pm	Dinas PU
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	pm	pm	pm	Dinas PU
1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana	1.5.1.*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	na	na	na	BPBD
	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	na	na	na	BPBD
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	na	na	na	BPBD
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	na	na	na	BPBD
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus	na	na	na	Dinas Sosial

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs

Arah kebijakan untuk pilar sosial TPB/SDGs mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018, khususnya terkait dengan goal kemiskinan terdapat pada Misi Satu yaitu Menurunkan Kemiskinan. Untuk mencapai tujuan, target dan indikator TPB/SDGs di atas, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah kebijakan untuk tujuan tersebut adalah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap determinan kemiskinan dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan rumah tangga miskin; mengurangi beban biaya rumah tangga miskin; membangun infrastruktur dasar bagi rumah tangga miskin; mengendalikan inflasi dan meningkatkan daya beli rumah tangga miskin; memperluas

kesempatan kerja dan usaha rumah tangga miskin dan meningkatkan keahlian dan keterampilan tenaga kerja rumah tangga miskin.

c. Program Tujuan 1 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan
2. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
6. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan
7. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Penanggulangan Bencana
8. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
9. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
10. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
11. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
12. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
13. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan eks Trauma
14. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
15. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
16. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
17. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
18. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
19. Program 4 : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
20. Program Keluarga Berencana
21. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KPP
22. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah
23. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
24. Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas
25. Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
26. Program Penataan Administrasi Kependudukan
27. Program Pengembangan Ketenagalistrikan

28. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
29. Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
30. Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana
31. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
32. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Adapun program, kegiatan dan target kegiatan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran Matrik Tujuan 1 TPB/SDGs.

3.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik serta Meningkatkan Pertanian Yang Berkelanjutan

a. Target dan Indikator Tujuan 2 TPB/SDGs

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 14 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait.

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Tabel 3.2. Target dan Indikator Tujuan 2 TPB/SDGs Prov. Kaltim

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim	Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
			2017	2018	

2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	2.1.1*	Rasio Pemenuhan Pangan (beras) (RPJMD)	72% (2013)	75	85	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi	16,6 (2016)	16	15,5	Dinas Kesehatan
	2.1.2	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	pm	pm	pm	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
	2.1.2 (a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	19,16 (2016)	14,64	na	Dinas Pertanian Tanaman Pangan
2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)	27,1 (2016)	26	26	Dinas Kesehatan
	2.2.2	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas)	4,6 (2016)	4,5	4	Dinas Kesehatan
	2.2.2(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil (<8 ml/dl)	0,9 (2016)	0,8	0,7	Dinas Kesehatan
	2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	65,5 (2016)	70	75	Dinas Kesehatan
2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	118.241,50 (2016)	na	na	Dinas Tanaman Pangan
	2.3.1(a)	Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam	6% (2013)	9	10	Dinas Tanaman Pangan
	2.3.2(b)	Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu.	na	na	na	Dinas Tanaman Pangan
2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan	2.4.1(a)	Tersalurkannya saranan produksi pertanian, peternakan dan perikanan	na	na	na	Dinas Tanaman Pangan
2.5. Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragaman dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional. Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	2.5.1*	Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas	na	na	na	Dinas Tanaman Pangan, Dinas Peternakan
	2.5.1(b)	Berkembangnya program dan pembangunan di 1.000 Desa Mandiri Benih	na	na	na	Dinas Tanaman Pangan
	2.5.2*	Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.	na	na	na	Dinas Peternakan

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs goal menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah kebijakan sesuai dengan Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) Stabilisasi harga bahan pangan; (iii) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

c. Program Tujuan 2 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
2. Proram Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
3. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial untuk Mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
7. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
8. Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan
9. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
10. Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan
11. Program Perluasan Kebun Sawit
12. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit
13. Program pengembangan budidaya perikanan
14. Program pengembangan perikanan tangkap
15. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
16. Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan
17. Program pengembangan produk-produk perkebunan unggulan daerah
18. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan
19. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan
20. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan
21. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan
22. Program pengembangan budidaya perikanan
23. Program pengembangan perikanan tangkap
24. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
25. Program peningkatan produktivitas perkebunan
26. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan
27. Program perluasan kebun sawit
28. Program konservasi lahan dan air
29. Program Peningkatan Produksi Peternakan
30. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan
31. Program Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan
32. Program penyediaan bahan tanaman
33. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
34. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan

35. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
36. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
37. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
38. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Adapun program, kegiatan dan target kegiatan lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran Matrik Tujuan 2 TPB/SDGs.

3.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

a. Target dan Indikator Tujuan 3 TPB/SDGs

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 7 target yang diukur melalui 34 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengurangi angka kematian ibu; mengakhiri kematian bayi dan balita; mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan; mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular; memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat adiktif; menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi; mencapai cakupan kesehatan universal; mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia berbahaya; mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat; menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang terjangkau; meningkatkan pembiayaan kesehatan; dan meningkatkan pengadaan, pengembangan dan pelatihan tenaga kesehatan

Tabel 3.3. Target dan Indikator Tujuan 3 TPB/SDGs Prov. Kaltim

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	177 (2010)	177	160	Dinas Kesehatan
	3.1.2	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.1.2 (a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	31	30	29	Dinas Kesehatan

3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.				
	3.2.2(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	21	20	19	Dinas Kesehatan
	3.2.2(b)	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	80,8	85	90	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.3.1*	Persentase Jumlah kasus baru TB BTA+.	66,30	70	75	Dinas Kesehatan
	3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,183	< 1	< 1	Dinas Kesehatan
	3.3.2(a)	Persentase Keberhasilan Pengobatan TB.	84,07	85	90	Dinas Kesehatan
	3.3.3*	CFR (Case fatality rate) Malaria	0,35	0,30	0,25	Dinas Kesehatan
	3.3.3(a)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Malaria.	2	3	4	
	3.3.4*	Angka Penemuan Kasus Baru (Ncdr/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk	4,5	4	3,5	Dinas Kesehatan
	3.3.4(a)	Angka Prevalensi Kusta Per 10.000 Penduduk	0,7	0,6	0,5	Dinas Kesehatan
	3.3.5(b)	Angka kesakitan filariasis Per 100.000 Penduduk.	5	4,5	4	Dinas Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan	3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.4.1(d)	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara.	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.4.2*	Angka kematian dari percobaan bunuh diri.	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.4.2(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	pm	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	3.5.1(a)	Jumlah penyalahgunaan narkotika yang mengakses layanan rehabilitasi di fasilitas pelayanan kesehatan.	Orang	199	211
3.5.1(b)		Jumlah yang menyelesaikan program rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	Orang	71	106	BNN, RS Alma Husada

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim	Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana	
			2017	2018		
	3.5.1(c)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.	pm	4	2	BNN, RS Alma Husada
	3.5.1(d)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	Orang	80	102	BNN, RS Alma Husada
	3.5.1(e)	Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu	pm	-	pm	BNN
	3.5.1(f)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	pm	-	pm	BNN
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1	Proporsi pasangan usia subur (umur 15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern (Metneed KB/ Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	pm	pm	pm	DKP3A
	3.7.1(a)	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin.	62,24 (2016)	pm	pm	DKP3A
	3.7.2	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	pm	pm	pm	DKP3A
	3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR).	2,3 anak/wanita (SDKI 2012)	pm	pm	DKP3A
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	3.8.1(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	3,41 (2016)	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	2,7 jt orang (2016)	pm	pm	Dinas Kesehatan
	3.8.2(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	80	85	90	Dinas Kesehatan

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs

Untuk mewujudkan dan menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia pada goal ketiga TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan dengan Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat; Meningkatkan Kualitas SDM Kesehatan masyarakat; Meningkatkan pelayanan kesehatan yang mendukung terhadap pengembangan kepariwisataan (Puskesmas rawat inap dan Pustu); Membangun sarana dan prasarana kesehatan; Meningkatkan kualitas proses pelayanan kesehatan; Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya kesehatan; Menguatkan sistem dan data informasi Kesehatan.

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas; (ii) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat; (iii) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; (iv) Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan; (v)

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas; (vi) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas; (vii) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan; (viii) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan; (ix) Meningkatkan pengawasan obat dan makanan; dan (x) Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

c. Program Tujuan 3 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program pembinaan upaya kesehatan
2. Program obat dan perbekalan kesehatan
3. Program pengembangan lingkungan sehat
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
6. Program upaya kesehatan masyarakat
7. Program Rehabilitasi Sosial
8. Program Keluarga Berencana
9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
10. Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3
11. Program Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3
12. Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH

3.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

a. Target dan Indikator Tujuan 4 TPB/SDGs

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 8 target yang diukur melalui 17 indikator. Target-target tersebut terdiri dari memastikan bahwa semua

anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah; memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas; menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria terhadap pendidikan teknis kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau; peningkatan secara bermakna jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan; menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan; memastikan bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu mampu membaca dan menghitung; membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender; meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.

Tabel 3.4 Target dan Indikator Tujuan 4 TPB/SDGs Prov. Kaltim

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan SD-SMP tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	na	na	na	Dinas Pendidikan
	4.1.1(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	76,5% (2016)	79%	na	Dinas Pendidikan
	4.1.1(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	71,8% (2016)	74,8%	na	Dinas Pendidikan
	4.1.1(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	79,1% (2016)	80,9	na	Dinas Pendidikan
	4.1.1(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	113,77% (2013)	114	114,01	Dinas Pendidikan
	4.1.1(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	82% (2013)	99	99,01	Dinas Pendidikan
	4.1.1(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	90% (2013)	90	90,01	Dinas Pendidikan
	4.1.1(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	9,6 (2013)	11,5	12	Dinas Pendidikan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	49,77% (2013)	70	75	Dinas Pendidikan
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	90% (2013)	90	90,01	Dinas Pendidikan
	4.3.1(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	31,6 (2016)	28,87	na	Dinas Pendidikan

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	58,21% (2016)	na	na	Dinas Pendidikan
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan (4) Rasio APK perempuan/laki-laki di PT.	na	na	na	Dinas Pendidikan
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	95,38 (2016)	99,20	pm	Dinas Pendidikan
	4.6.1(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	99,67 (2016) dan 99,00 (2016)	pm	pm	Dinas Pendidikan
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	na	na	na	Dinas Pendidikan
4.c Pada tahun 2030, Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SMLB yang bersertifikat pendidik.	na	na	na	Dinas Pendidikan

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs

Dalam menjamin pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tujuan keempat TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan dengan: Meningkatkan Kuantitas SDM yang berkualitas; Meningkatkan Kualitas SDM pendidikan; Membangun sarana dan prasarana pendidikan; Meningkatkan kualitas proses pembelajaran; Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya pendidikan dan Memperkuat sistem dan data informasi pendidikan.

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun; (ii) Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas; (iii) Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; (iv) Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; (v) Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel; (vi) Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru; (vii) Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.

c. Program Tujuan 4 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Nilai Budaya
4. Program Pendidikan Luar Biasa
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

3.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

a. Target dan Indikator Tujuan 5 TPB/SDGs

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 6 target yang diukur melalui 15 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan; menghapus praktik berbahaya; menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan; serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi.

Tabel 3.5 Target dan Indikator Tujuan 5 TPB/SDGs Prov. Kaltim

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	na	na	na	DKP3A
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	na	na	na	DKP3A

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
	5.2.1 (a)	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan.	499 kasus (2016)	655	-	DKP3A
	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	na	na	na	DKP3A
	5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	na	na	na	DKP3A
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	na	na	na	DKP3A
	5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	na	na	na	DKP3A
	5.3.1(b)	Angka kelahiran pada remaja perempuan umur 15-19 tahun per 1000 perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	na	na	na	DKP3A
	5.3.1(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	90% (2013)	90	90,01	Dinas Pendidikan
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat dan daerah (DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).	na	na	na	DKP3A
	5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	na	na	na	DKP3A
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	pm	pm	pm	DKP3A
	5.6.1(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	11,4 (SDKI 2012)	pm	pm	DKP3A
	5.6.1(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	98,60	99	99,8	DKP3A
	5.6.2	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.	na	na	na	DKP3A

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs

Dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan pada Goal ke lima TPB/SDGs maka telah ditetapkan arah kebijakan dengan: Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk peningkatan peran kaum perempuan dalam pembangunan seperti keikutsertaan kaum perempuan dalam berpolitik, pendidikan dan pekerjaan.

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan; (ii) Menekankan peran perempuan di bidang politik; dan (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).

c. Program Tujuan 5 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3. Program Keluarga Berencana

3.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

a. Target dan Indikator Tujuan 6 TPB/SDGs

Isu utama dalam Tujuan 6 adalah akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Sumber daya air diarahkan untuk pemenuhan air minum dan sanitasi maupun irigasi, guna menunjang ketahanan air dan pangan. Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar saat ini belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Persentase rumah tangga dengan akses air minum dan sanitasi layak telah menunjukkan peningkatan, meskipun belum signifikan. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan akses dan sanitasi layak bahkan aman di masa mendatang.

Tabel 3.6. Target dan indikator Tujuan 6 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	35% (2013)	47	60	Dinas PUPR
	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	78,93% (2016)			Dinas PUPR
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	75 Lt/detik (2016)	75	700	Dinas PUPR
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	65,85 (2016)	na	na	Dinas PUPR
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	na	na	na	Dinas PUPR

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim	Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana	
			2017	2018		
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	76,76% (2016)	78	85	Dinas PU, Dinas Kesehatan
	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	na	60,84	na	Dinas PUPR
	6.2.1.(d)	Jumlah kota/kab yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	na	na	na	Dinas PUPR
6.3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	na	na	na	Dinas PUPR
	6.3.1.(a)	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	na	na	na	Dinas PUPR
	6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.	na	na	na	Dinas PUPR
	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	na	na	na	Dinas PUPR
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	na	na	na	Dinas PUPR
6.4. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	na	na	na	Dinas LH
	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	na	na	na	Dinas LH
6.5. Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1.(b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan <i>updating</i> dan revitalisasi.	na	na	na	Dinas PUPR
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	na	na	na	Dinas PUPR
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai (WS) yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	na	na	na	Dinas LH
6.6. Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	na	na	na	Dinas LH

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; (ii) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; (iii) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat; (iv) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif.

c. Program Tujuan 6 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
3. Program peningkatan daya saing sektor sumber daya air
4. Program Pengembangan Air Tanah
5. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
7. Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
9. Program Pemantauan Lingkungan
10. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
11. Program konservasi lahan dan air
12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

13. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II
14. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III
15. Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim
16. Program Pengendalian Banjir
17. Program Pengelolaan DAS dan RHL

3.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua

Energi dan listrik menjadi kebutuhan mendasar yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga strategi penyediaan serta distribusinya menjadi penting. Kebutuhan energi dan listrik akan terus meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, dan sumber energi dan listrik yang digunakan jumlahnya terbatas sehingga perlu dicari dan mulai digunakan alternatif yang lebih berkelanjutan.

a. Target dan Indikator Tujuan 7 TPB/SDGs

Dalam pelaksanaan TPB/SDGs, energi dirumuskan di dalam Tujuan 7 yang bertujuan untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini diterjemahkan ke dalam 2 (dua) indikator terkait listrik yaitu rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita.

Tabel 3.7. Target dan indikator Tujuan 7 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	7.1.1	Rasio ketersediaan daya listrik (RPJMD)	65,05% (2013)	78	80	Dinas Energi dan Sumber Daya Alam
	7.1.2.(b)	Jumlah instalasi biogas (RPJMD)	125 buah (2013)	530	675	Dinas Energi dan Sumber Daya Alam
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global	7.2.1	Bauran energi terbarukan	0,02% (2013)	2,12	3	Dinas Energi dan Sumber Daya Alam
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energy di	7.3.1	Intensitas energi primer	na	na	na	Dinas Energi dan

tingkat global sebanyak dua kali lipat.						Sumber Daya Alam
---	--	--	--	--	--	------------------

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs

Arah kebijakan umum yang terdapat pada RPJMD 2017-2018 adalah meningkatkan menyediakan energi listrik dan pemanfaatan pembangkit listrik serta membangun energi baru dan terbarukan.

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan produksi energi primer; (ii) Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi; (iii) Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam Bauran energi; (iv) Meningkatkan aksesibilitas energi; (v) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik; dan (vi) Memanfaatkan potensi sumber energi alternatif.

c. Program Tujuan 7 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Diversifikasi Energi
2. Program Pengembangan Ketenagalistrikan
3. Program Pengembangan Air Tanah

3.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pada jangka waktu 5 tahun terakhir ini, PDB per kapita di Kalimantan Timur naik setiap tahunnya berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi ini perlu terus diupayakan karena dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih

banyak. Salah satu upaya peningkatan kesempatan kerja adalah dengan memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang berkelanjutan, karena UMKM memiliki potensi kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk menjamin keberlanjutan UMKM, dibutuhkan akses terhadap pembiayaan serta perlindungan melalui regulasi.

a. Target dan Indikator Tujuan 8 TPB/SDGs

Tujuan 8 TPB/SDGs adalah mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua. Dalam rangka mencapai tujuan mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 7 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita; mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi; menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif; menciptakan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi; mendorong dan mencapai pekerjaan tetap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua; mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja; menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan; dan memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik.

Tabel 3.8. Target dan indikator Tujuan 8 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	8.1.1	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	-1,47% (2016)	na	na	Dinas Tenaga Kerja, BPS
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita	Rp.144.827.000 Per Jiwa (2015)	na	na	Dinas Tenaga Kerja, BPS
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang	8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3	na	na	na	Dinas Tenaga Kerja

bekerja dalam pekerjaan berbahaya.						
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	na	na	na	Dinas Pariwisata
	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	61.376 (2016)	63.654	na	Dinas Pariwisata
	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	5.030.586 (2016)	5.712.431	na	Dinas Pariwisata
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata	na	na	na	Dinas Pariwisata

B

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Pembangunan destinasi pariwisata diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdayasaing di dalam negeri dan di luar negeri; (ii) Pemasaran pariwisata nasional; (iii) Pembangunan industri pariwisata; (iv) Pembangunan kelembagaan pariwisata; (v) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; (vi) Memperbaiki iklim ketenagakerjaan dan menciptakan hubungan industrial.

c. Program Tujuan 8 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan
2. Program pengembangan pemasaran pariwisata

3.9. Membangun Infrastruktur, Meningkatkan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Tujuan 9 TPB/SDGs adalah membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Dengan memiliki infrastruktur yang cukup, industri akan berkembang pada berbagai wilayah, yang juga dapat menyerap tenaga kerja dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Kedua hal ini belum cukup jika tidak terus didukung oleh inovasi-inovasi yang mencari solusi yang berkelanjutan.

a. Target dan Indikator Tujuan 9 TPB/SDGs

Dalam rangka mencapai tujuan 9 ditetapkan 4 target yang diukur melalui 13 indikator. Target-target tersebut terdiri dari: mengembangkan infrastruktur yang berkualitas; mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan; dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi

Tabel 3.9. Target dan indikator Tujuan 9 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua	9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional	91,54% (2016)	80%	na	Dinas PU
	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol	99,35 Km	64,83	99,35	Dinas PU
	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api	na	na	na	Dinas PU
	9.1.2.(a)	Jumlah bandara	12	13	Dinas Perhubungan
	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan				Dinas Perhubungan
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis				Dinas Perhubungan
9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	21,35% (2-16)	na	na	Dinas Perindustrian
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	4,01% (2016)	4,74	na	Dinas Perindustrian
	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur	13,12 % (2016)	na	na	Dinas Perindustrian

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.	9.4.1	Rasio Emisi CO ₂ / Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri	na	na	na	Dinas Lingkungan Hidup
	9.4.1.(a)	Emisi Gas Rumah Kaca	1.584 Ton CO ₂ / PDRB US \$ juta (2013)	1.500	1.400	Dinas Lingkungan Hidup
9.C Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.C.1.(a)	Proporsi individu yang menggunakan telepon genggam	68,38% (usia 25-64)	na	na	Dinas Kominfo
	9.C.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet	90,91% (2016)	na	na	Dinas Kominfo

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; (ii) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; (iii) Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing sektor produksi; (iv) Peningkatan dukungan Iptek bagi keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; (v) Peningkatan agroindustri, perikanan, dan perkebunan; (vi) Revitalisasi sektor pertanian; (vii) Pemenuhan infrastruktur industri; (viii) Akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; serta (xiii) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi.

c. Program Tujuan 9 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Pembangunan Jalan Tol
2. Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara Dan ASDP
3. Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim

3.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Tujuan 10 dari TPB adalah mengurangi kesenjangan di dalam negara. Kesenjangan merupakan permasalahan global yang perlu ditangani dalam upaya menghapus kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Kesenjangan ini sendiri timbul dalam berbagai dimensi, sehingga pada Tujuan 10 ini tidak hanya menyentuh isu kesenjangan dalam bidang

ekonomi saja namun juga kesenjangan dalam arti luas yaitu kesenjangan non-ekonomi, kesenjangan kesempatan dan kesenjangan horizontal.

a. Target dan Indikator Tujuan 10 TPB/SDGs

Tujuan Pengurangan kesenjangan yang terdiri dari 3 target dan 12 indikator. Target-target tersebut bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi; memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua; Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan sosial, upah dan perlindungan sosial serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar; dan memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia.

Tabel 3.10. Target dan indikator Tujuan 10 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada dibawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1	Koefisien Gini	0,33 (2016)	0,33	pm	Bappeda
	10.1.1. (a)	Tingkat kemiskinan	6% (2016)	6	5,6	Dinas Sosial
	10.1.1. (b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan	na	na	na	DPMPD
	10.1.1. (c)	Jumlah Desa Tertinggal	192 (2016)	pm	pm	DPMPD
	10.1.1. (d)	Jumlah Desa Mandiri	21 (2015)	pm	pm	DPMPD
	10.1.1. (e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	pm	pm	pm	DPMPD
	10.1.1. (f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	pm	pm	pm	Dinas Sosial
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1. (a)	Indeks Kebebasan Sipil	na	na	na	Bappeda, KEmenkum HAM
	10.3.1. (b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	na	na	na	Bappeda, KEmenkum HAM
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.3.1. (c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	na	na	na	Bappeda, KEmenkum HAM
	10.3.1. (d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	na	na	na	Bappeda, KEmenkum HAM
	10.4.1. (a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah daerah	6,48% (2016)	8,57%	pm	Bappeda

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs goal mengurangi kesenjangan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Menciptakan pertumbuhan inklusif; (ii) Memperbesar investasi padat kerja; (iii) Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro; (iv) Menjamin perlindungan sosial bagi pekerja informal; (v) Meningkatkan

dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu; (vi) Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian; dan (vii) Menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi.

c. Program Tujuan 10 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan
2. Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial
3. Program pencegahan dan pemberantasan KKN

3.11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan

Isu utama dalam Tujuan 11 adalah pembangunan kota yang terpadu; infrastruktur dan pelayanan perkotaan; pengurangan risiko bencana; dan perubahan iklim di perkotaan. Perlu mengembangkan kota dan permukiman yang berkelanjutan dalam mengatasi fenomena tersebut.

a. Target dan Indikator Tujuan 11 TPB/SDGs

Tujuan 11 kota dan pemukiman berkelanjutan terdiri atas 7 target yang dijabarkan dalam 20 indikator. Target dan indikator TPB Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.11. Target dan indikator Tujuan 11 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim	Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana	
			2017	2018		
11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.	2.573 (2016)	pm	pm	Dinas PUPERA
	11.1.1. (a)	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	na	15.692	pm	Dinas PUPERA
	11.1.1. (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	na	na	na	Dinas PUPERA
	11.1.1. (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	na	na	na	Dinas PUPERA

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1. (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.				Dinas Perhubungan
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.	na	na	na	BPN
	11.3.2. (a)	Jumlah institusi (swasta, ormas, organisasi profesi) yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	na	na	na	Bappeda dan PUPERA
	11.3.2. (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur perkotaan.	na	na	na	PUPERA
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	na	na	na	BPBD
	11.5.1. (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	147 (2013)	na	na	BPBD
	11.5.1. (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.				
	11.5.1. (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	na	na	na	BPBD
	11.5.2. (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	na	na	na	BPBD
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota	11.6.1. (a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	na	87,96	na	DLH dan PUPR
	11.6.1. (b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green di kawasan perkotaan metropolitan.	na	na	na	DLH, PUPR
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	11.7.1. (a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	na	na	na	DLH dan PUPR
	11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).	na	na	na	Polda
	11.7.2. (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	na	na	na	Polda
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	na	na	na	BPBD
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	na	na	na	BPBD

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan tujuan TPB/SDGs tujuan pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim diperkotaan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah:

Percepatan Pemenuhan pemerataan dan pengembangan wilayah dengan prototype kawasan berkembang sekitarnya.

c. Program Tujuan 11 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman
2. Program pembangunan jalan dan jembatan
3. Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan
4. Program pembangunan jalan tol
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
6. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pemerintah
7. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
8. Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha
9. Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana
10. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
11. Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana
12. Program Penanganan Kebakaran
13. Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana
14. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.12. Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati; mengurangi pencemaran bahan kimia dan lingkungan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan; mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali; mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka; menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki

informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.

a. Target dan Indikator Tujuan 12 TPB/SDGs

Tujuan 12 Pola Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab dan berkelanjutan terdiri atas 4 target yang dijabarkan dalam 6 indikator. Target dan indikator TPB Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.12. Target dan indikator Tujuan 12 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.	12.4.1. (a)	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU.	na	na	na	DLH
	12.4.2. (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	na	na	na	DLH
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1. (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	na	0,25%	na	DLH
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.	12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	na	na	na	DLH dan ESDM
	12.6.1. (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	na	na	na	DLH dan ESDM
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.	na	na	na	Dinas Pendidikan

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan, maka pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup kualitas yaitu: meningkatkan koordinasi, membina dan mengawasi pelaku usaha agar menurunkan beban pencemaran air, udara dan tanah; melaksanakan inventarisasi lingkungan hidup dan wilayah ekoregion; dan menyusun RPPLH dan Status Lingkungan Hidup Daerah.

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah Penerapan pola produksi dan konsumsi menuju kemandirian pangan berkelanjutan.

c. Program Tujuan 12 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

3.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Isu utama dalam Tujuan 13 adalah pengurangan risiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Provinsi Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang tinggi, terutama bencana terkait iklim atau hidrometeorologi, seperti kebakaran lahan gambut. Oleh karena itu, upaya adaptasi dan mitigasi terhadap bencana, termasuk perubahan iklim diperlukan untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko atau bahaya yang ditimbulkannya.

a. Target dan Indikator Tujuan 13 TPB/SDGs

Tujuan 13 TPB/SDGs adalah pengurangan risiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Tabel 3.13. Target dan indikator Tujuan 13 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim	Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana	
			2017	2018		
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	na	na	BPBD	
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	a.Meninggal: 4 ((2013)) b.Menderita 46,900 ((2013)) Bappenas: a.Meninggal: 4 (2015) b.Luka/Sakit: 1 (2015) c.Hilang: 0 (2015)	na	na	BPBD
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.	13.2.1. (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	1 profil	na	na	DLH dan Bappeda

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs

Dalam mewujudkan TPB/SDGs tujuan pengurangan resiko bencana, pengurangan korban akibat bencana serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan arah kebijakan upaya mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya telah dilakukan dengan menjalankan berbagai program.

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Mengurangi resiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana; (ii) Mengembangkan pembangunan rendah karbon dan adaptasi perubahan iklim; (iii) Meningkatkan akurasi dan kecepatan analisis serta penyampaian informasi peringatan dini (iklim dan bencana); (iv) Menyediakan dan meningkatkan kualitas data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang

berkesinambungan; dan (v) Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (MKG) yang mudah diakses dan berkesinambungan; (vi) Meningkatkan luas tutupan lahan dan penerapan konsep strategi pembangunan hijau yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

c. Program Tujuan 13 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana
3. Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim

3.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Kelautan

Isu utama dalam Tujuan 14 adalah tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman dan pemberantasan *illegal fishing*, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil.

a. Target dan Indikator Tujuan 14 TPB/SDGs

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan dengan 4 target yang diukur melalui 5 indikator. Target-target tersebut terdiri dari : mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut; melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan; dan menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (*smallscale artisanal fishers*) terhadap sumber daya laut dan pasar.

Tabel 3.14. Target dan indikator Tujuan 14 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.2.1. (a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	1 Dok	1 Dok	1 Dok	DKP
	14.2.1. (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	2 WPP	pm	pm	DKP
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.	14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan.	1.704.666 (SK th.2014)	na	na	DKP
14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dgn mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif utk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada <i>the World Trade Organization</i> .	14.6.1. (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	na	na	na	DKP
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	na	na	na	DKP

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; (ii) Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan laut; (iii) Meningkatkan wawasan dan budaya bahari, serta penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan; dan (iv) Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

c. Program Tujuan 14 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Pengelolaan Ruang Laut
2. Program pengembangan perikanan tangkap
3. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

3.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosisten Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati. Dalam rangka mencapai tujuan tata kelola kehutanan, ditetapkan 4 target yang diukur melalui 6 indikator. Target-target tersebut terdiri dari menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan pengurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, dan mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.

a. Target dan Indikator Tujuan 15 TPB/SDG

Tujuan 15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan terdiri atas 4 target yang dijabarkan dalam 11 indikator. Target dan indikator TPB Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.15. Target dan indikator Tujuan 15 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan	(8.256.767/12.561.005) 65.73%	64.77	64.77	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Hutan Dinas Kehutanan

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
	15.1.1 (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	65.73%	64.77	64.77	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Hutan Dinas Kehutanan
	15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya	na	na	na	Bidang Perlindungan dan KSDAE berkoordinasi dengan TNK dan Tahura Dinas Kehutanan
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan				Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Hutan Dinas Kehutanan
	15.2.1 (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.				Bidang Perlindungan dan KSDAE berkoordinasi dengan TNK dan Tahura (Pelaksana BKSDA) Dinas Kehutanan
	15.2.1 (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	86.450	86.450	86.450	Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Hutan Dinas Kehutanan
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	na	na	na	Dinas Kehutanan
	15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	na	na	na	Bidang Perlindungan dan Pemanfaatan KSDAE berkoordinasi dengan TNK dan Tahura
	15.3.1 (c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.	na	na (Lokas)	na	Bidang Perlindungan dan Pemanfaatan KSDAE berkoordinasi dengan TNK dan Tahura
15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas.	2010 1. Orang Utan Lokas	189 Ekor		Bidang Perlindungan dan Pemanfaatan KSDAE berkoordinasi dengan TNK dan Tahura (KemenLH dan Dinas Kehutanan)
	15.2.1 (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	21 Lokas 1 CA Teluk Adang	21 Unit	21 Unit	

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan kapasitas pengelola hutan konservasi dalam melindungi, mengawetkan ekosistem hutan, sumber daya jenis, dan sumber daya genetik; (ii) Mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak; dan (iii) meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/hutan, yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat.

c. Program Tujuan 15 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program Pengelolaan DAS dan RHL
2. Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH

3.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama (*enabling*) dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 mengacu pada tiga isu utama yaitu adanya perdamaian (*peace*), terwujudnya penegakan keadilan (*justice*), serta keberadaan institusi yang tangguh (*strong institutions*).

a. Target dan Indikator Tujuan 16 TPB/SDGs

Tujuan 16 memiliki 10 target dan 31 indikator SDGs Kalimantan Timur yang ingin dicapai pada tahun 2030. Adapun target TPB tersebut adalah: mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun; menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak; menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional; menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua; mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya; mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat; menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan; memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran ; memastikan akses publik pada informasi; dan melindungi kebebasan fundamental yang sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Adapun indikator TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai tujuan dan target yang sudah ditetapkan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16. Target dan indikator Tujuan 16 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian terkait dimana pun.	16.1.1 (a)	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	285 (2013)	pm	pm	Polda, Kebangpol
	16.1.1 (b)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	na	na	na	Polda, Kebangpol
	16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir.	Perkotaan 0,07 dan Perdesaan 0,05 (2016)	na	na	Polda, Kebangpol
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	76,86% (2014)	na	na	Polda, Kebangpol
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penysiksaan terhadap anak.	16.2.1 a)	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Perkotaan 52,30 dan perdesaan 57,51 (2014)	na	na	DKP3A
	16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	499 (2016)	655	na	Polda, HAM dan DKP3A
	16.2.3(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Pria : 6,40 Wanita : 6,30 (2013)	na	na	Polda, HAM dan DKP3A
16.3 Menggalakkan (kedaulatan) aturan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	9,210 (2016)	na	na	Polda
	16.3.1(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	na	na	na	Kanwil Hukum dan HAM dan Biro Hukum
	16.3.1(c)	Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan; pembebasan biaya perkara; dan Pos Layanan Hukum.	na	na	na	Kanwil Hukum dan HAM, Biro Hukum dan Pengadilan Tinggi/Negeri
	16.3.2*	Proporsi tahanan terhadap seluruh jumlah tahanan dan narapidana.	na	16.622	na	Polda, Kejaksaan & Kanwil Hukum dan HAM
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.5.2(a)	Indeks Persepsi Korupsi (IPK).	5,66 (2016)	5,56	5,44	Seluruh OPD
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	na	na	na	BPKAD & Bappeda
	16.6.1(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	WTP	WTP	WTP	Seluruh OPD
	16.6.1(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	B (2016)	BB	na	Seluruh OPD

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim		Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana
				2017	2018	
	16.6.1(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	100%	100%	100%	Seluruh OPD
	16.6.1(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	na	100%	100%	Seluruh OPD
	16.6.2(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	100%	100%	100%	Seluruh OPD
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	6 orang perempuan dari 55 anggota DPRD (2016)	na	na	DKP3A dan Sekretarisat DPRD
	16.7.1(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	na	11	na	DKP3A dan BKD
	16.7.2(a)	Indeks Lembaga Demokrasi.	60,36 (2016)	68,72	na	Kesbangpol
	16.7.2(b)	Indeks Kebebasan Sipil.	78,25 (2016)	83,33	na	Kesbangpol
	16.7.2(c)	Indeks Hak-hak Politik.	78,35 (2016)	67,18	na	Kesbangpol
6.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil.	349.038 (2016)	349.543	na	DKP3A
	16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	na	na	na	DKP3A
	16.9.1(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	na	103,69	na	DKP3A
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.	16.10.2(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	47 OPD	100%	100%	Seluruh OPD
	16.10.2(b)	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.	na	100%	100%	Seluruh OPD
	16.10.2(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).	47 OPD	47	47	Seluruh OPD
16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.	16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.	na	na	na	Kanwil Hukum dan HAM
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	na	na	na	Kanwil Hukum dan HAM

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil; (ii) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik; (iii) Peningkatan kualitas pelayanan publik; (iv) Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; (v) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik

dan memanfaatkannya; (vi) Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

c. Program Tujuan 16 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup:

1. Program pencegahan dan pemberantasan KKN
2. Program pengembangan zona integritas
3. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4. Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan
5. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja
6. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
7. Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja
8. Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
9. Program pendidikan politik masyarakat

3.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Tujuan menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan dengan memfokuskan pada upaya untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target-target tersebut adalah memperkuat mobilisasi sumber daya domestik; meningkatkan kerjasama secara regional dan internasional; mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains; mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi; mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif; meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang; mengandalkan inisiatif yang sudah ada untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik.

a. Target dan Indikator Tujuan 17 TPB/SDGs

Tujuan 17 Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global terdiri atas 5 target yang dijabarkan dalam 10 indikator. Target dan indikator TPB Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

Tabel 3.17. Target dan indikator Tujuan 17 SDGs Provinsi Kalimantan Timur

Target TPB	Indikator TPB Provinsi Kaltim	Tahun Dasar	Tahun Pencapaian		Instansi Pelaksana	
			2017	2018		
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya.	na	na	na	Bapenda
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	na	na	na	Bapenda
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.				Bapenda
17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	na	na	na	Dsikomimfo
	17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	na	na	na	Dsikomimfo
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.	17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	na	27,66 %	10,14 %	Disperindagkop dan UMKM
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terlah berdasarkan pendapatan	17.18.1.(d)	Jumlah indikator SDGs terlah yang relevan dengan target	na	na	na	Bappeda
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(c)	Telaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020	na	na	na	BPS
	17.19.2.(d)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>)	na	na	na	BPS
	17.19.2.(e)	Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan Daerah.	na	na	na	BPS

b. Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs

Kebijakan RPJMD 2017-2018 yang sesuai adalah: (i) Peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat sasaran; (ii) Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan; (iii) Peningkatan investasi yang inklusif terutama dari investor domestik; (iv) Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi; (x) Reformasi penerimaan perpajakan yang komprehensif.

c. Program Tujuan 17 TPB/SDGs

Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs atas, program yang akan dilaksanakan oleh PD mencakup: tidak ada program yang terkait dengan tujuan 17 ini.

BAB. IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting untuk memastikan pencapaian TPB dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian TPB yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah hingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pelaksana TPB.

4.1. Landasan Hukum

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden tersebut di mana setiap Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional.

4.2. Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi program Pencapaian TPB pada dasarnya dilakukan oleh semua pelaku atau pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pemantauan dan Evaluasi pada lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Organisasi Perangkat Daerah (PD) terkait untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan dan program serta mengukur dampak kebijakan dan program Pencapaian Target TPB.

Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi pencapaian TPB Provinsi Kalimantan Timur pada prinsipnya harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan non-pemerintah. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasi oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 – 2018.

Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program pencapaian TPB adalah untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, atau untuk mengetahui tingkat kesenjangan antara keadaan yang telah dicapai dengan keadaan yang dikehendaki atau seharusnya dapat dicapai. Dengan demikian akan diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Disamping prinsip tersebut di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang antara lain :

1. Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/*stakeholders* yang berkepentingan terhadap pencapaian target TPB di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pencapaian target TPB di Provinsi Kalimantan Timur adalah pemantau bagi program yang terkait langsung dengan pelaksana program dan kegiatan dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masing- masing *stakeholders* baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pencapaian target TPB Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
3. Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB adalah seluruh sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang hasilnya dikaji

bersama sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan pencapaian TPB selanjutnya.

4. Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan, program dan kegiatan pencapaian TPB yang sedang berjalan.

4.3. Tujuan/Kegunaan Pemantauan Dan Evaluasi

Tujuan pemantauan dan evaluasi adalah untuk mengetahui kemajuan pencapaian target TPB dari waktu ke waktu. Pemantauan ditekankan pada pengukuran kemajuan pencapaian dan perubahan atas satuan setiap target dan indikator TPB, termasuk di dalamnya mengetahui prestasi dan kendala pencapaian target dan indikator tertentu. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan pada anggaran yang telah direalisasikan dalam APBN dan APBD. Hasil pemantauan dan evaluasi ini akan dipergunakan sebagai masukan untuk perbaikan perencanaan program dan kegiatan ke depan.

Ada dua kegunaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB yaitu:

1. Kegunaan terkait dengan operasional

Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target TPB yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program Pencapaian SDGs yang dilakukan, melakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program Pencapaian SDGs yang dilaksanakan, dan dapat mengembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan.

2. Kegunaan terkait dengan kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dirumuskan kembali strategi pencapaian target TPB, pendekatan dan asumsi-asumsi yang digunakan. Selain itu, untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar program dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi di masa mendatang.

4.4. Waktu Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan evaluasi percepatan pencapaian target TPB dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pemantauan pada saat program dan kegiatan berjalan, dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
2. Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun.
3. Evaluasi akhir (*summative evaluation*), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2018.

Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan.

4.5. Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi

4.5.1. Mekanisme Pemantauan RAD

Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59/2017. Sementara itu laporan pencapaian atas pelaksanaan target TPB Provinsi disampaikan oleh Gubernur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator Pelaksana TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2. Adapun alur pemantauan pelaksanaan TPB daerah adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB Provinsi Kalimantan Timur

4.5.1.1. Alur Laporan

a. Langkah 1

Setiap enam bulan sekali, Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Kalimantan Timur mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.

b. Langkah 2

Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur Kalimantan Timur oleh Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Kalimantan Timur.

c.Langkah 3

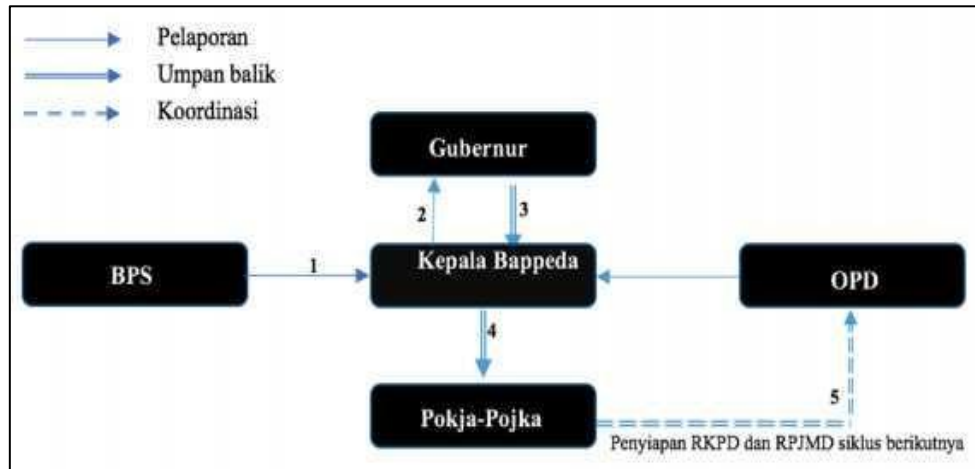
Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Provinsi.

4.5.1.2. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memudahhi proses perbaikan atau peningkatan kualitas pencapaian indikator TPB yang dilaporkan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana TPB nasional, Gubernur Kalimantan Timur memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran untuk mendapatkan kesepakatan dari DPRD dan kepada Bappeda sebagai arahan penyusunan program dan kegiatan periode berikutnya.

4.5.2. Mekanisme Evaluasi

Terdapat dua jenis evaluasi yaitu tahunan dan akhir periode. Kegiatan evaluasi tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Sedangkan evaluasi akhir periode dilaksanakan pada akhir periode RAD TPB yaitu tahun 2018. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB Provinsi Kalimantan Timur. Adapun mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada Provinsi Kalimantan Timur ada sebagai berikut:



Gambar 4.2 Mekanisme evaluasi RAD TPB Provinsi Kalimantan Timur

4.5.2.1. Alur laporan evaluasi.

a. Langkah 1

Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB utamanya datang dari BPS melalui berbagai survei yang mencakup Provinsi Kalimantan Timur. Di samping itu, laporan evaluasi diperoleh juga dari berbagai survei sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh PD.

Laporan evaluasi tersebut yang telah dipetakan ke dalam jenis-jenis indikator provinsi disampaikan Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Kalimantan Timur untuk dikonsolidasikan.

b. Langkah 2

Ketua Tim Pelaksana menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Gubernur sebagai Ketua Tim Pengarah untuk menjadi masukan evaluasi program dan kegiatan bagi pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

4.5.2.2. Alur Umpan Balik

a. Langkah 3

Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan arahan kebijakan dari Gubernur Kalimantan Timur sebagai Ketua Tim Pengarah terkait hasil evaluasi TPB Provinsi Kalimantan Timur untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.

b. Langkah 4

Ketua Tim Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berikutnya kepada Kelompok Kerja TPB Provinsi Kalimantan Timur.

c. Langkah 5

Kelompok Kerja merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan oleh masing-masing PD pada program dan kegiatan masing- masing.

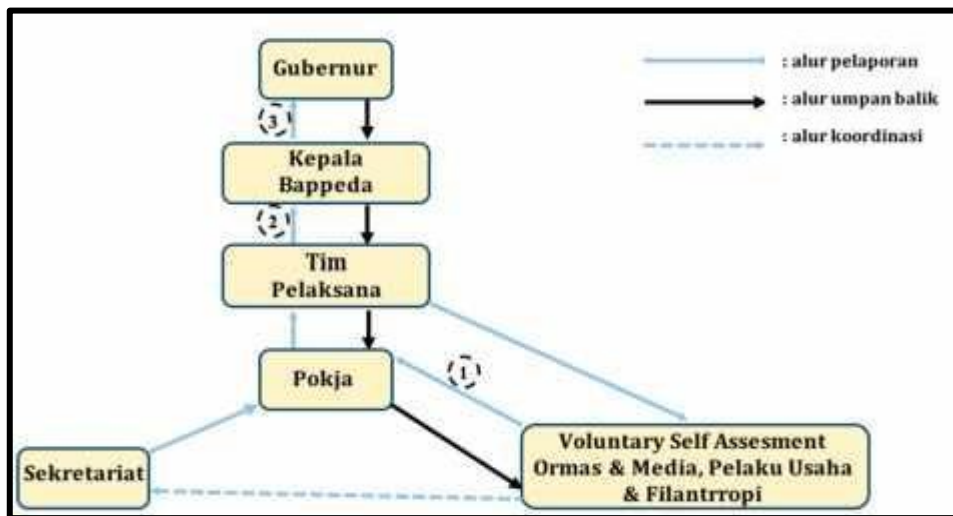
4.6. Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah

Mekanisme monitoring dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi dan akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.

Kapasitas organisasi non pemerintah sangat beragam, maka perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang sederhana dan efisien, namun tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan.

Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui *self assesment tool* (SAT) yang disepakati.

Adapun alur informasi pemantauan dan evalausi dari organisasi non pemerintah adalah sebagai berikut, seperti digambarkan dalam bagan :



Gambar 4.3. Alur Informasi Evaluasi untuk RAD TPB Provinsi Kalimantan Timur Non- Pemerintah

4.6.1. Alur Laporan

a. Langkah 1

Organisasi Non Pemerintah melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assesment tool*, lalu dilaporkan pada Kelompok Kerja pada pilar yang sesuai dengan isu lembaga dimaksud dan/atau disampaikan juga kepada Sekretariat TPB Provinsi Kalimantan Timur.

b. Langkah 2

Kelompok Kerja atau Sekretariat TPB Provinsi Kalimantan Timur menerima laporan dari Organisasi Non Pemerintah untuk diolah, divalidasi dan direkapitulasi yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda Kalimantan Timur selaku Ketua Tim Pelaksana.

c. Langkah 3

Tim Pelaksana merangkum keseluruhan laporan baik dari pemerintah maupun non pemerintah ke dalam suatu laporan yang utuh yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Ketua Tim Pengarah.

4.6.2. Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memudahhi proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja non pemerintah yaitu : kelompok Kerja dibantu Sekretariat akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Non Pemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.

Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Organisasi Non Pemerintah itu sendiri yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para

personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari stakeholder berkaitan.

Forum atau tim tersebut juga melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain bila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dan lain-lain.

Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian akan diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana sebagai bahan evaluasi keseluruhan dari para stakeholder. Ketua Tim Pelaksana akan menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Tim Pengarah.

Ketua Tim Pengarah akan memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para stakeholder untuk pencapaian TPB yang lebih optimal. Ketua Tim Pelaksana akan memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Ketua Tim Pengarah kepada Kelompok Kerja, yang akan dilanjutkan disampaikan kepada Organisasi Non Pemerintah terkait.

4.7. Publikasi Hasil Pemantauan Dan Evaluasi

Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat TPB telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan Peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB, dokumen dan informasi publik lainnya.

Laman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi, hasil pemantauan dan evaluasi berkala atas kemajuan pencapaian TPB Indonesia.

BAB V. PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs merupakan amanat dari Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang harus dilaksanakan setiap daerah yang sesuai dengan prinsip inklusif dan partisipatif.

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur berisi arah kebijakan dan target yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalimantan Timur pada prinsip-prinsip TPB/SDGs yaitu integrasi dan *no one behind* (tidak ada satupun yang tertinggal).

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dokumen RAD ini juga dilengkapi dengan lampiran Matrik Program dan Kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang bersifat terbuka dan menerima saran dan kritik baik dari pemerintah maupun non pemerintah, oleh karenanya masukan tersebut sangat diharapkan demi kesempurnaan dokumen ini.

PILAR EKONOMI

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
TUJUAN 7. Energi Bersih Terjangkau								
INDIKATOR SDGs 7.1.1 : Rasio Ketersediaan Daya Listrik								
Program 1 : Program Diversifikasi Energi								
Kegiatan 1 : Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan	Jumlah Desa yang memiliki potensi EBT	Desa		5	10	27,527	APBD	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
	Jumlah PLTS terpusat yang diawasi	PLTS		5	10	1868,328	APBD	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
Kegiatan 2 : Energi Skala Kecil (DAK)	Jumlah PLTS terpusat yang terpasang	Unit		0	0	25,659	APBN	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
Program 2 : Program Pengembangan Ketenagalistrikan								
Kegiatan 1 : Perencanaan Pengembangan Ketenagalistrikan daerah	Jumlah Evaluasi RUPTL	Lokasi		5	5	1,717	APBD	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral
INDIKATOR SDGs 7.3.1 : Intensitas Energi Primer								
Program 1 : Program Pengembangan Air Tanah								
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah	Rekomtek			100	432,100	APBD	Dinas Energi & Sumber Daya Mineral

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
INDIKATOR SDGs 8.8.1.(a) : Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma K3								
Program 1 : Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan								
Kegiatan 1 : Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan		60	60	364,750	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan 2 : Pembinaan Penerapan Peraturan Ketenagakerjaan pada Pemberi Pekerja dan Pekerja	Jumlah perusahaan yang dibina	Perusahaan		100	40	235.250	APBD	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
INDIKATOR SDGs 8.9.1.(a) : Jumlah Wisatawan Mancanegara								
INDIKATOR SDGs 8.9.1.(b) : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara								
Program 1 : Program pengembangan pemasaran pariwisata								
Kegiatan 1 : Pengelolaan Data dan Informasi Pariwisata	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang		5500	5500	150		
Kegiatan 2 : Pengembangan Promosi Pariwisata	Jumlah promosi yang dilakukan	Jenis		4	4	1,008	APBD	Dinas Pariwisata
	Jumlah jenis data dan informasi yang dikelola	% / Jenis		8	100	1,008	APBD	Dinas Pariwisata

TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN TERSTRUKTUR								
INDIKATOR SDGs 9.1.1.(b) : Panjang Pembangunan Jalan Tol								
Program 1 : Program Pembangunan Jalan Tol								
Kegiatan 1 : Pembangunan jalan tol balikpapan - samarinda	Panjang Jalan Tol yang dibangun (seksi 1)	Km			22,5	821,570	APBD	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
	Panjang Jalan Tol yang dibangun 22 Km	%		50			APBD	Dinas PU, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR SDGs 9.1.2.(a) : Jumlah Bandara								
Program 1 : Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara Dan ASDP								
Kegiatan 1 : Pembangunan Bandar Udara Samarinda Baru	Lanjutan Pembangunan Shoulder Bandara Maratua	M3		450000		328,261	APBD	Dinas Perhubungan
	Pembuatan Over Run R/W 31 dan R/W 13 Bandara Maratua	M2		3600			APBD	Dinas Perhubungan
	Penambahan RESA Bandara Maratua	M2		2700			APBD	Dinas Perhubungan
	Terbangunnya Konstruksi Runway 2.250 x 45 m Bandara APT. Pranoto Samarinda	%			100		APBD	Dinas Perhubungan

INDIKATOR SDGs 9.1.2.(c) : Jumlah Pelabuhan Strategis								
Program 1 : Program Peningkatan Daya Saing Investasi Sektor Transportasi Darat, Laut, Udara Dan ASDP								
Kegiatan 1 : Pembangunan Pelabuhan Laut Maloy Kutai Timur	Terbangunnya abutment di causeway	Unit			1	13,065	APBD	Dinas Perhubungan
	Jalan akses ke trestle dengan konstruksi rigid pavement	M		1020			APBD	Dinas Perhubungan
INDIKATOR SDGs 9.4.1 : Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan Nilai Tambah Sektor Industri								
Program 1 : Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim								
Kegiatan 1 : Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersusunnya Laporan Aksi Mitigasi dan Perubahan Iklim	Laporan		1	1	165	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Tersusunnya Laporan Aksi Mitigasi dan Perubahan Iklim	ton CO2 eq/1 Juta US\$ / Laporan		1317	1			
Kegiatan 2 : Perlindungan Lapisan Ozon	Inventarisasi bahan perusak ozon	Kab/Kota		3	3	16		
Kegiatan 3 : Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV) RAD – GRK	Terlaksananya pengembangan sistem measurement, evaluation dan verification (MRV) RAD-GRK	Laporan		1	1	75		
Kegiatan 4 : Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD – GRK	Terlaksananya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pelaksanaan pemantauan evaluasi & pelaporan RAD GRK)	Laporan		1	1	122		

TUJUAN 10. BERKURANGNYA KESENJANGAN								
INDIKATOR SDGs 10.1.1.(a) : Tingkat Kemiskinan								
Program 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan								
Kegiatan 1 : Fasilitasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan social	RTSM		50	50	233	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lansia terlanjar yang mendapatkan pelayanan social	Orang		100	100	417	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 3 : pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah warga KAT yang diberi bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha	Orang		120	56	77	APBD	Dinas Sosial
Program 2 : Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial								
Kegiatan 1 : Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi Keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan bantuan social	Orang / WRSE		30	30	1,444	APBD	Dinas Sosial
	Jumlah Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan usaha	KUBE		36	40		APBD	Dinas Sosial
	Jumlah Warga KAT Yang Diberi Bimbingan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha	Orang		-	56	853		

PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA

INDIKATOR SDGs : 16.5.1. (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).								
PROGRAM 1 : Program pencegahan dan pemberantasan KKN								
Kegiatan 1 : Penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	kasus		20	20	412	APBD	INSPEKTORAT
Kegiatan 2 : Pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus	Jumlah pemeriksaan dengan tujuan tertentu/khusus yang dilaksanakan	kasus		20	20	220	APBD	INSPEKTORAT
Kegiatan 3 : Fasilitasi kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah laporan pencegahan dan pemberantasan KKN	Laporan		4		1,175	APBD	INSPEKTORAT
Kegiatan 4 : pencegahan dan pemberantasan KKN	Jumlah kegiatan pencegahan dan pemberantasan KKN yang dilaksanakan	Kegiatan			3	851,2	APBD	INSPEKTORAT
PROGRAM 2 : Program pengembangan zona integritas								
Kegiatan 1 : Penerapan zona integritas pada SKPD	PD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	PD		2	2	206,6	APBD	INSPEKTORAT
INDIKATOR SDGs : 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.								
PROGRAM 1 : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
Kegiatan 1 : Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Tersedianya Peraturan Daerah tentang APBD	Perda		2	2	3160,2	APBD	BPKAD
Kegiatan 2 : Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersedianya Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Pergub		2	2	3245	APBD	BPKAD
Kegiatan 3 : Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Perda		1	1	772,38	APBD	BPKAD

Kegiatan 4 : Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersusunnya Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Pergub		1	1	883,35	APBD	BPKAD
Kegiatan 5 : Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terselenggaranya Sosialisasi Paket Regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.	sosialisasi		3	3	1016,12	APBD	BPKAD
Kegiatan 6 : Implementasi SIMDA Keuangan pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan berbasis Sistem Informasi	Aplikasi		3	3	1469,6	APBD	BPKAD
INDIKATOR SDGs : 16.6.1. (a) Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Instansi BPK.								
PROGRAM 1 : Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan								
Kegiatan 1 : Reviu atas laporan keuangan	Reviu laporan keuangan Pemda dan SKPD yang sesuai SAP	Laporan/keg		14	14	765,5	APBD	INSPEKTORAT
Kegiatan 2 : Pemeriksaan kinerja SKPD	Tercapainya kinerja SKPD sesuai dengan target yang ditetapkan.	Laporan		37	37	3352,5	APBD	INSPEKTORAT
Program 2 : Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan								
Kegiatan 1 : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	persentase		80	85	273	APBD	INSPEKTORAT
PROGRAM 1 : Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Peraturan	opini		1	1	533,28	APBD	BPKAD
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).								
Program 1 : Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja								
Kegiatan 1 : Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Laporan hasil evaluasi SAKIP Pemprov, Kab/Kota dan SKPD	laporan		40	40	1272	APBD	INSPEKTORAT
Program 1 : Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik								
Kegiatan 1 : Peningkatan Akuntabilitas	Prosentase Hasil Evaluasi AKIP	persentase		-	80	184	APBD	Biro Organisasi

Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat B (Baik)							
Kegiatan 2 : Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Prosentase Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah yang memperoleh Predikat B (Baik)	persentase		-	80	120	APBD	Biro Organisasi
Program 2 : Program Peningkatan Kualitas Manajemen Berbasis Kinerja								
Kegiatan 1 : Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi	Predikat		78 (BB)	-	33	APBD	Biro Organisasi
Kegiatan 2 : Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Jumlah kesesuaian/keselarasan Renstra SKPD Provinsi terhadap RPJMD	PD		39	-	91,75	APBD	Biro Organisasi
INDIKATOR SDGs: 16.6.1. (c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan (Instansi LKPP).								
Program 1 : Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
Kegiatan 1 : Pelayanan dan Pengembangan Pengadaan	Jumlah pengadaan yang dilayani	paket		250	250	1906,7	APBD	Biro Administrasi Pembangunan
INDIKATOR SDGs: 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik								
Program 1 : Program pendidikan politik masyarakat								
Kegiatan 1 : Pemantauan perkembangan politik di daerah	Meningkatnya Partisipasi Pemilih pada Pilgub 2018	Persentase		70	77,5	4716,51	APBD	BADAN KESBANGPOL
Kegiatan 2 : Penyusunan IDI	Meningkatnya Kinerja Demokrasi	Persentase		82	74	454,125	APBD	BADAN KESBANGPOL
Kegiatan 3 : Penyusunan Data Base Partai Politik	Tersusunnya Database Partai Politik	dokumen		1	1	265,35	APBD	BADAN KESBANGPOL
INDIKATOR SDGs: 16.10.2. (a) Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.								

PILAR LINGKUNGAN

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK								
PROGRAM PEMERINTAH								
INDIKATOR: 6.1.1.(a). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.								
Program 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah								
Kegiatan 1 : Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Panjang jaringan pipa air bersih/air minum yang terpasang	Meter (eq)		4500	1000	2.670,20	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Kegiatan 2 : Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah SPAM yang terbangun	Unit		80	1	146.634,363	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR: 6.1.1.(b). Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.								
Program 1 : Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku								
Kegiatan 1 : Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	Bangunan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Sekerat	Meter			16.000	67.541,10	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
	Jumlah Bangunan Bendungan, Bendung yang terbangun	Unit		1				
	Panjang Jaringan Pipa Transmisi Air Baku yang terbangun	Meter		3000				
	Laporan Supervisi	Dokumen			1			
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				

Program 2 : Program peningkatan daya saing sektor sumber daya air								
Kegiatan 1 : Pembangunan reservoir	Jumlah Bendungan yang Terbangun	Unit			1	8.533,90	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
		Dokumen		4				
INDIKATOR: 6.1.1.(c). Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.								
Program 1 : Program Pengembangan Air Tanah								
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah	Rekomtek		20	100	525,219	APBD	Dinas Energi & Sumberdaya Mineral
Program 2 : Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat								
Kegiatan 1 : Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	Jumlah orang yang dilibatkan dalam kegiatan GERMAS	Orang			1500	220	APBD	Dinas Kesehatan
Program 3 : Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
Kegiatan 1 : Penguatan Pansimas/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK)	Jumlah orang yang mengikuti Pertemuan program Pansimas	Orang			35	589,3	APBN	Dinas Kesehatan
	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi Pansimas III	Orang			46			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			

INDIKATOR : 6.2.1.(a). Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 6.2.1.(b). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.								
Program 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman								
Kegiatan 1 : Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun	Unit		56	39	5.673,60	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Program 2 : Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
Kegiatan 1 : Penguatan Pansimas/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK)	Jumlah orang yang mengikuti Pertemuan program Pansimas	Orang			35	589,3	APBN	Dinas Kesehatan
	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi Pansimas III	Orang			46			
INDIKATOR : 6.2.1.(c). Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)..								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 6.2.1.(d). Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).								
Program 1 :								
Kegiatan 1:								
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR : 6.3.2.(a). Kualitas air danau.								

Program 1 : Program Pemantauan Lingkungan								
Kegiatan 1 : Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemantauan Kualitas air sungai, air laut dan udara yang di pantau	Kab/Kota		8	10	582,20	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Pengadaan Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)	Alat Ukur kualitas air secara kontinyu,otomatis dan online	Unit			1	613	APBN	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR : 6.3.2.(b). Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.								
Program 1 : Program Pemantauan Lingkungan								
Kegiatan 1 : Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemantauan Kualitas air sungai, air laut dan udara yang di pantau	Kab/Kota		8	10	582,20	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Pengadaan Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)	Alat Ukur kualitas air secara kontinyu,otomatis dan online	Unit			1	613	APBN	Dinas Lingkungan Hidup
Program 2 : Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup								
Kegiatan 1 : Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi	Jumlah Perusahaan yang dinilai	Perusahaan		3	220	500,50	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR : 6.4.1.(a). Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.								
Program 1 : Program Pengembangan Air Tanah								

Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengawasan Air Tanah	Jumlah rekomendasi teknis perizinan pemanfaatan air tanah	Rekomtek		20	100	525,219	APBD	Dinas Energi & Sumberdaya Mineral
Program 2 : Program konservasi lahan dan air								
Kegiatan 1 : Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Terlindunginya sumber air di areal perkebunan	Unit		125	50	373	APBD	Dinas Perkebunan
INDIKATOR : 6.4.1.(b). Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industry								
Program 1 : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya								
Kegiatan 1 : Peningkatan Fungsi Jaringan Irigasi (DAK)	Panjang Jaringan Irigasi D.I. Biatan, D.I. Merancang, D.I. Labanan, D.I. Sungai Buluh	Meter			16.740	32.240	APBN	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Kegiatan 2 : Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	Meter		5.000		11.000	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Program 2 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah I								
Kegiatan 1 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah I	Daerah Irigasi yang terpelihara (5 D.I)	HA		10	10	2.448,7	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2017	2018			
Program 3 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah II								
Kegiatan 1 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan	Luas Daerah irigasi yang terpelihara	HA		19193	19.193	6.299,2	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat

Irigasi Wilayah II								
Program 4 : Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Jaringan Irigasi Wilayah III								
Kegiatan 1 : Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Wilayah III	Luas Daerah irigasi yang terpelihara	HA		2.000	2.000	1.653,6	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Program 5 : Program konservasi lahan dan air								
Kegiatan 1 : Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Terlindunginya sumber air di areal perkebunan	Unit		125	50	373	APBD	Dinas Perkebunan
INDIKATOR : 6.5.1.(a). Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 6.5.1.(b). Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.								
Program 1 : Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim								
Kegiatan 1 : Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersusunnya Laporan Aksi Mitigasi dan Perubahan Iklim	Laporan		1	1	171,65	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 1 : Perlindungan Lapisan Ozon	Inventarisasi bahan perusak ozon	Kab/Kota		3	3	15,5	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2017	2018			
Program 2 : Program Program Pemantauan Lingkungan								
Kegiatan 1 : Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemantauan Kualitas air sungai, air laut dan udara yang di pantau	Kab/Kota		10	10	582,2	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Kegiatan 2 : Pengadaan Sarana Prasarana Pemantauan Kualitas Lingkungan (DAK)	Alat Ukur kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online	Unit			1	613	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Program 3 : Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya								
Kegiatan 1 : Kegiatan Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Informasi Sumber Daya Air	Dokumen		1	1	3.516,10	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
	Jumlah sarana pengelolaan hidrologi dan informasi SDA	Unit		0	6			
INDIKATOR : 6.5.1.(c). Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.								
Program 1 : Program Pemantauan Lingkungan								
Kegiatan 1 : Pemantauan Kualitas Lingkungan	Pemantauan Kualitas air sungai, air laut dan udara yang di pantau	Kab/Kota		10	10	582,2	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR : 6.5.1.(d). Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.								
Program 1 :								
Kegiatan 2 :								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR : 6.5.1.(e). Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.								
Program 1 : Program Pengelolaan DAS dan RHL								
Kegiatan 1 : RHL Vegetatif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan (DAK)	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	Ha		200	3.050	APBN	Dinas Kehutanan	

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2017	2018			
Kegiatan 2 : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping DBH SDA DR)	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	Ha			8750	5.307,784	APBD	Dinas Kehutanan
Kegiatan 3 : Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir (Dana Pendamping DBH SDA DR)	Jumlah Luasan Rehabilitasi Mangrove dan Pesisir	Ha			900	527,81	APBD	Dinas Kehutanan
INDIKATOR : 6.5.1.(f). Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau. Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air								
Program 1 : Program Pengendalian Banjir								
Kegiatan 1 : Pembangunan reservoir pengendali banjir	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Kecil	Meter		1	525	11.344,2	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2017	2018			
Kegiatan 2 : Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Loajan dan Rapak Dalam	Meter		400	110	7.215,257	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Kegiatan 3 : Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karang Asam Besar	Meter		18	700	2.656,6	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Kegiatan 4 : Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir	Bangunan Pengendali Banjir Sistem Karangmumus	Meter		138	130	12.481	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR : 6.5.1.(h). Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.								
Program 1 :								
Kegiatan 2 :								
INDIKATOR : 6.5.1.(i). Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 6.6.1.(a). Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya.								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR : 6.6.1.(d). Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.								
Program 1 : Program Pengelolaan DAS dan RHL								
Kegiatan 1 : RHL Vegetatif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan (DAK)	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	Ha		200	3.050	APBN	Dinas Kehutanan	
Kegiatan 2 : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping DBH SDA DR)	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	Ha		8750	5.307,784	APBD	Dinas Kehutanan	
INDIKATOR : 6.6.1.(e). Jumlah DAS prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
TUJUAN 11. KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN								
INDIKATOR : 11.1.1.(a). Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.								
Program 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman								
Kegiatan 1 : Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah Layak Huni yang Terbangun	Unit		56	39	5.673,6	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Kegiatan 2 : Pembangunan prasarana dan sarana rumah sederhana sehat	Panjang jalan lingkungan yang dibangun	Meter		4395	735,8	17.867,45	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR SDGs: 11.1.1.(b). Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).								
Program 1 : Program pembangunan jalan dan jembatan								
Kegiatan 1 : Pembangunan jalan Samarinda Anggana	Panjang jalan aspal yang di bangun	Km		0,5	4.200	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat	
Kegiatan 2 : Peningkatan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku (DAK)	Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Rigid Pavement)	Km		0,9	4.200	APBN	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat	
Kegiatan 3: Peningkatan Jalan Semoi Sepaku - Petung (DAK)	Panjang Jalan ditingkatkan (Rigid Pavement)	Km		1	10.000	APBN	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat	
Kegiatan 4 : Peningkatan Jalan Sp. Ambalut - Sebulu (DAK)	Panjang Jalan ditingkatkan (Aspal)	Km		0,9	5.750	APBN	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat	
Kegiatan 5 : Pembangunan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku - Petung	Panjang Jalan yang ditingkatkan Paket 1 (Rigid Pav)	Km		2,5	46.400	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat	
	Panjang Jalan yang ditingkatkan Paket 2 (Rigid Pav)		1,5					
Program 2 : Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan								
Kegiatan 1 : Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	Panjang Jalan 23 Km sisi PPU efektif rigid 250 meter	Meter		0,5	250	12.821,75	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Kegiatan 2 : Pembangunan Jalan Pendekat Jembatan Mahakam IV	Panjang Jalan pendekat yang dibangun sisi samarinda kota 502,40 meter, sisi samarinda seberang 386,65 meter	Paket		0,88	2	295.743,92	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2017	2018			
Kegiatan 3 : Pembangunan Jembatan Mahakam IV	Jembatan yang terbangun	%			100	89.977,731	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Program 3 : Program pembangunan jalan tol								
Kegiatan 1 : Pembangunan jalan tol balikpapan - samarinda	Panjang Jalan Tol yang dibangun (seksi 1)	Km		16,35	22,5	821.569,713	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Program 4 : Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan								
Kegiatan 1 : Pembangunan sarana ibadah	Sarana Ibadah (Mesjid, Gereja, Gedung Ibadah lainnya)	Unit		2	4	170.180	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Program 5 : Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Pemerintah								
Kegiatan 1 : Pembangunan Gedung Pemerintah	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit		3	1	46.311,72	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR : 11.1.1.(c) Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.								
Program 1 : Program pembangunan jalan dan jembatan								
Kegiatan 1 : Peningkatan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku (DAK)	Panjang Jalan yang Ditingkatkan (Rigid Pavement)	Km			0,9	4.200	APBN	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Kegiatan 2 : Peningkatan Jalan Semoi Sepaku - Petung (DAK)	Panjang Jalan ditingkatkan (Rigid Pavement)	Km			1	10.000	APBN	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
Kegiatan 3 : Pembangunan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku - Petung	Panjang Jalan yang ditingkatkan Paket 1 (Rigid Pav)	Km			2,5	46.400	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2017	2018			
Kegiatan 5 : Pembangunan Jalan Km.38 - Semoi - Sepaku - Petung	Panjang Jalan yang ditingkatkan Paket 1 (Rigid Pav)	Km			2,5	46.400	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
	Panjang Jalan yang ditingkatkan Paket 2 (Rigid Pav)							
Program 2 : Program peningkatan daya saing investasi sektor jalan dan jembatan								
Kegiatan 1 : Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang	Panjang Jalan 23 Km sisi PPU efektif rigid 250 meter	Meter		0,5	250	12.821,75	APBD	Dinas PUPR dan Perumahan Rakyat
INDIKATOR: 11.2.1.(a) Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 11.2.1.(b) Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 11.3.1.(a) Jumlah kota sedang di luar jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR: 11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR 11.3.2.(a) Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam forum dialog perencanaan pembangunan kota berkelanjutan								
Program 1 : Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal								
Kegiatan 1 : Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah kajian kebijakan penanaman modal	Dokumen			1	88,35	APBD	DPMPTSP
Kegiatan 2 : Penyusunan Kajian Pengembangan Potensi Daerah	Jumlah kajian potensi unggulan daerah	Dokumen			1	103,15	APBD	DPMPTSP
Program 2 : Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha								
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi	Event			3	650,2	APBD	DPMPTSP
Kegiatan 2 : Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis	Pertemuan Bisnis			2	65	APBD	DPMPTSP
INDIKATOR : 11.3.2.(b) Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.								
Program 1 : Program Penyelenggaraan Promosi dan Pemberdayaan Dunia Usaha								
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Jumlah event promosi	Event			3	650,2	APBD	DPMPTSP

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Kegiatan 2 : Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal	Jumlah pertemuan bisnis	Pertemuan Bisnis		2	65	APBD	DPMPTSP	
INDIKATOR : 11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang								
Program 1 : Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana								
Kegiatan 1: Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Laporan		10	225	APBD	BPBD	
INDIKATOR 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)								
Program 1 : Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana								
Kegiatan 1: Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Peralatan dan Logistik	Orang		50	50	750	APBD	BPBD
	Jumlah Peserta Simulasi dan Peralatan Penanggulangan Bencana			20	120			
	Jumlah Peserta Latihan Gabungan Rescue			100	90			
	Jumlah Peserta Pelatihan Radio Komunikasi			30	30			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
Program 2 : Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah							
Kegiatan 2 : Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	Kab/Kota		8	97,3	APBD	BPBD
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	Orang		5			
Program 3 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana							
Kegiatan 1 : Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana	Orang		90	137,5	APBD	BPBD
	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Provinsi Kalimantan Timur	Desa Tangguh Bencana		11			
INDIKATOR : 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk							
Program 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana							
Kegiatan 1 : Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Provinsi Kalimantan Timur)	Desa Tangguh Bencana		11	137,5	APBD	BPBD
INDIKATOR : 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.							
Program 1 : Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah							
Kegiatan 1 : Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	Kab/Kota		8	97,3	APBD	BPBD
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	Orang		5			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
Program 2 : Program Penanganan Kebakaran							
Kegiatan 1: Pembantuan Penanganan Bencana Karhutla dan Pemukiman	Pemetaan daerah rawan kebakaran	Kali		1	30,25	APBD	Satpol PP
	Pemetaan dan pendataan sistem proteksi kebakaran			1			
INDIKATOR : 11.5.2.(a) Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana							
Program 1 : Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana							
Kegiatan 1: Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Laporan		10	225	APBD	BPBD
Program 2 : Program Penanganan Kebakaran							
Kegiatan 1: Pembantuan Penanganan Bencana Karhutla dan Pemukiman	Jumlah Penanganan bencana dan musibah	Kali		12	30,25	APBD	Satpol PP
INDIKATOR : 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani							
Program 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan							
Kegiatan 1: Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan/kampanye/tentang pengelolaan persampahan	Orang	200	100	143,55	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
-------------------------------------	--------	-----------------	----------------	--	--	------------------	--------------------

				2017	2018			
Program 1 : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN								
Kegiatan 1: Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah peraturan yang disusun dalam rangka mendukung pengelolaan sampah regional	Peraturan		1	194	157,90	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Terlaksananya perusahaan pengelola B3 & Limbah B3 yang menggunakan manifest elektronik	Perusahaan						
Kegiatan 3: Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan	Jumlah kerjasama yang dilakukan	MoU		1	9	162,60	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Terwujudnya penerapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kab/Kota di Kalimantan Timur	Kab/Kota						
INDIKATOR : 11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.								
Program 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
Kegiatan 1: Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah peraturan yang disusun dalam rangka mendukung pengelolaan sampah regional	Peraturan		1	194	157,90	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Terlaksananya perusahaan pengelola B3 & Limbah B3 yang menggunakan manifest elektronik	Perusahaan						
Kegiatan 2: Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan	Jumlah kerjasama yang dilakukan	MoU		1	9	162,60	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Terwujudnya penerapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kab/Kota di Kalimantan Timur	Kab/Kota						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan	Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
-------------------------------------	--------	-----------------	----------------	--	------------------	--------------------

		2017	2018					
INDIKATOR: 11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.								
Program 1 :								
Kegiatan 1:								
INDIKATOR: 11.7.2.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.								
Program 1 :								
Kegiatan 1:								
INDIKATOR : 11.b.1* Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.								
Program 1 : Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kegiatan 1 : Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	Kab/Kota			8	97,3	APBD	BPBD
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	Orang			5			
Program 2 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana								
Kegiatan 1: Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Provinsi Kalimantan Timur)	Desa Tangguh Bencana			11	137,5	APBD	BPBD

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan	Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
-------------------------------------	--------	--------------------	----------------	--	---------------------	--------------------

		2017	2018					
INDIKATOR : 11.b.2* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah								
Program 1 : Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kegiatan 1 : Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	Kab/Kota			8	97,3	APBD	BPBD
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	Orang			5			
Program 2 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Penanggulangan Bencana								
Kegiatan 1: Penanggulangan bencana berbasis masyarakat	Jumlah Lokasi Monitoring dan Evaluasi Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Provinsi Kalimantan Timur)	Desa Tangguh Bencana			11	137,5	APBD	BPBD
TUJUAN 12. KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB								
INDIKATOR : 12.1.1*. Jumlah kolaborasi tematik quickwins program.								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR: 12.4.1.(a). Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking BIRU.								
Program 1 : Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup								
Kegiatan 1 : Pembinaan dan pemantauan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi	Jumlah Perusahaan yang dinilai	Perusahaan		3	220	500,50	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan	Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
-------------------------------------	--------	-----------------	----------------	--	------------------	--------------------

				2017	2018				
INDIKATOR: 12.4.2.(a). Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).									
Program 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
Kegiatan 1: Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah peraturan yang disusun dalam rangka mendukung pengelolaan sampah regional	Peraturan		1	194	157,90	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	Terlaksananya perusahaan pengelola B3 & Limbah B3 yang menggunakan manifest elektronik	Perusahaan							
Kegiatan 2: Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan	Jumlah kerjasama yang dilakukan	MoU		1	9	162,60	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	Terwujudnya penerapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kab/Kota di Kalimantan Timur	Kab/Kota							
INDIKATOR: 12.5.1.(a). Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.									
Program 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan									
Kegiatan 1: Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Jumlah peraturan yang disusun dalam rangka mendukung pengelolaan sampah regional	Peraturan		1	194	157,90	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	Terlaksananya perusahaan pengelola B3 & Limbah B3 yang menggunakan manifest elektronik	Perusahaan							
Kegiatan 2: Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan	Jumlah kerjasama yang dilakukan	MoU		1	9	162,60	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	Terwujudnya penerapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kab/Kota di Kalimantan Timur	Kab/Kota							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR: 12.6.1.(a). Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR: 12.7.1.(a). Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister								
Program 1 :								
Kegiatan 1:								
INDIKATOR: 12.8.1.(a). Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.								
Program 1 :								
Kegiatan 1:								
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM								
INDIKATOR: 13.1.1* Dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah								
Program 1 : Program Pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kegiatan 2 : Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	Kab/Kota			8	97,3	APBD	BPBD
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	Orang			5			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
INDIKATOR: 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang							
Program 1 : Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana							
Kegiatan 1: Pendampingan/Supervisi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Laporan Pendampingan, Monitoring Dan Evaluasi Serta Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Laporan	5	10	225	APBD	BPBD
INDIKATOR: 13.2.1* Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia							
Program 1 : Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim							
Kegiatan 1: Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Tersusunnya Laporan Aksi Mitigasi dan Perubahan Iklim	ton CO2 eq/1 Juta US\$	1.317	1	164,25	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
		Laporan					
Kegiatan 2: Perlindungan Lapisan Ozon	Inventarisasi bahan perusak ozon	Kab/Kota	3	3	15,5	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 3: Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV) RAD – GRK	Terlaksananya pengembangan sistem measurement, evaluation dan verification (MRV) RAD-GRK	Laporan	1	1	74,5	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 4: Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD – GRK	Terlaksananya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pelaksanaan pemantauan evaluasi & pelaporan RAD GRK)	Laporan	1	1	121,8	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan	Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
-------------------------------------	--------	-----------------	----------------	--	------------------	--------------------

				2017	2018			
INDIKATOR: 13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi GRK tahunan								
Program 1 : Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim								
Kegiatan 1: Pengembangan sistem Measurement, Evaluation and Verification (MRV) RAD – GRK	Terlaksananya pengembangan sistem measurement, evaluation dan verification (MRV) RAD-GRK	Laporan		1	1	74,5	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 4: Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan RAD – GRK	Terlaksananya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (pelaksanaan pemantauan evaluasi & pelaporan RAD GRK)	Laporan		1	1	121,8	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN								

INDIKATOR SDGs : (14.2.1) Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem.								
Program 1 : Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut								
Kegiatan 1 : Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya Laut	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Kawasan)	Kawasan		1	1	2.411,53	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan	Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
-------------------------------------	--------	-----------------	----------------	--	------------------	--------------------

				2017	2018			
INDIKATOR : 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional								
Program 1 : Program Pengelolaan Ruang Laut								
Kegiatan 1: Kegiatan Pendayagunaan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah pulau-pulau kecil yang terbina)	Pulau		1	1	2.090,05	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 2: Kegiatan Reklamasi dan Jasa Kelautan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi	Pelaku Usaha		5	5	121,80	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 3: Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi yang di rehabilitasi	Kawasan		2	2	133	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 4: Peyediaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi yang representatif	Paket			1	1.388,261	APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDGs : (14.2.1.(a)) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.								
Program 1 : Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir								
Kegiatan 1: Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar (pulau)	Pulau		2	2	2.394,80	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR SDGs : (14.2.1 (b)) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.								
Program 1 : Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir								
Kegiatan 1 : Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir	Jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terluar (pulau)	Pulau		2	2	2.394,80	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDIKATOR : 14.4.1* Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman								
Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap								
Kegiatan 1 : Kegiatan Pengelolaan kenelayanan	Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap yang dibina	KUB		110	110	184,6	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 2 : Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah perizinan kapal ikan	Izin		120	120	464,2	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 3 : Kegiatan Peningkatan Sarana, Prasarana Perikanan dan Pelabuhan Perikanan	Jumlah pangkalan pendaratan ikan yang operasional	Unit		6	6	191,4	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 4 : Pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana fasilitas pokok dan fungsional pelabuhan perikanan (DAK)	Tersedianya Turap untuk Bangunan TPI Air Tawar	Paket		0	1	2.626,85	APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR SDGs : (14.5.1*) Jumlah luas kawasan konservasi perairan.								
Program 1 : Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut								
Kegiatan 1 : Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya Laut	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (Kawasan)	Kawasan		1	1	2.411,53		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 2 : Program Pengelolaan Ruang Laut								
Kegiatan 1: Kegiatan Konservasi Kelautan dan Perikanan	Jumlah kawasan konservasi yang di rehabilitasi	Kawasan		2	2	133	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 4: Peyediaan sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi (DAK)	Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan kawasan konservasi yang representatif	Paket			1	1.388,261	APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan

INDIKATOR SDGs : (14.6.1) Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).

Program 1 : Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Kegiatan 1 : Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan (Pokmaswas)	Posmaswas		5	5	4.019,44	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
--	---	-----------	--	---	---	----------	------	------------------------------

INDIKATOR SDGs : 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.

Kegiatan 1 : Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan (Pokmaswas)	Posmaswas		5	5	4.019,44	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
--	---	-----------	--	---	---	----------	------	------------------------------

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR SDGs : (14.c.1*) Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)								
Program 1 : Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan								
Kegiatan 1 : Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan	Jumlah kelompok masyarakat pengawas yang berperan (Pokmaswas)	Posmaswas		5	5	4.019,44	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR : 14.6.1.(a) Jumlah kepatuhan pelaku usaha								
Program 1 : Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan								
Kegiatan 1 : Kegiatan Pengawasan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Penangkapan Ikan	Jumlah pengawasan yang dilakukan	Kali		10	10	247,01	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 2 : Kegiatan Pengawasan, Pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam melakukan pengawasan	Pokmaswas		40	40	238,44	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 3 : Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	Jumlah pelanggaran yang ditangani	Dokumen		2	2	129,6	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
Kegiatan 4 : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (DAK)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Akuntabel dan Memadai	Paket			1	1,889,45	APBN	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR : 14.b.1* Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil								
Program 1 :								

Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 14.b.1.(a) Jumlah peningkatan akses pendanaan usaha nelayan								
Program 1 : Program pengembangan perikanan tangkap								
Kegiatan 1 : Kegiatan Pengelolaan kenelayanan	Jumlah kelompok usaha bersama (KUB) perikanan tangkap yang dibina	KUB		110	110	184,6	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR : 14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 14.c.1 Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS								
Program 1 :								
Kegiatan 2 :								
TUJUAN 15. EKOSISTEM DARATAN								
INDIKATOR : 15.1.1.(a) Tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan								
Program 1 : Program Pengelolaan DAS dan RHL								
Kegiatan 1 : RHL Vegetatif untuk Pengelolaan Kawasan Hutan (DAK)	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	Hektar		200	3.050	APBD	Dinas Kehutanan	
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Kegiatan 2 : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping DBH SDA DR)	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	Hektar		8750	5.307,78	APBN	Dinas Kehutanan	

Program 2 : Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup																																				
Kegiatan 1 : Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan	Terlaksananya upaya penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan	Kab/Kota			10	70,85	APBD	Dinas Lingkungan Hidup																												
INDIKATOR : 15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya																																				
Program 1 :																																				
Kegiatan 1 :																																				
INDIKATOR : 15.2.1.(b) Luas Pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem																																				
Program 1 :																																				
Kegiatan 1 :																																				
INDIKATOR : 15.2.1.(c) Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%																																				
Program 1 :																																				
Kegiatan 2 :																																				
INDIKATOR : 15.2.1.(d) Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan																																				
Program 1 :																																				
Kegiatan 2 :																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan</th> <th rowspan="2">Satuan</th> <th rowspan="2">Baseline (2016)</th> <th colspan="2">Target Tahunan</th> <th rowspan="2">Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)</th> <th rowspan="2">Sumber Pendanaan</th> <th rowspan="2">Instansi Pelaksana</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="9">INDIKATOR : 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Program 1 : Program Pengelolaan DAS dan RHL</td> </tr> </tbody> </table>									Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	2017	2018	INDIKATOR : 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan									Program 1 : Program Pengelolaan DAS dan RHL								
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana																													
			2017	2018																																
INDIKATOR : 15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan																																				
Program 1 : Program Pengelolaan DAS dan RHL																																				

Kegiatan 1 : Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Dana Pendamping DBH SDA DR)	Luas Penanaman dan Pemeliharaan	Hektar			8750	5.307,78	APBN	Dinas Kehutanan
Program 2 : Program Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup								
Kegiatan 1 : Penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan	Terlaksananya upaya penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan	Kab/Kota			10	70,85	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
INDIKATOR : 15.5.1* Persentase populasi 25 species satwa terancam punah prioritas sesuai The IUCN Red List of Threatened Species								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 15.6.1* Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR : 15.7.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi								
Program 1 : Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH								
Kegiatan 2 : Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	% Kasus yang diselesaikan	Persen			100	254,348	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah kasus yang diselesaikan	Kasus		10				
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR : 15.7.1.(b) Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								

INDIKATOR : 15.8.1.(a) Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati									
Program 1 : Program Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura									
Kegiatan 1 : Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian	Jumlah benih unggul yang bersertifikat	Label			5000	81,70	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
Program 2 : Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura									
Kegiatan 1 : Monitoring dan Pengawasan Peredaran Benih	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	Rekomendasi			20	81	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	
Program 1 : Program pengujian dan sertifikasi benih									
Kegiatan 1 : Sertifikasi benih	Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Lembar		150	150	736,5	APBD	Dinas Perkebunan	
INDIKATOR : 15.9.1.(a) Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati									
Program 1 :									
Kegiatan 1 :									
INDIKATOR : 15.c.1.(a) Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi									
Program 1 : Program Pelayanan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa LH									
Kegiatan 2 : Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	% Kasus yang diselesaikan	Persen			100	254,348	APBD	Dinas Lingkungan Hidup	
	Jumlah Kasus Yang Diselesaikan	Kasus		10					

PILAR SOSIAL

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH - PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
TUJUAN 1. TANPA KEMISKINAN							
PROGRAM PEMERINTAH							
INDIKATOR SDGs 1.2.1 : Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan provinsi, menurut jenis kelamin dan kelompok umur							
Program 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan							
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga miskin yang mendapat bantuan	KPM		50	233,1	APBD	Dinas Sosial
Kegiatan 2 : Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana, dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS	Jumlah Lansia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial	orang	1182	100	416,5	APBD	Dinas Sosial
	Jumlah Kegiatan Monitoring Bantuan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	Kegiatan		1		APBD	Dinas Sosial
Program 2 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial							
Kegiatan 1 : Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	Jumlah KUBE Fakir Miskin yang mendapat bantuan usaha	KUBE	36	40	1.343,58	APBD	Dinas Sosial
	Jumlah warga KAT yang diberi bimbingan dan pelatihan keterampilan berusaha	Orang	30	56		APBD	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 3 : Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan								
Kegiatan 1 : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang diadakan	Jenis		150	150	3.800,49	APBD	Dinas Kesehatan
Program 4 : Program Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya								
Kegiatan 1 : Pengembangan dan Monitoring Ketahanan Keluarga dan Pelestarian Nilai-Nilai Kegotong Royongan	Jumlah TP PKK yang dibina	Orang		130	130	1.605	APBD	DPMPD
Program 5 : Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
Kegiatan 1 : Peningkatan pengembangan usaha ekonomi masyarakat miskin melalui pemanfaatan teknologi tepat guna	Posyantek percontohan yang dibina	Posyantek		-	10	54,15	APBD	DPMPD
Program 6 : Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan								
Kegiatan 1 : Peningkatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDesa yang aktif	Unit		-	15	140,85	APBD	DPMPD

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 7 : Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Pendidikan								
Kegiatan 1 : Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah beasiswa bagi siswa miskin	Orang		313	313	4.000.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program 8 : Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Penanggulangan Bencana								
Kegiatan 1 : Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	Jumlah relawan penanggulangan bencana	Orang			90	137,5	APBD	BPBD
	Jumlah lokasi monitoring dan evaluasi desa tangguh bencana (Destana) provinsi Kaltim	Desa Tangguh Bencana			11			
Program 9 : Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi								
Kegiatan 1 : Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan/perkoperasian	Koperasi		10	10	1988,85	APBD	Disperindagkop & UKM
Kegiatan 2 : Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)	Jumlah Pengurus Koperasi Perkebunan yang Mengikuti Diklat	Orang			90	6.500	APBN	Disperindagkop & UKM
INDIKATOR SDGs 1.3.1.a : Proporsi penduduk Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)								
Program 1 : Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional								
Kegiatan 1 : Pembangunan Pembiayaan Kesehatan dan JKN/KIS (DAK)	Jumlah penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Juta orang		-	92,4	698,5	APBN	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs 1.3.1.b : Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
Program 2 : Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan								
Kegiatan 1 : Peningkatan fungsi-fungsi Lembaga-lembaga Ketenagakerjaan	SK gubernur tentang Upah Minimum Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dokumen		3	3	680,67	APBD	3 Disnakertrans

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 3 : Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan								
Kegiatan 1 : Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	Perusahaan		150	60	364,75	APBD	Disnakertrans
Kegiatan 2 : Pembinaan penerapan peraturan ketenagakerjaan pada pemberi pekerja dan pekerja	Jumlah Perusahaan yang dibina	Perusahaan		110	40	232,25	APBD	Disnakertrans
INDIKATOR SDGs 1.3.1.c : Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								
Program 2 : Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
Kegiatan 1 : Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah korban tindak kekerasan dan pekerja migran terlantar, KDRT dan korban trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan	Orang		150	60	743,2	APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs 1.3.1.d : Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat								
Program 1 : Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan eks Trauma								
Kegiatan 1 : Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan eks Trauma	Jumlah Disabilitas yang mendapat bantuan pelayanan	Orang		967	32	279,4	APBD	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 2 : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya								
Kegiatan 1 : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah kegiatan monitoring bantuan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Kegiatan		1	-	10	APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs 1.4.1.a : Persentase Perempuan Pernah Kawin berusia 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan								
Program 1 : Program								
Kegiatan 1 :								
Program 2 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat								
Kegiatan 1 : Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat sekender dan primer (DAK)	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Bimtek pengelolaan Dana BOK dalam upaya pencapaian SPM	Kab/Kota		-	10	832,72	APBN	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Dukungan UKM tersier di Balai Kesehatan Masyarakat (DAK)	Jumlah Puskesmas yang dilakukan skrining mata	PKM		-	10	200	APBN	Dinas Kesehatan
Program 3 : Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan								
Kegiatan 1 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan bergerak	Kab/Kota		2	2	181,9	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Rumah Sakit yang mendapat pengawasan	Rumah Sakit		-	47	190	APBD	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR SDGs 1.4.1.b : Persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap								
Program 1 : Program								
Kegiatan 1 :								
Program 2 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
Kegiatan 1 : Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Jumlah orang yang mengikuti pertemuan penguatan jejaring TB HIV	Orang		-	50	34,6	APBD	Dinas Kesehatan
	Jumlah jejaring kerja pencegahan dan pengendalian TB HIV	Kab/Kota		-	10			
Program 3 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular								
Kegiatan 1 : Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan evaluasi pelaksanaan IPWL	Orang		68	37,5	APBD		Dinas Kesehatan
Program 4 : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
Kegiatan 1 : Pemenuhan sarana/prasarana Instalasi farmasi Provinsi (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana gudang yang disediakan	Unit		3	235	APBN		Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs 1.4.1.c : Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.								
Program 1 : Program Keluarga Berencana								
Kegiatan 1 : Penyediaan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Seminar peran perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam rangka hari ibu	Orang		-	100	270,8	APBD	DKP3A
	Pelayanan KIE dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	Orang		-	100			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 2 : Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KPP								
Kegiatan 1 : Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah	Jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE	Orang		-	100	77,4	APBD	DKP3A
INDIKATOR SDGs 1.4.1.e : Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan								
Program 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air Minum dan Air Limbah								
Kegiatan 1 : Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Panjang jaringan pipa air bersih/air minum yang terpasang	Meter		4500	1000	2.670.200	APBD	Dinas PU
Kegiatan 2 : Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlah SPAM yang terbangun	Unit		1	1	146.634,36	APBD	Dinas PU
INDIKATOR SDGs 1.4.1.f : Persentase rumah tangga kumuh perkotaan								
Program 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman								
Kegiatan 1 : Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah rumah tangga miskin yang mempunyai rumah layak huni	Unit		56	39	17.929,80	APBD	Dinas PU
Kegiatan 2 : Pembangunan Prasarana dan Sarana Rumah Sederhana Sehat	Panjang jalan lingkungan yang terbangun	Meter		4.395	735,8	17.867,45	APBD	Dinas PU

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR SDGs 1.4.1.g : Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA Sederajat								
Program 1 : Program Pendidikan Sekolah Menengah Atas								
Kegiatan 1 : Pemberian Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi	Pemberian penghargaan bagi siswa berprestasi	kab/kota		10	10	32.896,43	APBD	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kegiatan 2 : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik Peraga Siswa	Sekolah			21	5.678,51	APBN	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	Jumlah Alat Praktik Peraga Siswa	Sekolah		4		8.994,55	APBD	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kegiatan 3 : Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas (DAK)	Jumlah Ruang Kelas	Sekolah		-	7	2.042,392	APBN	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kegiatan 3 : Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK)	Jumlah Ruang Kelas Baru	Sekolah		-	8	3.470,04	APBN	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	Terselenggaranya ruang kelas baru	Sekolah		1		300	APBD	
Kegiatan 4 : Pembangunan Gedung Sekolah (DAK)	Jumlah pembangunan gedung sekolah & gedung penunjang lainnya	Sekolah		-	5	1.360,37	APBN	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
	Pembangunan Gedung Sekolah	Sekolah		1		480	APBD	
Kegiatan 5 : Pembangunan Laboratorium (DAK)	Jumlah Laboratorium	Sekolah		-	1	369,5	APBN	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kegiatan 6 : Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMAN	Bantuan operasional sekolah menengah atas negeri	Kab/Kota		-	10	113	APBD	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 2 : Program Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan								
Kegiatan 1 : Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai Informasi Pendidikan Menengah	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyebarluasan dan sosialisasi informasi pendidikan menengah	Kegiatan		6	6	1.346	APBD	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kegiatan 2 : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (DAK)	Jumlah Alat Praktik Peraga Siswa	Sekolah			3	13.344,38	APBN	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				9		2,005,45	APBD	
Kegiatan 3 : Pembangunan Ruang Praktik Siswa (DAK)	Jumlah RKB, Ruang Praktek Siswa & Perpustakaan	Sekolah		7	13	10.632,5	APBN	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kegiatan 4 : Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) SMKN	Bantuan operasional sekolah menengah kejuruan negeri	Kab/Kota		10	10	48.454,7	APBD	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
INDIKATOR SDGs 1.4.1.j : Persentase Penduduk usia 0-17 tahun dengan Kepemilikan akta kelahiran								
Program 1 : Program Penataan Administrasi Kependudukan								
Kegiatan 1 : Pelayanan Adminstrasi Kependudukan (DAK)	Laporan dan target nasional cakupan kepemilikan akta sebesar 85% untuk perekaman KTP elektronik harus 100%	Laporan		-	1	1.671,07	APBN	DKP3A
INDIKATOR SDGs 1.4.1.k : Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN								
Program 1 : Program Pengembangan Ketenagalistrikan								
Kegiatan 1 : Perencanaan pengembangan ketenagalistrikan daerah	Jumlah evaluasi RUPTL	Lokasi		5	5	1.017	APBD	ESDM

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
INDIKATOR SDGs 1.5.1* : Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang							
1.5.1.b : Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial							
Program 1 : Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							
Kegiatan 1 : Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah kegiatan penanganan korban bencana dan orang terlantar yang mendapatkan bantuan sosial	Kegiatan		3	225,45	APBD	Dinas Sosial
	Jumlah Masyarakat yang berkualitas melaksanakan kemitraan dalam Penanganan PMKS (Korban Bencana)	orang	280		191,25	APBD	Dinas Sosial
Program 2 : Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana							
Kegiatan 1 : Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta rapat koordinasi peralatan dan logistik	Orang		50	750	APBD	BPBD
	Jumlah peserta simulasi dan peralatan penanggulangan bencana	Orang	20	120			
	Jumlah peserta latihan gabungan rescue	Orang	5	90			
	Jumlah peserta pelatihan radio komunikasi	Orang		30			
Program 3 : Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana							
Kegiatan 1 : Pendampingan supervisi rehabilitasi dan rekonstruksi	Laporan pendampingan, monitoring dan evaluasi serta kajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA)	Laporan		10	225	APBD	BPBD
	Laporan Monitoring Fisik Pemecah Ombak	Laporan		10			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR SDGs 1.5.1* : Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang								
1.5.3* : Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah.								
Program 1 : Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Daerah								
Kegiatan 1 : Pengembangan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan	Jumlah Lokasi Monitoring Daerah Rawan Bencana	Kab/Kota		-	8	97,3	APBD	BPBD
	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pekan Pengurangan Risiko Bencana	Orang		-	5			
INDIKATOR SDGs 1.5.1.c : Pendampingan psikososial korban bencana sosial								
Program 1 : Program								
Kegiatan 1 :								
INDIKATOR SDGs 1.5.1.d : Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus								
Program 1 : Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma								
Kegiatan 1 : Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan Pelayanan	Orang		80	32	270,4	APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs 1.5.1.e : Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi								
Program 1 :								
INDIKATOR SDGs 1.5.2 : Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP global.								
Program 1 :								
INDIKATOR SDGs 1.5.3* : Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah								
Program 1 :								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN								
INDIKATOR SDGs : 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)								
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.								
2.1.2 (a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.								
Program 1 : Peningkatan Ketahanan Pangan								
Kegiatan 1 : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Perberasan	Data Ketersediaan Pangan Provinsi	Laporan		1	1	230.000.000	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kegiatan 2 : Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Cadangan Beras Provinsi	Ton		200	200	429.175.000	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kegiatan 3 : Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Informasi Harga Pangan Strategis	Laporan		1	1	390.850.000	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kegiatan 4 : Penanganan Daerah Rawan Pangan	Data Analisis SKPG dan Peta Kerawanan Pangan	Laporan		13	13	294.000.000	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
INDIKATOR SDGs 2.2.1* : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)								
2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta								
2.1.2* Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita								
2.2.2* Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) pada anak balita, berdasarkan tipe.								
2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil								
2.2.2.(b) Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif								
Program 1 :								
Kegiatan 1 :								

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
PROGRAM 2: Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan							
Kegiatan 1 : Peningkatan pelayanan kesehatan dasar	Jumlah kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan bergerak	Kab/Kota		2	181,9	APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 3: Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan							
Kegiatan 1 : Pengembangan Kapasitas Masyarakat	Jumlah Kader Pemberdayaan Masyarakat Yang dibina	Orang	50	150	116	APBD	DPMPD
PROGRAM 4 : Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Kesejahteraan Sosial untuk Mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan							
Kegiatan 1 : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan	KPM		50	129	APBD	
PROGRAM 5: Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa							
Kegiatan 1 : Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah penggunaan aplikasi MOD Jumlah penggunaan Secure Socket Layer pd website & aplikasi resmi OPD	OPD		58	1.765,25	APBD	Diskominfo
PROGRAM 6 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah							
Kegiatan 1 : Pengembangan sistem distribusi air minum	Jumlag SPAM yang terbangun	Unit	200	1	185.044,36	APBD	Dinas PU
INDIKATOR SDGs 2.2.2 (c) . (i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) ; (ii) Tingkat konsumsi ikan per kapita							
PROGRAM 1: Program Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran							
Kegiatan 1 : Peningkatan & pengembangan pengelolaan & pemasaran produksi perikanan	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	(Kg/Kapita/Tahun)	60,19	61,42	8.310	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 2 : Penganekaragaman Konsumsi Pangan								
Kegiatan 1 : Analisis Pola Pangan Harapan	Laporan Analisis PPH Konsumsi	Laporan		1	1	182,500	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kegiatan 2 : Pengembangan Pangan Lokal	Promosi Pangan Lokal	Kali		1	1	612,000	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program 3 : Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar								
Kegiatan 1 : Pengawasan Mutu Pangan Segar	Kabupaten/Kota yang diawasi Mutu Pangan Segarnya	Kab/Kot		9	9	550,500	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
INDIKATOR SDGs 2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)								
Program 1 : Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan								
Kegiatan 1 : Intensifikasi Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang diintensifkan (Ha)	Ha		-	200	1.233,65	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Kegiatan 2 : Rehabilitasi Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang direhabilitasi (Ha)	Ha		-	200	3.884,10	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Kegiatan 3 : Peremajaan Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang diremajakan (Ha)	Ha		-	300	2.329,20	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Program 2 : Program Perluasan Kebun Sawit								
Kegiatan 1 : Ekstensifikasi perkebunan sawit	Peningkatan Luas Kebun Sawit (Ha)	Ha		-	50	1.217,95	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Program 3 : Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit								
Kegiatan 1 : Ekstensifikasi Penanaman Baru komoditi Perkebunan	Peningkatan luas Kebun Non Sawit (Ha)							DINAS PERKEBUNAN
	a.Karet	Ha		20	50			
	b.Lada	Ha		-	35			
	c.Kakao	Ha		-	50			
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	

				2017	2018			
Program 4 : Program pengembangan budidaya perikanan								
Kegiatan 1 : Pembinaan, perencanaan dan pengembangan kelautan dan perikanan	Nilai tukar pelaku usaha KP (NTN)	Indeks		97	98	203,55	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program 5 : Program pengembangan perikanan tangkap								
Kegiatan : Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan	Produksi perikanan tangkap (Ton)	Ton		157.743	63.089	28.683,55	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program 6 : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan								
Kegiatan 1 : Peningkatan Jaminan Keamanan Pangan Asal Ternak	Jumlah unit usaha yang diberi sertifikat NKV	Unit Usaha		5	2	74,5	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Kegiatan 2 : Peningkatan Mutu Produk Olahan Peternakan	Jumlah usaha pengolahan hasil peternakan yang dilakukan pendampingan	Unit Usaha		1	1	72	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
INDIKATOR SDGs : (2.3.1.(a)) Ketersediaan pangan komoditi padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi, ikan, dan garam								
Program 1: Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Pangan								
Kegiatan 1 : Pengembangan Sentra Produksi Tanaman Pangan	Luas Pengembangan Produksi Padi Lahan Kering	Ha		300	150	1.023,05	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kegiatan 2 : Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan	Laporan Statistik Pertanian Tanaman Pangan	Dokumen		1	1	498,73	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
INDIKATOR SDGs: (2.3.2.a) Terlaksananya distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh tani dan nelayan								
Program 1:								
Kegiatan 1 :								
Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline	Target Tahunan		Indikatif Alokasi	Sumber	Instansi Pelaksana

		(2016)	2017	2018	Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Pendanaan	
INDIKATOR : (2.3.2.b) Berkembangnya usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan yang kurang mampu							
Program 1: PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK-PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH							
Kegiatan 1: Pembinaan Pengolahan Bubuk Lada	Terbinanya Poktan pengolahan bubuk lada(Renstra Awal)	Poktan		15	20	375	APBD DINAS PERKEBUNAN
Kegiatan 2: Pembinaan Pengolahan Gula Semut	Terbinanya Poktan pengolahan gula semut	Poktan		15	20	375	APBD DINAS PERKEBUNAN
Kegiatan 3 : Pembinaan Pengolahan Nata de Coco	Terbinanya Poktan pengolahan nata de coco	Poktan		15	20	200	APBD DINAS PERKEBUNAN
Program 2 : PROGRAM Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan							
Kegiatan 1 : Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	Produk		-	2	1.508	APBD DINAS PERKEBUNAN
Kegiatan 2 : Pembinaan Pasca Panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)						
	a.Karet	Kelompok Tani		-	5		APBD DINAS PERKEBUNAN
	b.Kelapa			-	5		APBD DINAS PERKEBUNAN
	c.Kakao			-	7		APBD DINAS PERKEBUNAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 3 : Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan								
Kegiatan 1 : Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi (Transaksi)	Transaksi		50	50	923,20	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Kegiatan 2 : Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)			-	2	155,40	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Program 4 : Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan								
Kegiatan 1 : Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	Kelompok		20	20	601,00	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Program 5 : Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan								
Kegiatan 1 : Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	Kelompok Tani		25	25	789,30	APBD	DINAS PERKEBUNAN
	a.Karet			7	8			
	b.Kelapa			3	2			
	c.Kakao			5	5			
	d.Lada			10	10			
Kegiatan 2 : Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi (%)	%		-	15	260,80	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Program 6 : Program pengembangan budidaya perikanan								
Kegiatan 1 : Pembinaan, perencanaan dan pengembangan kelautan dan perikanan	Nilai tukar pelaku usaha KP (NTN)	Indeks		97	98	203,55	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
Program 7 : Program pengembangan perikanan tangkap								
Kegiatan 1 : Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan	Produksi perikanan tangkap (Ton)	Ton		157.743	163.089	28.683,55	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program 8 : Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar								
Kegiatan 1 : Peningkatan dan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya (Ton)	Ton		257.772	271.339	26.470,23	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDIKATOR SDGs : (2.4.1(a)) Tersalurkannya sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan, terutama pupuk, benih dan alat mesin pertanian/perikanan								
Program 1 : PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN								
Kegiatan 1 : Intensifikasi Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang diintensifkan (Ha)	Ha		-	200	1.233,65	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Kegiatan 2 : Rehabilitasi Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang direhabilitasi (Ha)	Ha		-	200	3.884,10	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Kegiatan 3 : Peremajaan Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang diremajakan (Ha)	Ha		-	300	2.329,20	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Program 2 : PROGRAM Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan								
Kegiatan 1 : Pembinaan Pasca Panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	Poktan						
	a.Karet							DINAS PERKEBUNAN
	b.Kelapa			-	5	-		
	c.Kakao			-	5	-		

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
	d.Lada		-	7	-		
	e.Aren		-	8	-		
Program 3 : PROGRAM PERLUASAN KEBUN SAWIT							
Kegiatan : Ekstensifikasi Perkebunan Sawit	Peningkatan Luas Kebun Sawit (Ha)	Ha	-	50	1.217,95	APBD	DINAS PERKEBUNAN
Program 4 : PROGRAM KONSERVASI LAHAN DAN AIR							
Kegiatan 1: Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)		125	175	380	APBD	DINAS PERKEBUNAN
	a. Embung	Unit	75	75			
	b. Biopori		50	50			
	c. Drainase		0	50			
Program 5: Peningkatan Produksi Peternakan							
Kegiatan 1: Pengembangan Perbibitan dan Inseminasi Buatan	Jumlah akseptor IB (ekor)	Ekor	3.500	3.500	1.870,2	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Program 6: Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Tanaman Pangan							
Kegiatan 1: Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tanaman Pangan Tepat Guna	Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	Jenis/Unit	2	2	815,6	APBD	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR SDGs : (2.5.1.*) Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas								
Program 1: Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan								
Kegiatan 1: Pengembangan Kawasan dan Peningkatan Produksi Pakan Ternak	1. Luas kebun HMT	Ha		1.213	1.213	104,4	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2. Luas padang penggembalaan	Ha		475	475			
INDIKATOR SDGs: (2.5.1 (b)) Berkembangnya program dan pembangunan di 1.000 Desa Mandiri Benih								
Program 1 : PROGRAM PENYEDIAAN BAHAN TANAMAN								
Kegiatan 1: Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan	Benih		70.000	70.000	498,1	APBD	DISBUN
Kegiatan 2: Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara	Ha		-	12,5	526,5	APBD	DISBUN
Program 2 : Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar								
Kegiatan 1: Peningkatan dan pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Produksi perikanan budidaya (Ton)	Ton		257.772	271.339	26.470,23	APBD	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDIKATOR SDGs: (2.5.2.*) Proporsi hewan ternak dan sejenisnya, diklasifikasikan menurut tingkat risiko kepunahan: berisiko, tidak berisiko, dan risiko yang tidak diketahui.								
Program 1 : Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan								
Kegiatan 1: Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan	1. Jumlah kejadian penyakit Jembrana	Kasus		20	15	84,5	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	2. Jumlah kejadian penyakit Brucellosis	Kasus		0	0			

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
	3. Jumlah kejadian penyakit AI	Kasus		63	63			
	4. Jumlah kejadian penyakit parasiter/cacingan	Kasus		900	900			
Kegiatan 2: Penguatan dan Pengawasan Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah kasus gangguan reproduksi	Kasus		425	1.500	173	APBD	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

INDIKATOR SDGs : 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)

3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

3.1.2(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup

3.2.2(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

3.2.2(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi

PROGRAM 1: PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kegiatan 1:								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 2 : PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan 1: Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder dan primer (DAK)	Jumlah kab/kota yang mendapat bimtek pengelolaan dana BOK dalam upaya pencapaian SPM	Kab/Kota			10	832,72	APBN	Dinas Kesehatan
	Kab/kota yang melaporkan capaian SPM & realisasi dana BOK	Kab/Kota						

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
PROGRAM 3: Program Obat dan Perbekalan Kesehatan								
Kegiatan 1 : Pemenuhan Sarana/Prasarana Instalasi Farmasi Provinsi (DAK)	Jumlah sarana prasarana gudang farmasi yang disediakan	Unit		-	3	235	APBN	Dinas Kesehatan
	Tersedianya sarana prasarana gudang farmasi provinsi	Jenis		3	-	407,01	APBN	Dinas Kesehatan
PROGRAM 4 : Program Pengembangan Lingkungan Sehat								
Kegiatan 1 : Penguatan Pansimas/Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (DAK)	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan koordinasi Pamsimas III	Orang		-	46	589,3	APBN	Dinas Kesehatan
	jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan STBM bagi camat, kades, pimpus dan Toga			-	80			
INDIKATOR SDGs : 3.3.1(a) Prevalensi HIV pada populasi dewasa 3.3.2(a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang 3.3.3(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria 3.3.4(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) 3.3.5(a) Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)								
PROGRAM 1 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular								
Kegiatan 1 : Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah orang mengikuti pertemuan penguatan jejaring TB HIV	Orang			50	34,6	APBD	Dinas Kesehatan
Kegiatan 2 : Rujukan Specimen (DAK)	jumlah specimen yang di kirim	Speciment			30	75	APBN	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
INDIKATOR SDGs : 3.4.1(a) Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun 3.4.1 (b) Prevalensi tekanan darah tinggi 3.4.1 (c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun							
PROGRAM 1 : Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular							
Kegiatan 1 : Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Jumlah peserta yang mengikuti pertemuan evaluasi pelaksanaan IPWL	Orang		65	37,35	APBD	Dinas Kesehatan
PROGRAM 2: Program Upaya Kesehatan Masyarakat							
Kegiatan 1 : Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat sekunder dan primer (DAK)	Jumlah kab/kota yang mendapat bimtek pengelolaan dana BOK dalam upaya pencapaian SPM	Kab/Kota		10	832,72	APBN	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs : 3.4.2* Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri 3.4.2(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa							
PROGRAM 1 : Program Upaya Kesehatan Masyarakat							
Kegiatan 1 : Dukungan UKM tersier di Balai Kesehatan Masyarakat (DAK)	Jumlah Puskesmas yang dilakukan skrining mata	PKM		10	200	APBN	Dinas Kesehatan
INDIKATOR SDGs : 3.5.1 (a) Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis 3.5.1 (b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi. 3.5.1 (c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan 3.5.1. (d) Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
PROGRAM 1 : Program Rehabilitasi Sosial							
Kegiatan 1 : Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran terlarang, KDRT & Korban Trafficking yang mendapatkan penanganan/pelayanan	Orang		50	-	209,45	APBD Dinas Sosial
INDIKATOR SDGs : 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern; 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin; 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern; 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR); 3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR).							
PROGRAM 1 : Program Keluarga Berencana							
Kegiatan 1 : Penyediaan Pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak	Pelayanan KIE dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Anak dalam Pengendalian Penduduk	Orang			100	240,8	APBD DKP3A
INDIKATOR SDGs : 3.8.1 (a) Unmet need pelayanan kesehatan 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.							
PROGRAM 1 : Program							
Kegiatan 1 :							

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR SDGs : 3.9.3 (a) Proporsi kematian akibat keracunan.								
PROGRAM 1 : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan								
Kegiatan 1 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan/kampanye/tentang pengelolaan persampahan	Orang		200	100	143,55	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Penyusunan Kebijakan manajemen pengelolaan sampah	Terlaksananya perusahaan pengelola B3 & Limbah B3 yang menggunakan manifest elektronik	Perusahaan			194	109,5	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah peraturan yang disusun dalam rangka mendukung pengelolaan sampah regional	Peraturan		1	-	48,4	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 3 : Penyusunan kebijakan kerjasama pengelolaan	Terwujudnya penerapan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kab/Kota di Kalimantan Timur	Kab/Kota			9	162,6	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM 2 : Program Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3								
Kegiatan 1 : Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mengelola B3 dan limbah B3	Perusahaan		140		99,8	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
PROGRAM 3 : Program Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3								
Kegiatan 1 : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan sampah dan limbah B3	Jumlah bank sampah di kab/kota untuk pengolahan sampah dan 1 sarana unit pengolahan limbah B3 yang berijin di kaltim	Bank Sampah		20	-	55,4	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
	Jumlah bank sampah di kab/kota untuk pengolahan sampah dan 1 sarana unit pengolahan limbah B3 yang berijin di kaltim	Unit pengelolaan LB3 jumlah Pengelolaan		2	-			
Kegiatan 2 : Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3	Jumlah orang yang mendapatkan wawasan tentang teknologi pengelolaan sampah dan limbah B3	Orang		50	-	58,4	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM 4 : Program Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan LH								
Kegiatan 1 : Pengembangan Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	Jumlah orang/masyarakat yang dibina dalam pengelolaan LH	Orang		-	20	61,5	APBD	Dinas Lingkungan Hidup
Kegiatan 2 : Penilaian dan Pemberian Penghargaan LH (Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, Kampung Iklim)	Jumlah penghargaan yang diberikan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	Perhargaan		-	4	65	APBD	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
INDIKATOR SDGs: 4.1.1(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B. 4.1.1(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B. 4.1.1(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B..							
PROGRAM 1 :							
Kegiatan 1							
INDIKATOR SDGs: 4.1.1(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat. 4.1.1(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 4.1.1(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat. 4.1.1(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun. 4.3.1(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.							
PROGRAM 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan							
Kegiatan 1 : Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	Orang		313	313	3.000	APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 4.2.2. (a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							
PROGRAM 1 :							
Kegiatan 1 :							
INDIKATOR SDGs: 4.3.1 (b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).							
PROGRAM 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan							
Kegiatan 1 : Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa miskin di Perguruan Tinggi	Jumlah Mahasiswa Miskin yang Mendapatkan Beasiswa	Orang		640	640	3.000	APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
INDIKATOR SDGs: 4.4.1 * Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)								
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
Kegiatan 1 : Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Orang		600	600	7.659,75	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 2 : Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	Orang		200	200	1.681,7	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 3 : Pengembangan system perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya sistem perenanaan dan pengendalian pendidik dan tenaga kependidikan	Kab/Kota		10	10	1.396,5	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 4 : Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (Kegiatan kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	Orang		1200	1200	13.200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			2017	2018				
PROGRAM 1 : Program Pengembangan Nilai Budaya								
Kegiatan 1 : Pengembangan industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Terselenggaranya industri ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan iptek	Kab/Kota		10	10	700	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 4.6.1(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun 4.6.1(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun.								
PROGRAM 1 : Program Pendidikan Luar Biasa								
Kegiatan 1 : Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah Peserta Minat, Bakat dan Kreativitas siswa LB	Orang		100	200	1.135,5	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan								
Kegiatan 1 : Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	Orang		313	313	3.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 4.c.1* Persentase guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang bersertifikat pendidik								
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
Kegiatan 1 : Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilatih	Orang		600	600	7.659,75	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan		Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				2017	2018			
Kegiatan 2 : Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang ditingkatkan mutu dan kualitasnya	Orang		200	200	1.681,7	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 3 : Pengembangan system perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan	Terselenggaranya sistem perenanaan dan pengendalian pendidik dan tenaga kependidikan	Kab/Kota		10	10	1.396,5	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kegiatan 4 : Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi (Kegiatan kualifikasi Pendidikan Guru)	Jumlah Pendidik yang Memenuhi Standar Kompetensi	Orang		1200	1200	13.200	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM 1 : Program Manajemen Pelayanan Pendidikan								
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan	Jumlah pelatihan, seminar, lokakarya, diskusi ilmiah	Kali		3	3	400	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
TUJUAN 5 : KESETARAAN GENDER								
INDIKATOR SDGs: 5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan								
PROGRAM 1 : Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak								
Kegiatan 1 : Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	Jumlah Rakor pemberdayaan perempuan dan anak	Kali		1		375	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline (2016)	Target Tahunan		Indikatif Alokasi Anggaran 2 Tahun (Rp.Juta)	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			2017	2018			
INDIKATOR TPB 5.2.2(a) : Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif							
PROGRAM 1 : Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
Kegiatan 1 : Advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Jumlah pelayanan perlindungan perempuan dan pemenuhan hak anak	%		60	166	APBD	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Anak
PROGRAM 1 :							
Kegiatan 1 :							
INDIKATOR SDGs: 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun							
5.3.1(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat							
PROGRAM 1 : Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pendidikan							
Kegiatan 1 : Pemberian beasiswa bagi siswa miskin (SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/SMK/MA)	Jumlah Beasiswa bagi siswa Miskin	Orang	313	313	3.000	APBD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
INDIKATOR SDGs: 5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern							
5.6.2* Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.							
PROGRAM 1 : Program Keluarga Berencana							
Kegiatan 1 : Penyediaan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak	Meningkatkan pemahaman kepada peserta dalam mewujudkan kesetaraan gender dan anak	Orang		100	30	APBD	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan & Anak

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Jalan Kesuma Bangsa No 2
Telephone. (0541) 741044
Faximille. (0541) 742283
SAMARINDA**